



Korupsi Bisa Hambat Indonesia Jadi Negara Maju



KSP: Pekan Ini, Jokowi akan Reshuffle Kabinet

2011-2020, Investasi Ilegal Rugikan Masyarakat Rp 114,9 T



INVESTOR DAILY

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

RABU 14 APRIL 2021

INA Harus Gerak Cepat

Oleh Arnoldus Kristianus, Triyan Pangastuti, dan Nasori

JAKARTA - Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) harus segera bergerak dan memberikan hasil cepat (*quick wins*). Dengan demikian, lembaga yang dibentuk untuk menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu mampu menjadi penentu (*game changer*) pemulihan ekonomi nasional melalui upayanya menarik investasi, khususnya investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI).

Gerak cepat INA juga diperlukan guna membantu BUMN-BUMN karya yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur publik. Jika ditawarkan melalui INA, proyek-proyek BUMN bakal laku lebih cepat sehingga BUMN tidak lagi kesulitan arus kas (*cashflow*) dan memiliki rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*/DER) lebih sehat.

Langkah segera yang mesti ditempuh INA bersama pemerintah adalah membuat peta jalan (*roadmap*) investasi, menuntut konsolidasi internal, menerbitkan berbagai aturan turunan tentang INA, dan memastikan kelembagaan INA ke depan. Jika pemerintah memutuskan INA menjadi Kementerian Investasi, perubahan harus dilakukan secepatnya guna memberikan kepastian kepada investor.

Proyek yang ditawarkan INA sebaiknya proyek-proyek bernilai ekonomi tinggi, seperti proyek infrastruktur di kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata. Soalnya, para investor akan mencari proyek dengan hasil investasi (*return*) yang menguntungkan. Selain itu, investasi yang masuk melalui

INA harus mampu menjadi stimulan dan menciptakan peluang bisnis bagi pelaku usaha swasta, bukan cuma BUMN.

Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwanton, dan anggota Komisi XI DPR Eriko Sotarduga dalam acara *Hot Economy* di *BeritaSatu TV*, Selasa (13/4) malam. Hal senada dikemukakan ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy dan ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede yang dihubungi *Investor Daily* secara terpisah di Jakarta, Selasa (13/4).

Sementara itu, manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKI), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) kepada *Investor Daily* menyatakan, mereka sedang menginventarisasi proyek-proyek yang bakal ditawarkan kepada investor melalui INA. Bahkan beberapa di antaranya sudah siap ditawarkan.

INA dibentuk melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker untuk menjawab persoalan struktural pembiayaan pembangunan di Tanah

Air. Masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap INA, mengingat lembaga *sovereign wealth fund* (SWF) itu bertanggung jawab langsung kepada presiden dan diberi kewenangan khusus (*sui generis*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 73/2020 tentang Modal Awal LPI dan PP 74/2020 tentang LPI, INA atau LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi investasi. Dalam menjalankan tugasnya, INA dapat menjalin kerja sama dengan mitra

investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, atau entitas lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

INA memiliki enam kewenangan, yaitu melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*). Tugas lainnya adalah menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset.

INA memperoleh dukungan modal awal Rp 15 triliun berupa penyertaan modal awal dari APBN 2020, berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemenuhan modal secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara US\$ 5 miliar pada 2021.

Bersambung ke hal 2

investor.id

BRI
Jadwal Imsakiyah
Ramadhan 1442 H

untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya

14 April 2021			
Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya
11.56	15.14	17.55	19.05
15 April 2021			
Imsyak	Subuh		
04.28	04.38		

INDUSTRIES



Kuku Kumara

Maret, Penjualan Mobil Melesat 72%

Penjualan mobil secara *wholesales* (pengiriman mobil ke dealer) mencapai 84.910 unit pada Maret 2021, melesat 72,6% dari Februari 2021, sedangkan penjualan mobil secara ritel naik 65% menjadi 77.511 unit. Dibandingkan bulan sama 2020, penjualan mobil secara *wholesales* tumbuh 10,5%, sedangkan ritel melesit 28%.

>> 8

ENERGY

Menteri ESDM Putuskan Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang Didanai APBN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memutuskan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang akan menggunakan dana APBN.

>> 9

MARKETS & CORPORATE

Smartfren Tukar Utang Jadi Saham Rp 3,9 Triliun

PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) melakukan konversi atas sejumlah obligasi wajib konversi (OWK) menjadi saham perseroan dengan nilai transaksi Rp 3,9 triliun.

>> 15



Struktur Organisasi LPI/INA:

Dewan Pengawas

- Ketua ex-officio Dewan Pengawas: Menkeu Sri Mulyani.
- Anggota ex-officio Dewan Pengawas: Menteri BUMN Erick Thohir.

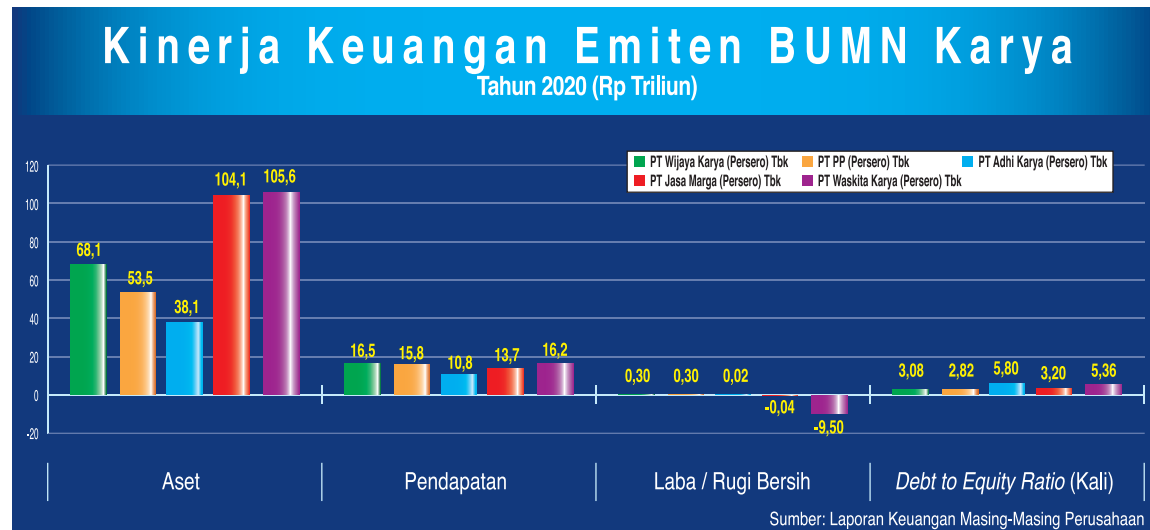
Anggota:

- Darwin Cyril Noerhadi.
- Yozua Makes.
- Haryanto Sahari.

Direksi

- Direktur Utama: Ridha Wirakusumah.
- Wakil Direktur Utama: Arief Budiman.
- Direktur Investasi: Stefanus Ade Hadwidjaja.
- Direktur Risiko: Marita Alisjahbana.
- Direktur Keuangan: Eddy Purwanto.

Sumber: LPI/INA



Indonesia Investment Authority (INA):

A. Fungsi:
Mengelola investasi.

B. Tujuan:
Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

C. Tugas:

- Merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi investasi.
- Dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

D. Status:

- Badan hukum Indonesia, sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia.
- Bertanggung jawab kepada presiden.
- Diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana diatur UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. Kewenangan:

- Melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan.
- Menjalankan kegiatan pengelolaan aset.
- Menjalinkan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*).
- Menentukan calon mitra investasi.
- Memberikan dan menerima pinjaman.
- Menatausahakan aset.

F. Permodalan:

- Memperoleh dukungan modal awal Rp 15 triliun berupa penyertaan modal awal dari APBN 2020, berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Pemenuhan modal secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara US\$ 5 miliar pada 2021.

G. Sumber Modal:

- Penyertaan modal negara (PMN); dan/atau sumber lainnya.
- PMN dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.
- Modal dapat ditambah melalui PMN dan/atau sumber lainnya.

Sumber: PP 73/2020 tentang Modal Awal LPI dan PP 74/2020 tentang LPI

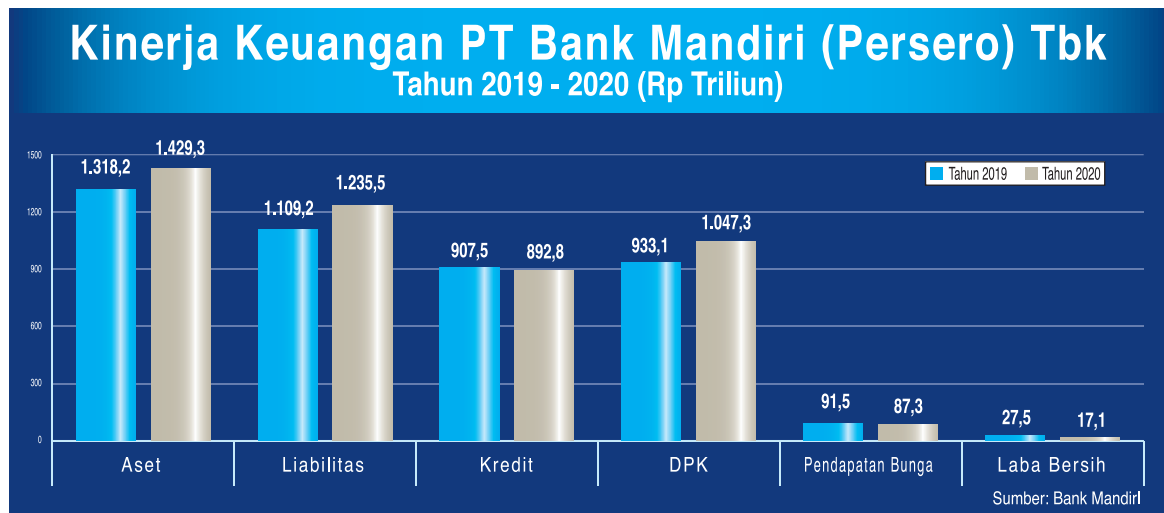
Bank Mandiri Terbitkan Sustainability Bond US\$ 300 Juta

Oleh Nida Sahara

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih *fresh fund* sebesar US\$ 300 juta atau setara dengan Rp 4,39 triliun (kurs Rp 14.642) melalui penerbitan perdana *sustainability bond* yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan (*green*) dan sosial. *Sustainability bond* tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan kupon sebesar 2,00%.

Dalam penerbitan *sustainability bond* ini, Bank Mandiri menunjuk Deutsche Bank, HSBC, dan Mandiri Securities sebagai *Joint Lead Managers*.

Direktur *Treasury* dan *International Banking* Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan, penerbitan *sustainability bond* tersebut merupakan yang pertama dilakukan perseroan dan merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disusun perseroan dan telah memenuhi standar *sustainability bond guidelines* dari International Capital Market Association (ICMA). Selain itu, *framework* tersebut



juga selaras dengan Association of Southeast Asian Nation (Asean) Sustainability Bond Standards, Green Bond Standards, dan Social Bond Standards.

"Bank Mandiri telah berkomitmen untuk menjalankan praktek Keuangan Berkelanjutan dengan menyusun RAKB yang diimplementasikan melalui 3 pilar strategis. Ketiga pilar itu adalah *sustainable banking*, *sustainable operations*, dan

sustainable corporate social responsibility & financial inclusion," kata Panji, Selasa (13/4).

Dia menambahkan, salah satu inisiatif dalam pilar *sustainable banking* adalah pembiayaan kepada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi baru dan terbarukan serta pembiayaan kepada proyek sosial terutama untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ke depan, kata Panji, pihaknya berharap dapat terus mendukung program pemerintah untuk menggali dan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar di Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's).

Penerbitan *Sustainability Bond* ini menerima *demand order* lebih dari US\$ 2,5 miliar pada saat proses

book building sehingga terdapat kelebihan permintaan (*oversubscription*) lebih dari 8,3 kali dari rencana jumlah *bond* yang diterbitkan. "Hal ini menunjukkan persepasi positif dari investor asing terhadap kinerja dan prospek bisnis Bank Mandiri ke depan," ucap Panji.

Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari *rating* yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch. Pascaproses penerbitan, obligasi tersebut rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX).

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), penerbitan EMTN ketiga akan dilakukan mulai tanggal 9 April 2021 kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat dengan tunduk pada Regulation S berdasarkan the US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah dan akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX).

Bersambung ke hal 12

BERITA SATU .COM

India Mempercepat Otorisasi Vaksin di Dalam Negeri

Oleh Grace Eldora

NEW DELHI – Pemerintah India telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin Covid-19 buatan Rusia, Sputnik V. Otoritas di India pada Selasa (13/4) menyatakan akan mempercepat persetujuan untuk vaksin lain yang juga telah disetujui di negara-negara besar lainnya, karena tingkat infeksi melonjak ke rekor tertinggi baru di negara tersebut.

Pemerintah telah menghadapi permintaan yang meningkat untuk menyetujui lebih banyak vaksin selama lonjakan kasus di antara 1,3 miliar populasi, sementara inokulasi massal lebih lambat dari perkiraan.

Sputnik V adalah obat ketiga yang mendapat otorisasi oleh pemerintah India setelah Covishield dan Covaxin dari Oxford-AstraZeneca, yang dikembangkan oleh perusahaan India Bharat Biotech.

Panel ahli SEC mengatakan vaksin Rusia harus diotorisasi dalam situasi darurat dan memang telah diterima, kata kementerian kesehatan dalam sebuah pernyataan.

GV Prasad, salah satu ketua dewan direksi perusahaan farmasi Dr Reddy's Laboratories, mengatakan pihaknya sangat senang mendapatkan otorisasi penggunaan darurat.

"Dengan meningkatnya kasus di India, vaksinasi adalah alat yang paling efektif dalam memerangi Covid-19," kata dia.

Kementerian Kesehatan India juga mengatakan akan mempercepat persetujuan vaksin yang tidak dibuat di India, tidak seperti tiga vaksin yang pertama yang disetujui. Tujuannya memperluas keranjang vaksin untuk

penggunaan dalam negeri, serta menambah kecepatan dan cakupan vaksinasinya.

Vaksin harus sudah mendapatkan otorisasi penggunaan darurat oleh regulator. Sama seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat (AS), Badan Pengobatan Eropa (EMA) dan lainnya di Inggris atau Jepang, ataupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Persyaratan untuk uji klinis pra-persetujuan akan diganti dengan uji coba pasca otorisasi.

"Saya pikir ini penting. Pada dasarnya ini adalah satu langkah lagi untuk membuka vaksinasi ke sektor swasta dan ini bagus, karena sektor pemerintah saja tidak akan mampu menanggung beban itu. Jadi jika Pfizer atau Moderna ingin memasukkan vaksin mereka melalui pemasok, bukan produsen, maka itu mungkin sekarang," kata ahli virus Shahid Jameel kepada AFP.

Lonjakan Kasus

Pemerintah India pada Senin (12/4) melaporkan lebih dari 161.000 kasus baru. Kasus baru di India tembus 100.000 selama tujuh hari berturut-turut. Sehingga total kasus

menjadi hampir 13,7 juta.

Otoritas lokal telah memberlakukan jam malam dan membatasi pergerakan dan aktivitas penduduk. Di ibu kota keuangan India, Mumbai, pihak berwenang telah memerintahkan pembangunan tiga rumah sakit tambahan masing-masing dengan 2.000 tempat tidur dalam enam minggu ke depan. Jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 juga telah ditingkatkan di New Delhi.

Sputnik V, yang didukung oleh Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), sudah memiliki perjanjian produksi di India untuk menghasilkan 852 juta dosis.

CEO RDIF Kirill Dmitriev mengatakan dalam sebuah pernyataan, persetujuan itu merupakan tonggak penting setelah kerja sama ekstensif pada uji klinis vaksin di India. Dmitriev mengatakan kepada penyiar India NDTV, dosis pertama bisa siap pada akhir April atau Mei dengan peningkatan kenaikan produksi pada Juni.

"Kami yakin pada Juni, kami akan benar-benar memiliki kapasitas produksi yang baik di India dan akan menjadi pemain yang sangat berarti dalam program vaksinasi di India," tambah dia.

India, yang menaungi bagi produsen vaksin terbesar di dunia, memulai upaya vaksinasinya pada pertengahan Januari lalu dan telah memberikan lebih dari 108 juta dosis sejauh ini.

Tetapi tujuan ambisius pemerintah untuk memvaksinasi 300 juta orang pada akhir Juli terhambat oleh laporan kekurangan vaksin di beberapa negara bagian, ditambah keraguan masyarakat atas vaksin.

Pemerintah juga telah memperlambat ekspor vaksin karena kasus yang meningkat di dalam negeri. (afp)



Investor Daily/Munir Uz zaman / AFP

Karantina 8 Hari

Warga meninggalkan kota dengan kapal feri pada Selasa (13/4) setelah pihak berwenang memerintahkan karantina selama delapan hari untuk meredam penyebaran virus corona Covid-19 di distrik Munshigamj, sekitar 70 km dari Dhaka, ibukota Bangladesh.

Biden Sampaikan Selamat Puasa Ramadan

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (12/4) waktu setempat menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat Muslim di AS dan seluruh dunia.

"Saya dan Jill (menyampaikan) salam hangat dan mengucapkan semoga Ramadan ini diberkahi kepada komunitas Muslim di Amerika Serikat dan seluruh dunia," kata dia, dalam siaran pers Gedung Putih di Washington dan dilansir Kedubes AS di Jakarta, Selasa (13/4).

Biden mengatakan, puasa Ramadan tahun ini berlangsung pada masa yang sulit. Karena masih ada pandemi Covid-19, kata dia, para sahabat dan orang yang kita cintai belum bisa berkumpul untuk merayakan dan beribadah. Sehingga, tambah dia, ada begitu banyak keluarga yang akan berpuasa tanpa ditemani orang yang mereka sayangi. "Meski begitu, komunitas Muslim kita memulainya bulan dimana diturunkannya wahyu ini dengan harapan baru. Ada banyak orang yang akan berfokus pada

meningkatkan keimanan kepada Tuhan, menegaskan kembali komitmen mereka untuk melayani orang lain sebagai bagian dari iman, dan mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang mereka nikmati, termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan," tutur Biden.

Ia juga mengatakan bahwa umat Muslim Amerika senantiasa memperkaya AS sejak didirikan. Mereka sama beragam dan dinamisnya seperti AS. (* /sn)

PBB Khawatir Myanmar Menuju Konflik Besar-Besaran

YANGON - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan Myanmar bisa berputar ke arah konflik besar-besaran seperti yang terjadi di Suriah. Selama dua bulan terakhir, tindakan keras yang diberlakukan oleh militer negara tersebut menurut kelompok pemantau lokal telah merenggut lebih dari 700 nyawa.

Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak militer merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. PBB kemudian melontarkan peringatan atas kemungkinan kejahatan

terhadap kemanusiaan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachetelet pada Selasa (13/4) mendesak negara-negara untuk segera mengambil tindakan untuk mendorong militer Myanmar menghentikan kampanye penindasan dan pembantaian rakyatnya.

Demonstrasi harian di seluruh Myanmar telah bertemu dengan putaran langsung. Setidaknya 710 warga sipil telah tewas hingga Senin (12/4) malam, termasuk 50 anak-anak, menurut kelompok pemantau setempat. "Saya khawatir situasi di Myanmar

sedang menuju konflik besar-besaran. Ada gema yang jelas tentang Suriah pada 2011," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.

Ia merujuk pada dimulainya perang saudara di sana. Selama dekade terakhir, konflik itu menewaskan hampir 400.000 orang dan memaksa lebih dari enam juta orang meninggalkan negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kelompok pemberontak etnis Myanmar di beberapa wilayah perbatasan tanpa hukum telah meningkatkan serangan terhadap militer dan polisi, menimbulkan kekhawatiran

akan konflik sipil yang lebih luas.

Militer membalas dengan serangan udara. Free Burma Rangers, sebuah kelompok bantuan Kristen di daerah itu, mengatakan pihaknya telah mengungsikan lebih dari 24.000 warga sipil di negara bagian Karen pada Sabtu (10/4).

Free Burma Rangers, yang membuka klinik kesehatan di negara bagian itu, mengatakan serangan udara telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai lebih dari 40 orang.

Penduduk desa di beberapa daerah tidak dapat mempersiapkan tanaman padi mereka karena khawatir akan

ditembak oleh militer di lahan mereka, kata kelompok bantuan itu. "Mereka takut tidak akan panen padi musim gugur mendatang," kata kelompok tersebut.

Serangan militer mengirim beberapa ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Thailand dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kebanyakan telah kembali ke sisi perbatasan Myanmar.

Di Yangon, pihak berwenang memburu mereka yang bertanggung jawab atas bulletin bawah tanah berjudul "Molotov".

Publikasi dimulai oleh sekelompok aktivis muda untuk memerangi pemadaman internet dan penekanan

informasi yang sedang berlangsung. "Jurnal Molotov diterbitkan secara ilegal," kata media negara *Global New Light of Myanmar*.

Ditambahkan bahwa tindakan hukum akan diambil terhadap pihak para yang terlibat. Dalam semalam, junta kembali mengumumkan tambahan 20 orang lagi ke daftar surat perintah penangkapan 200 selebritas, termasuk aktor dan penyanyi, yang dituduh menyebarkan perbedaan pendapat terhadap militer. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman tiga tahun penjara. (afp/eld)

INA Harus Gerak Cepat

Sumbangan dari hal 1

INA dibentuk pada Desember 2020 dan beroperasi sejak pertengahan Februari 2021. Untuk memuluskan tugas INA, pemerintah memberikan insentif antara lain berupa tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen sebesar 7,5% dari sebelumnya 20% kepada investor asing yang bekerja sama dengan INA. Insentif lainnya sedang disiapkan pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investor.

Butuh Peta Jalan

Menurut Ekonom Senior UI, Ari Kuncoro, INA bisa menarik lebih banyak FDI. Salah satu sektor yang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan INA adalah infrastruktur. "Agar bisa segera menarik investasi, INA butuh peta jalan (*roadmap*) yang bisa mengakomodasi kepentingan seluruh pihak," kata dia.

Ari menjelaskan, untuk mengoptimalkan investasi yang masuk, INA harus benar-benar jeli menawarkan proyek yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Proyek-proyek yang ditawarkan mesti memberikan masa tenggang (*grace period*) dan hasil investasi (*return*) yang menguntungkan investor. "Investor biasanya punya *grace period*, setelah itu meminta *return*," ujar dia.

Dalam *roadmap* INA, kata Ari Kuncoro, yang ditawarkan sebaiknya proyek-proyek di kawasan perbatasan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata yang notabene memiliki nilai ekonomi tinggi. Bisa pula proyek infrastruktur transportasi seperti jalan tol di Jawa.

Dia mengungkapkan, dari sisi demografi, sebagian penduduk saat ini terkonsentrasi di kota besar dan kota penyangga atau kota satelit. Alhasil, transportasi bukan hanya berfungsi menjadi sarana mobilitas atau akses ke tempat kerja, tetapi juga memiliki unsur pariwisata.

Selain itu, ada konsep *transport oriented development* (TOD), sehingga di sekitar stasiun kereta bisa dibangun apartemen, misalnya untuk kelas menengah atau milenial. "Dari *roadmap* itu investor menjadi tahu bahwa Indonesia mengerti bagaimana memanfaatkan populasi yang sekitar 147 juta di antaranya adalah kelas menengah," ucap dia.

Ari Kuncoro mengakui, INA juga

jangan sembarangan mengambil atau menawarkan proyek. Banyak proyek infrastruktur dibiayai kredit jangka pendek. "Perlu dilihat lagi apakah proyek yang dibiayai dengan dana jangka pendek bisa diambil alih dan menggunakan dana jangka panjang," tutur dia.

Itu sebabnya, menurut Ari, perlu ada ekspansi dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan infrastruktur untuk fasilitas umum, tetapi juga pembangunan di bidang lain, misalnya kawasan industri.

Ari Kuncoro menambahkan, hal penting lainnya yaitu melobi para investor proyek-proyek yang bersifat fisik, bukan investor finansial. "Harus ada proyek fisiknya agar memberikan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional," tegas dia.

Ari menekankan, meski proyek infrastruktur yang ditawarkan lewat INA adalah proyek yang menjanjikan *return* tinggi, pemerintah mesti tetap membangun infrastruktur dengan *return* rendah. Soalnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata.

"Untuk daerah-daerah yang *return*-nya kurang tinggi, dana APBN tetap diperlukan. Jadi, kombinasi keduanya tetap diperlukan," tandas dia.

Peluang Swasta

Ketua Umum Jusindo, Sutrisno Iwantonno mengatakan investasi yang masuk melalui INA diharapkan bisa menstimulasi kegiatan ekonomi dan memberikan efek penganda (*multiplier effect*). Alhasil, INA bisa menciptakan peluang bagi pelaku usaha, bukan hanya BUMN.

"Misalnya kalau dia membangun pelabuhan, lokasinya harus sesuai kebutuhan, jangan pelabuhan dan jalan yang daerahnya kurang diminati investor. Pilihan lokasinya harus tepat supaya bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kita," ujar dia.

Dia menjelaskan, pelibatan investor dalam pembangunan proyek juga harus jelas. "LPI *kan* bertugas sebagai pengelola dana investasi, tentu harus ada pihak lain yang bertugas sebagai pelaksana. Apakah hanya BUMN yang bergerak di bidang pembangunan atau bisa mengundang keterlibatan swasta. Itu harus jelas," papar dia.

Dunia usaha di dalam negeri, menurut Sutrisno, sangat mengharapkan ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek yang ditawarkan INA. "Jangan hanya BUMN yang terlibat. Tetapi memang untuk bisa berpartisipasi

harus sesuai kelayakan, juga harus transparan dan sesuai dasar hukumnya," ucap dia.

Sutrisno mengungkapkan, permasalahan pokok yang dihadapi pengusaha di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur. Pemerintah bertugas membangun infrastruktur tetapi memiliki keterbatasan di sisi anggaran.

"INA hadir untuk menjawab hal itu. Saat infrastruktur berfungsi dengan baik maka perekonomian bisa tumbuh optimal. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penciptaan lapangan kerja," tutur dia.

Sutrisno menambahkan, agar diminati investor, proyek yang ditawarkan INA harus memberikan *return* yang menguntungkan. Calon investor juga harus diberi pemahaman tentang model bisnis dan prospek bisnisnya. "Kalau tidak ada prospek, investor tidak akan masuk," tegas dia.

Tak kalah penting, kata Sutrisno, adalah manajemen atau para pengelola dana dan proyek di INA. "Investor pasti mempertimbangkan sisi profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," ujar dia.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengemukakan, investor memerlukan informasi yang lengkap mengenai *roadmap* INA. Kecuali itu, diperlukan regulasi yang memadai untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para investor.

"Investor tidak punya batasan negara. Mereka melihat prospeknya ke depan. Tentu investasi ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang," ucap dia.

Eriko menegaskan, INA harus dipersiapkan secara matang agar memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian nasional. "Ini kita berbicara jangka panjang, untuk menyambut Indonesia Emas 2045, bukan hanya untuk lima tahun ke depan saja," tandas dia.

Investor, menurut Eriko, tidak hanya melihat *return*, tetapi juga nilai tambah aset. Karena itu, INA harus bisa meyakinkan para calon investor mengenai hal tersebut.

Harus Segera Bergerak

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, INA harus segera bergerak dan menghasilkan *quick wins* sehingga turut mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui upayanya menarik investasi, khususnya FDI.

Dia menjelaskan, langkah awal yang perlu dipersiapkan yaitu membuat

website resmi lembaga tersebut. Ini penting karena akan menjadi rujukan awal dari para investor untuk memilih investasi di INA.

"Termasuk di dalamnya menggali info tentang investasi yang disediakan oleh INA. Namun, sebelum *website* muncul, sudah harus disepakati proyek apa yang bisa dibiayai investor melalui INA," tutur dia.

Selain itu, menurut Yusuf Rendy, saat ini investor masih menunggu beberapa hal, seperti aturan turunan PP tentang LPI. "Kemudian juga *kan* sekarang menunggu aturan dari perubahan badan menjadi Kementerian Investasi. Tentu ini akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para investor," ucap dia.

Ekonom Bank Permata, Josua Paradede memaklumi INA belum bergerak karena masih dalam tahap konsolidasi organisasi, mengingat jajaran direksi dan dewan pengawasnya baru terbentuk pada Februari lalu.

Dia menjelaskan, jajaran direksi INA masih harus memetakan proyek dan memastikan *feasibility study* (FS) atau studi kelayakan dan *internal rate of return* (IRR). "Jadi, tidak bisa langsung dan *nggak* semudah yang dibayangkan, butuh proses tahap awal," tandas dia.

Josua yakin dewan direksi LPI tetap berkomitmen menjaga kepercayaan investor. Apalagi minat investor global cukup besar. Pemerintah harus memetakan proyek secara jelas untuk menjaga ekspektasi investor.

"Kepercayaan investor harus dijaga, karena LPI memiliki *multiplier effect* dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas dia.

Josua memperkirakan dampak LPI baru bisa dirasakan pada akhir 2021 hingga tahun depan. Meski pemerintah sudah mendapatkan beberapa komitmen investasi, investor masih dalam tahap pemulihan pascapandemi Covid-19.

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih akan didorong konsumsi yang lebih besar, disusul investasi. "Kita lihat pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. Itu jadi modal kita. Itu akan lebih terakselerasi nanti oleh proyek-proyek yang difasilitasi LPI," tutur dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan, jajaran direksi INA tengah menyiapkan sejumlah langkah, terma-

suk transaksi dalam rangka membantu BUMN karya mengurangi beban utangnya (*deleveraging*).

Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah belum akan melakukan suatu penilaian (*assessment*) terhadap kinerja INA sebagai SWF. "SWF (INA) baru berusia satu bulan. PMN (pemyertaan modal negara) juga baru masuk Januari 2021. Jadi, agak terlalu dini membuat komentar soal SWF. Kami akan melihat yang akan dilakukan INA dalam satu tahun," ujar Menkeu menanggapi hasil riset Fitch Ratings mengenai INA yang dipublikasikan baru-baru ini.

Fitch Ratings menilai INA dalam jangka pendek kurang signifikan membantu BUMN mengurangi beban utangnya dengan menjadi pembeli siaga aset-aset yang dijual perusahaan-perusahaan pelat merah.

Soalnya, menurut Fitch Ratings, modal INA relatif kecil dibandingkan skala utang sejumlah BUMN, terutama yang bergerak di sektor strategis, seperti konstruksi, jalan tol, serta migas.

"Misalnya, total utang perusahaan konstruksi BUMN lebih dari Rp 170 triliun per akhir September 2020 dan utang PT Pertamina (Persero) sekitar Rp 300 triliun per akhir Juni 2020," ujar *Director Corporates* PT Fitch Ratings Indonesia, Olly Prayudi dalam publikasinya.

Olly menambahkan, keterlibatan INA dalam proyek tertentu dapat mengurangi *leverage* di BUMN tertentu, tetapi hal itu juga tergantung keputusan strategis perusahaan yang terlibat.

"Terdapat risiko bahwa bantuan modal yang diberikan INA dapat terkikis jika BUMN menyalurkan kembali dana yang dikeluarkan untuk proyek infrastruktur baru. Risiko ini cukup besar mengingat keinginan pemerintah mempercepat investasi tersebut," papar dia.

Ditawarkan BUMN Karya

Sementara itu, *Corporate Finance Group Head* Jasa Marga, Eka Setya Adrianto menjelaskan, perseroan membuka semua ruas jalan tol yang sudah beroperasi untuk ditawarkan kepada investor melalui INA. Ruas jalan tol ini terutama yang dimiliki Jasa Marga dengan kepemilikan di atas 80%.

Sejauh ini, kata dia, sudah ada investor yang tertarik mengakuisisi ruas jalan tol tersebut. Namun pembahasannya masih informal sehingga perseroan belum bisa menjelaskannya lebih lanjut.

Pembahasan dengan investor ini juga memerlukan proses administrasi dan penelaahan kinerja jangka panjang dan pendek terlebih dahulu. "Nanti saja detailnya, ada yang tertarik, nanti kami cari *timing* yang tepat," tutur dia.

Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal sebelumnya mengungkapkan, Jasa Marga menyiapkan sembilan ruas jalan tol untuk ditawarkan lewat INA. Dari sembilan ruas tersebut, perseroan menargetkan divestasi 2-3 jalan tol dengan nilai Rp 1,5-3 triliun tahun ini.

Donny mengatakan, aset yang ditawarkan kepada LPI sebenarnya bisa disesuaikan atau tidak terbatas pada sembilan ruas saja. Pihaknya pun siap mengundang investor lain, baik domestik maupun internasional, yang berminat mengakuisisi ruas jalan tol perseroan.

Di sisi lain, Waskita Karya juga siap menawarkan proyek jalan tol yang digarapnya melalui INA. Menurut *Corporate Secretary* Waskita Karya, Ratna Ningrum, perseroan menargetkan pelepasan 9 ruas tol pada 2021, baik melalui INA maupun divestasi kepada investor lainnya. Perkiraan total nilai divestasi mencapai Rp 10-11 Triliun.

"Dengan divestasi ini, Waskita juga diproyeksikan dapat meningkatkan kapasitas pendanaan melalui dekonsolidasi utang sekitar Rp 20 triliun," ujar dia.

Dia menambahkan, investor dalam dan luar negeri telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk divestasi tiga ruas tol, yaitu ruas Batang - Semarang, ruas Medan -Kualanamu - Tebing Tinggi, dan ruas Cinere - Serpong.

Ratna menjelaskan, total nilai transaksi tiga ruas tol tersebut mencapai Rp 4,3 triliun. Adapun finalisasi transaksi diharapkan rampung akhir bulan ini.

Perjanjian yang telah diteken Waskita Karya melalui anak perusahaannya, PT Waskita Toll Road (WTR), antara lain perjanjian jual beli bersyarat (*conditional sale purchase agreement/ CSPA*) berupa transaksi konversi saham (*share swap*) dan divestasi pembayaran tunai dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

CSPA tersebut merupakan perjanjian divestasi 20% saham WTR di ruas Tol Semarang - Batang (JSB) dan 34,9% saham WTR di Cinere-Serpong (CSJ) kepada SMI. (bil/git/rid/az)

Investor Daily/GREG BAKER / AFP

**Alibaba**

Seorang pria melewati logo Alibaba di luar kantor perusahaan di Beijing, Tiongkok, Selasa (13/4).

Ekonomi Tiongkok Tidak Dapat Mengandalkan Ekspor

Oleh **Happy Amanda Amalia**

▶ BEIJING – Tahun lalu laju ekonomi Tiongkok mendapat sokongan ekspor yang kuat, tetapi sokongan itu sudah berkurang. Menurut bea cukai negara pada Selasa (13/4), ekspor dalam nilai dolar hanya naik 30,6% pada Maret dari tahun lalu atau meleset dari ekspektasi untuk tumbuh 35,5%.

Menurut Juru bicara Bea Cukai Li Kiuwen kepada wartawan, untuk tiga bulan ke depan basis tinggi yang tercatat tahun lalu menjadi tantangan perdagangan pada Kuartal II. Selain itu, Li mengatakan kebangkitan kasus infeksi Covid-19 dan ketidakpastian di luar negeri – seperti tersumbatnya jalur Terusan Suez karena kapal peti kemas yang kandas – membuat Tiongkok masih memiliki jalan panjang untuk mencapai pertumbuhan perdagangan yang stabil.

Sebagai informasi, otoritas Tiongkok ingin mengalihkan ketergantungan ekonomi negaranya ke konsumsi swasta untuk mendorong pertumbuhan, dan menghindari manufaktur barang untuk ekspor. Namun kategori tersebut masih memainkan peran penting dalam per-

ekonomian secara keseluruhan. Apalagi pada tahun lalu, pabrik-pabrik Tiongkok dapat melanjutkan produksi jauh lebih awal dibandingkan pabrik di negara lain yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19.

Ekspor nasional tahun lalu dilaporkan naik 3,6%, sementara produk domestik bruto (PDB) negara tumbuh 2,3% dan menjadikannya sebagai satu-satunya negara yang berkembang di tengah pandemi. Ada pun sebagian besar pertumbuhan ekspor tahun lalu berasal dari lonjakan permintaan masker dan peralatan pelindung diri (APD) lainnya.

Menurut Larry Hu, kepala ekonom Tiongkok di Macquarie, kebangkitan dini Tiongkok dari pandemi dan stimulus di luar negeri telah meningkatkan pembelian produk yang dilakukan oleh pabrik Tiongkok.

“Kedua faktor ini (akan) memudar di sisa tahun ini karena negara-negara lain mulai dibuka kembali dan konsumen dapat berbelanja jasa lebih banyak. Oleh karena itu, saya tidak berpikir kecepatan saat ini bisa bertahan,” katanya dalam surat elektronik (email), Selasa, yang dikutip *CNBC*.

Data Wind Information menunjukkan peningkatan ekspor sebesar 30,6% pada Maret, yang berasal dari basis rendah. Ekspor Tiongkok dilaporkan turun 13,6% pada Kuartal I tahun lalu di tengah kontraksi PDB sebesar 6,8%.

Sementara itu, para analis Nomura memperkirakan pertumbuhan ekspor turun menjadi 10% hingga 15% di bulan April, dengan perlambatan yang lebih signifikan di paruh kedua tahun ini.

E-commerce Internasional

Sebagai isyarat lain terkait batas kemampuan perdagangan untuk berkontribusi pada pertumbuhan nasional, *e-commerce* lintas batas antara Tiongkok dan negara lain menunjukkan kinerja lemah pada Kuartal I.

Tren baru yang digerakkan oleh internet hanya menyumbang 419,5 miliar yuan (US\$ 64,5 miliar) untuk diperdagangkan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Tren itu menunjukkan kontribusi di bawah 5%

dari perdagangan Tiongkok selama waktu itu. Catatan ini sedikit berubah dari rasio hampir 5,3% untuk semua tahun lalu.

Sementara angka Kuartal I menandai pertumbuhan 46,5% dari basis yang lemah tahun lalu, nilai perdagangan *e-commerce* lintas batas dalam tiga bulan pertama tahun ini berada di bawah rata-rata kuartalan tahun lalu yakni sebesar 422,5 miliar yuan.

“Proporsi *e-commerce* lintas batas tetap rendah. Ini menunjukkan batasan yang dimilikinya dalam berkontribusi pada impor dan ekspor dan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Bruce Pang, kepala penelitian makro dan strategi di China Renaissance, berdasarkan terjemahan *CNBC* dari pernyataan berbahasa Mandarin.

Pang memperkirakan otoritas Tiongkok bakal fokus pada perluasan permintaan domestik dan pasar lokal, sebagai cara untuk melakukan lindung nilai terhadap potensi fluktuasi perdagangan luar negeri.

Di sisi lain, catatan impor naik 38,1% lebih besar dari perkiraan pada Maret. Pemerintah Tiongkok dijadwalkan merilis angka PDB Kuartal I pada 16 April. Data untuk Januari dan Februari biasanya dipengaruhi oleh Festival Musim Semi, sebuah hari libur terbesar di negara tersebut. (**sumber lain**)

Jerman Setujui Jam Malam dan Pengetatan Pembatasan

BERLIN – Pemerintah Jerman telah menyetujui perubahan kontrol-pada undang-undang (UU) pengendalian infeksi nasional. UU ini bertujuan memberikan kekuatan lebih banyak pada pihak berwenang guna menerapkan tindakan-tindakan yang lebih tegas, seperti jam malam untuk menghentikan penularan pandemi virus corona Covid-19 yang merebak.

Penyesuaian UU, yang masih memerlukan persetujuan parlemen, itu akan memungkinkan pemerintahan Kanselir Angela Merkel memberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 hingga 05.00 waktu setempat, serta menutup sekolah-sekolah dan tempat-tempat bisnis di daerah yang mencatatkan kasus infeksi tinggi.

Kegiatan berkerumun pribadi dan olahraga juga akan tunduk pada aturan pembatasan yang lebih ketat. Mengingat Jerman masih dicengkeram gelombang ketiga pandemi berbahaya dan meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan negara itu.

“Perjuangan kami melawan pandemi harus lebih ketat dan lebih menentu,” ujar Merkel pada Selasa (13/4), yang dikutip *AFP*.

Langkah itu juga ditujukan mengakhiri tarik-menarik politik antara pemerintah federal dan daerah-daerah kuat atas tindakan tanggap virus corona. Manuver-manuver menjelang pe-

**Angela Merkel**

milihan umum September mendatang ini diklaim memperparah ketegangan yang ada.

Saat ini, langkah-langkah terkait virus corona diputuskan melalui konsultasi dengan Berlin dan – secara teori – diterapkan oleh negara-negara bagian. Namun dalam banyak kasus, para pemimpin daerah gagal menerapkan langkah-langkah penutupan yang telah disepakati dengan Merkel. Bahkan, beberapa di antara pemimpin daerah sudah memperbolehkan toko-toko dan bioskop dibuka kembali.

Pertikaian Sengit

Pertemuan rutin menetapkan kebijakan untuk perang Jerman melawan pandemi virus corona kerap ditandai oleh perselisihan sengit, dan keputusan yang tidak jelas dalam beberapa pekan terakhir. Terutama, ada beberapa negara yang belum menindaklanjuti kesepakatan untuk menarik kembali tindakan pelonggaran di daerah, di mana tingkat insiden selama tujuh hari melebihi 100 kasus per 100.000 orang. Hanya satu dari 16 negara bagian Jerman yang melaporkan tingkat insiden di bawah 100 pada Selasa.

Penyesuaian UU yang disepakati oleh kabinet pada Selasa, akan memberikan Jerman kekuatan untuk menegakkan “rem darurat”, yang menurut Merkel sudah “terlambat mengingat tingkat keseriusan pandemi.

Menurut UU, di daerah yang terkena dampak paling parah, jam malam akan diberlakukan antara pukul 21.00 dan jam 5 pagi. Namun, ada pengecualian untuk keadaan darurat medis dan masyarakat yang harus meninggalkan rumah karena alasan profesional.

Pertokoan dan tempat-tempat budaya yang tidak penting masih harus ditutup. Sementara itu pertemuan pribadi hanya diperbolehkan antara satu rumah tangga dan satu orang lainnya. Isi UU tersebut juga memaksa

sekolah-sekolah – yang umumnya berada dalam kewenangan negara bagian – kembali ke pembelajaran virtual, jika tingkat insiden tujuh hari melebihi 200 kasus per 100.000 orang.

Keraguan Daerah

Kabinet menyetujui aturan baru yang mewajibkan para pemberi kerja untuk memberikan ujian gigitan bagi orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah. Namun, perubahan itu ditanggapi dengan skeptisisme dari para pemimpin daerah.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Lower Saxony Boris Pistorius mengatakan kepada surat kabar *Die Welt* pada Senin (12/4), bahwa itu sebuah kesalahan besar untuk merebut kekuasaan dari daerah di tengah krisis. Undang-undang yang disesuaikan masih harus meraih mayoritas dua pertiga suara agar dapat cepat disahkan melalui parlemen pada pekan ini. Tetapi perkiraan, pengesahan UU bakal didukung oleh koalisi kanan-kiri Merkel dan oposisi Partai Hijau.

Sementara itu, Partai Kiri dan FDP liberal telah berjanji menentang undang-undang tersebut. “Anda tidak dapat menutup semua orang di dalam untuk menghentikan orang bertemu satu sama lain,” kata pemimpin FDP Christian Lindner kepada lembaga penyiaran *ARD*. (**afp/pya**)

Pasar Kripto Tembus US\$ 2,0 Triliun

LONDON – Pasar mata uang digital cryptocurrency tumbuh sangat pesat pada 2021 dan sekarang kapitalisasinya sudah tembus US\$ 2,0 triliun. Karena pasar yang baru muncul 12 tahun terakhir ini semakin menarik perhatian dari nama-nama besar di Wall Street.

Bitcoin selaku mata uang kripto paling terkenal mencapai rekor tertinggi di atas US\$ 62.000 pada Selasa (13/4). Sementara pasar *cryptocurrency* Coinbase bersiap untuk diluncurkan di Wall Street. Harga bitcoin mencapai US\$ 62.377 atau naik 114% sejak awal tahun. Setelah mengalami penurunan pada 2018, nilai bitcoin kembali pulih dan telah mencetak rekor sejak akhir tahun lalu.

Nilainya meroket dari sekitar US\$ 12.000 pada Oktober menjadi lebih dari US\$ 60.000 sebulan yang lalu. Kedatangan bursa kripto Coinbase di Nasdaq pada Rabu (14/4) adalah salah satu yang peristiwa yang paling diantisipasi di Wall Street tahun ini. Antusiasme untuk memecahkan rekor bitcoin sedang berkembang pesat, meskipun ada pertanyaan tentang keberlanjutan pasar tersebut.

Coinbase akan terdaftar di bawah simbol COIN, dengan perusahaan tergolong kelas berat. Perkiraan nilai Coinbase bervariasi tergantung pada cara penghitungannya, tetapi kapitalisasinya diperkirakan berkisar dari US\$ 70-100 miliar.

Itu akan menjadikannya penawaran umum perdana terbesar untuk perusahaan Amerika Serikat (AS) sejak listing Facebook pada 2012.

Didirikan pada 2012, platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual sekitar 50 *cr-*

ryptocurrency. Pasar *cryptocurrency* telah tumbuh secara eksponensial pada 2021 dan sekarang bernilai US\$ 2,0 triliun, semakin menarik minat dari nama-nama besar di Wall Street.

Coinbase memilih pendaftaran langsung, yang tidak memungkinkan penggunaannya mengumpulkan dana baru tetapi menawarkan pemegang saham, antara lain pendiri, karyawan dan investor lama, kesempatan untuk menjual saham mereka di pasar.

Spotify, Slack, Palantir, dan Roblox juga telah menggunakan metode ini untuk debut Wall Street.

Hampir 115 juta saham Coinbase akan ditempatkan di pasar. Harga referensi mereka diumumkan Selasa (13/4).

Sementara siapa pun dapat menambang bitcoin baru. Untuk melakukannya membutuhkan pusat data raksasa, yang telah mengarah ke platform seperti Coinbase menyediakan cara perdagangan mata uang kripto.

Bank dan layanan pembayaran seperti Paypal mengizinkan transaksi dalam mata uang digital tertentu. Terlepas dari volatilitas dan keterbatasan bitcoin yang baru berusia 12 tahun sebagai alat pembayaran, bitcoin dipandang sebagai penyimpan nilai untuk menyaingi dan mungkin suatu hari melampaui emas sebagai investasi surga (*haven investment*), misalnya dalam menghadapi inflasi yang tinggi.

Raksasa mobil listrik Tesla telah menginvestasikan US\$ 1,5 miliar dalam bitcoin dan pada Maret mulai menerima mata uang tersebut sebagai pembayaran. (**afp/eld**)

Biden Dorong Investasi di Semikonduktor

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan pertemuan secara virtual dengan para CEO terkemuka untuk membahas isu kekurangan semikonduktor dengan meningkatkan investasi. Pertemuan ini juga dimanfaatkan oleh Biden membangun dukungan untuk paket rancangan undang-undang (RUU) belanja infrastrukturnya.

Dalam sambutan singkat yang ditujukan kepada sekelompok pemimpin perusahaan otomotif-General Motors, Alphabet/Google, dan perusahaan semikonduktor Intel; Biden menuturkannya bahwa AS harus membangun infrastrukturnya sendiri untuk mencegah krisis pasokan di masa depan.

“Kita memimpin dunia di pertengahan abad ke-20. Kita memimpin dunia menjelang akhir abad ini, kita akan memimpin dunia lagi. Saya sudah mengatakan untuk beberapa waktu sekarang, Tiongkok dan seluruh dunia tidak menunggu. Dan tidak ada alasan mengapa masyarakat Amerika harus menunggu. Kita berinvestasi secara agresif di bidang-bidang, seperti semikonduktor dan baterai, itulah yang mereka lakukan dan lainnya, begitu juga kita,” ujarnya pada Senin (12/4) yang dikutip *AFP*.

Menurut Gedung Putih, dalam pertemuan itu, para peserta telah membahas pentingnya mendorong kapasitas manufaktur semikonduktor tambahan di Amerika Serikat untuk memastikan negara tidak pernah lagi menghadapi kekurangan.

Latar belakang penyelenggaraan pertemuan yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Gina Raimondo itu menyusul beredarnya kabar kekurangan semikonduktor yang mendatangkan malapetaka pada rantai pasokan di beberapa sektor.

Bahkan krisis tersebut sudah sangat mengganggu manufaktur mobil AS, dan membuat General Motors, Ford dan produsen mobil lainnya untuk sementara waktu menutup beberapa pabrik atau mengurangi produksi. Kekurangan ini juga telah menimbulkan kekha-

watiran pada pengadaan elektronik pribadi di seluruh dunia dan berpotensi mendorong harga lebih tinggi untuk gawai-gawai populer, seperti konsol game dan tablet komputer.

Secara keseluruhan, ada 19 bos perusahaan terdaftar yang hadir, termasuk Mark Liu, ceo Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company /TSMC) – sebagai salah satu poros dalam pasokan dunia untuk pengadaan komponen elektronik vital.

Tidak Banyak Solusi

Sebagai informasi, acara itu digelar pasca keluarnya perintah eksekutif Biden pada 24 Februari tentang seruan peninjauan 100 hari di seluruh lembaga federal, terkait semikonduktor dan tiga hal utama lainnya yakni farmasi, mineral-mineral penting, dan baterai-baterai berkapasitas besar.

Sementara itu, para pembuat kebijakan fokus pada pembangunan kapasitas semikonduktor tambahan di Amerika Serikat. Namun para ahli menyebut ada solusi terbatas dalam waktu dekat.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menggambarkan, pertemuan Presiden AS dengan para CEO itu lebih sebagai sesi mendengarkan, dan tidak ada keputusan atau pengumuman yang dikeluarkan.

Biden juga menyinggung kekurangan semikonduktor saat dia berusaha membangun kasus untuk paket infrastruktur senilai US\$ 2 triliun.

Pekan lalu, Gedung Putih memberitahukan tentang persetujuan rencana infrastruktur senilai US\$ 50 miliar untuk kantor Departemen Perdagangan baru guna membantu produksi barang-barang penting. Serta mendukung undang-undang kongres untuk menginvestasikan US\$ 50 miliar lagi dalam pembuatan dan penelitian semikonduktor.

Di hadapan para CEO, Biden berkata: “Siapa yang bekerja dengan Anda semua, dengan Kongres, kedua belah pihak untuk mengesahkan rencana Lapangan Pekerjaan Amerika, dan melakukan investasi sekali untuk satu generasi di masa depan Amerika.” (**afp/sumber lain/pya**)

**Pengangan Manis Tradisional**

Para pekerja menjemur vermicelli di sebuah pabrik di Allahabad, India, Selasa (13/4). Bahan ini biasa digunakan untuk membuat pengangan manis tradisional dan sudah menjadi tradisi selalu dikonsumsi pada bulan suci Ramadan.

BeritaSatu Photo/Ruht Semiono



Polri Luncurkan Aplikasi Propam Presisi

Kapri Lenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Syofyan Djallil hadir pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Propam Polri 2021 dan peluncuran aplikasi Propam Presisi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Propam Presisi merupakan tindak lanjut dari aplikasi Dumas Presisi yang melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota polisi. Propam Presisi juga merupakan bentuk transparansi Polri, dengan memanfaatkan teknologi informasi dari sisi pengawasan baik internal maupun eksternal semua bisa memanfaatkan aplikasi Propam Presisi.

Transformasi Digital Menjadi Sarana Pemulihan Bisnis UKM

JAKARTA – Laporan Facebook menyebutkan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) percaya bahwa transformasi dan alat digital bisa menjadi sarana yang penting dalam beradaptasi dan pemulihan bisnis di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang belum berlalu.



Pieter Lydian

Lebih dari separuh (55%) pelaku UKM secara global, termasuk di Indonesia, melaporkan telah menjalani transformasi digital dan menggunakan alat digital untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Alat digital digunakan untuk mempromosikan produk, atau beriklan, serta menjadi berjualan barang dan jasa. "Di Indonesia, kami melihat secara harapan seiring dengan pandemi yang memasuki fase baru dengan ketersediaan vaksin yang semakin meningkat," ungkap *Country Director* Facebook di Indonesia Pieter Lydian, dalam pernyataannya, Selasa (13/4).

Namun, lanjut dia, pelaku UKM juga masih sangat rentan dan saat ini dinilai merupakan masa transisi bisnis di tengah pandemi yang diyakini mulai mereda. Mereka mulai melihat bagaimana kondisi kenormalan baru pascapandemi dan mencari alat seperti apa yang paling baik untuk mendukung pemulihan bisnisnya.

Sementara itu, pebisnis UKM telah menghadapi jalan panjang menuju pemulihan setelah setahun pandemi Covid-19. Survei Facebook

menyebutkan bahwa 84% UKM di Indonesia masih mampu bertahan dan mereka mengaku masih bisa menjalankan bisnisnya. Setelah setelah pandemi, iklim bisnis masih terasa sulit dan menantang bagi para pelaku UKM. Laporan *State of Small Business*, atau Laporan Kondisi UKM 2021 dari Facebook yang menganalisis dampak Covid-19 di 27 negara mengonfirmasi hal tersebut.

Riset Facebook melaporkan bahwa 24% bisnis UKM di 27 negara tutup pada Februari 2021 dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 16% pada bulan Oktober dan 29% bulan Mei 2020.

Sementara itu, di Indonesia masih lebih baik karena 84% UKM tetap mampu menjalankan bisnisnya. Sebanyak 38% di antaranya juga percaya diri mampu melanjutkan operasional bisnisnya hingga setidaknya enam bulan ke depan jika keadaan pandemi Covid-19 masih terus berlanjut.

Kondisi masih cukup sulit. Para pelaku UKM tengah menghadapi tantan-

gan angka penjualan yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di Indonesia, 1% pelaku UKM yang beroperasi di Facebook memprediksi ada tantangan terkait arus kas. "Sementara itu, 17% dari mereka memperkirakan masih ada tantangan terkait permintaan, atau penurunan jumlah pelanggan dalam beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

Perekrutan Karyawan
Di banyak negara, lanjut Pieter, UKM diketahui berkontribusi penting pada penyerapan tenaga kerja sebesar 60-70%. Namun, 30% dari para pelaku UKM secara global juga melaporkan telah mengurangi karyawannya sejak pandemi.

Para pelaku UKM di negara-negara di Asia telah mencatat peringkat tertinggi yang melaporkan pengurangan karyawannya sejak pandemi melanda. Banyak pelaku UKM yang merumahkan setengah, atau lebih karyawannya. Namun, masih banyak harapan. Survei Facebook juga menunjukkan bahwa pelaku UKM mulai merekrut kembali tenaga kerja. "Sebanyak 18% pelaku UKM selama tiga bulan terakhir kembali merekrut karyawan yang sebelumnya dirumahkan pada awal masa pandemi," tutur dia.

Tingkat perekrutan kembali juga mencapai dua kali lipat dari rata-rata global di beberapa negara Asia-Pasifik, antara lain di Pakistan (39%), Indonesia (40%), dan India (42%). (Im)

Survei F5: Perusahaan Andalkan Automasi untuk Tekan Biaya

JAKARTA – F5, perusahaan penyedia teknologi *application security* dan *application delivery* berbasis *multi-cloud* global, mengidentifikasi sejumlah tren dalam laporan terbaru yang bertajuk *2021 State of Application Strategy*. Salah satunya, perusahaan mulai mengandalkan automasi untuk menekan biaya operasinya.

Tren itu telah terpengaruh secara signifikan bagaimana sebuah organisasi/perusahaan meningkatkan *digital experience* sebagai respons terhadap realitas konsumen yang berkembang di era pandemi Covid-19. EVP dan *General Manager* *BIG-IP* F5 Kara Sprague mengatakan, saat ini, perusahaan semakin mengandalkan otomatisasi untuk mengurangi biaya operasi, sambil terus memperbarui aplikasi, serta pengalaman digital yang fokus pada kebutuhan konsumen.

"Laporan tahun ini menonjolkan banyak perbedaan prioritas yang dihadapi tim IT. Yang paling umum,

fleksibilitas serta kenyamanan *versus* keamanan, termasuk saat perusahaan mengorganisasi data, yang pada saat bersamaan membutuhkan cara untuk menganalisis data bermanfaat," ungkap Kara, melalui siaran pers, Selasa (13/4).

Karena itu, upaya meningkatkan konektivitas, mengurangi latensi, memastikan keamanan, dan memanfaatkan *data insight* menjadi hal yang sangat penting. Hal ini perlu dilakukan karena tim IT akan kesulitan untuk mengimbangi laju perubahan dan digitalisasi yang super cepat.

"Memang, kehadiran *microservices*, APIs (*application programming interfaces*), dan *containers*, mampu mempercepat proses sebuah aplikasi. Namun, jangkauan dan luasnya aplikasi modern saat ini membuat menjadi lebih kompleks. Karena, tak banyak perusahaan yang bisa menyederhanakan proses penerapannya," imbuhnya. Seiring dengan itu, lapor-

an tahunan ketujuh F5 fokus pada empat tren yang dihadapi tim IT, yakni peningkatan minat terhadap *cloud* dan *as-a-service offerings*, *edge computing*, *application security*, dan *delivery technologies*.

"Di era digital saat ini, setiap perusahaan membutuhkan *digital experience*. Konsumen semakin mengandalkan konektivitas digital di seluruh aspek kehidupan. Hal ini mendorong aplikasi menjadi lebih penting dalam strategi perusahaan dan aktivitas perekonomian," tutur *Country Manager* F5 Indonesia Surung Sinamo. Surung menilai, laporan F5 tahun ini sebagai cerminan dari tren yang berkembang. Tidak heran, banyak sektor bisnis meningkatkan investasi demi kualitas sebuah aplikasi, termasuk untuk memastikan bahwa aplikasi harus dapat beradaptasi dan terukur, termasuk memulihkan sendiri sistemnya dalam berbagai keadaan. (man)

MENKOMINFO BERTEMU DUTA BESAR UNI EROPA

Indonesia dan Uni Eropa Kerja Sama Sektor TIK

Oleh Emanuel Kure

▶ JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa HE Vincent Picket di Jakarta, Selasa (13/4). Keduanya membicarakan kerja sama Indonesia dan Uni Eropa di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama 5G dan manajemen perlindungan data pribadi.

Menkominfo mengatakan, dia dan HE Vincent bertemu untuk membicarakan kerja sama di sektor *information communication and technology* (ICT/TIK). "Kami membicarakan banyak hal terkait kerja sama Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di sektor ICT, terkait dengan 5G dan juga RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," ujar Johnny, dalam konferensi virtual, Selasa (13/4).

Dia menjelaskan, terkait 5G, Indonesia akan mengadopsi teknologi yang netral dan terbuka pada semua *band* seluler. Tujuannya agar memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi operator seluler untuk mengembangkan jaringan (*deploy network*) 5G di Tanah Air.

"Kita juga berdiskusi bahwa Indonesia telah melaksanakan 12 kali *trial* 5G dan sukses. Saat ini, kita mengawali inisiasi *use case* untuk memilih beberapa titik, atau tempat sebagai awal dari *deployment* 5G," ungkap Johnny.

Menkominfo menyatakan, dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas infrastruktur 5G dan kolaborasi pengembangan yang memungkinkan adanya konten lokal (Tingkat Komponen Dalam

Negeri/TKDN).

"5G, kemudian data untuk memastikan perlindungan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Lalu, bagaimana untuk kebermanfaatannya bersama dengan mitra-mitra kerja, termasuk dalam hal ini tentu mitra kerja dari Uni Eropa," tandasnya.

Menkominfo menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi perhatian Indonesia dalam tata kelola digital di Tanah Air, yaitu 5G, manajemen data, dan perlindungan data pribadi.

Menkominfo melanjutkan, pertemuan keduanya juga berdiskusi terkait dengan manajemen perlindungan data. RUU PDP Indonesia saat ini sedang berproses di DPR acuan (*benchmark*) European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) yang menjadi payung hukum perlindungan data pribadi di Uni Eropa.

"Tentu, ada kesamaan dan disesuaikan dengan kekhasan Indonesia. Tetapi, ada juga perbedaan di sana," imbuhnya.

Johnny menuturkan, Indonesia membutuhkan regulasi yang seimbang, atau ekuivalen yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan sistem pemerintahan masing-masing. Karena itu, RUU PDP



Johnny G Plate



HE Vincent Picket

berbasis *benchmark* EU GDPR yang disesuaikan dengan kondisi di Tanah Air.

"Maka tentu, ada hal-hal yang ada di UU Uni Eropa itu tetapi tidak persis sama dengan kita, sehingga itu yang perlu kita sesuaikan. Di Indonesia, hanya ada satu negara, sedangkan di Uni Eropa ada beberapa negara," tutur dia.

Dalam pertemuan itu, Menkominfo juga menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana itu sudah terjadi, akan mendorong investasi lebih sehat dan membuka peluang bagi perkembangan investasi di Indonesia," ungkapnya.

Kerja Sama Dinamis

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia HE Vincent Picket menuturkan, kerja sama bidang TIK merupakan medan yang sangat dinamis di Eropa maupun Indonesia. Kerja sama itu sangat penting karena ke depan Indonesia berupaya membangun dan mewujudkan visi menjadi negara digital pada 2030, atau 2045.

"Uni Eropa dan Indonesia dalam perjalanan menuju Perjanjian Per-

dagangan Bebas akan mendorong pertumbuhan dan pekerjaan di negara ini, terutama di bidang layanan dan itu termasuk sektor TIK, dan untuk itu, kami sangat bersemangat untuk membangun kesetaraan antara Indonesia dan Uni Eropa," ujarnya.

Mengenai cara Uni Eropa mengelola sektor TIK, Vincent menuturkan dimulai dengan mengedepankan kesetaraan dengan menyederhanakan proses bisnis, dokumen, dan fasilitas yang memungkinkan perusahaan Eropa dengan mudah mentransfer sektor layanan data ke negara Indonesia.

Menurut dia, Uni Eropa saat ini sedang mengerjakan kebijakan yang sangat penting yang disebut dengan GDPR, atau UU Digital Eropa, yang melibatkan penelitian, pengembangan teknologi, stimulasi perusahaan terutama 5G, dan menantikan jaringan berikut setelahnya.

"Jadi, untuk alasan ini, kami ingin membangun tautan strategis dengan Indonesia, pemerintah dengan pemerintah, juga bisnis ke bisnis, dan demi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor TIK dengan persaingan antara semua pemain dan dengan peluang untuk investasi di Indonesia," paparnya.

PT SREEYA SEWU INDONESIA Tbk (dahulu PT SIERAD PRODUCE Tbk) DAN ENTITAS ANAK

Jl. Raya Parung Km. 19, Desa Jabon Mekar, Kec. Parung, Bogor, Jawa Barat
Telp. (0251) 611862, Fax. (0251) 611079

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
31 DESEMBER 2020 DAN 2019					
(Dalam Jutaan Rupiah)					
ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan bank	228.603	310.039	Utang bank jangka pendek	547.094	586.237
Piutang usaha			Utang usaha		
Pihak ketiga	533.928	475.958	Pihak ketiga	643.960	381.022
Pihak berelasi	-	1.180	Pihak berelasi	4.894	406
Persediaan	558.288	395.306	Beban akrual	110.826	118.753
Aset biologis	178.602	153.681	Utang pajak	19.263	13.136
Beban dibayar dimuka	4.508	5.118	Utang dividen	291	291
Pajak dibayar dimuka	-	5.091	Liabilitas lancar lainnya	6.813	37.586
Aset lancar lain-lain	100.284	135.303	Utang murabahah	109.340	104.651
Jumlah Aset Lancar	1.604.213	1.481.676	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
			Utang bank	29.743	1.017
			Utang sewa pembiayaan	2.284	8.114
			Liabilitas sewa	8.971	-
			Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.483.479	1.251.213
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
			Liabilitas imbalan kerja	158.310	135.185
			Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
			Utang bank	-	166.294
			Utang sewa pembiayaan	1.490	1.888
			Liabilitas sewa	18.896	-
			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	178.696	303.367
			JUMLAH LIABILITAS	1.662.175	1.554.580
ASET TIDAK LANCAR			EKUITAS		
Investasi jangka panjang lainnya - bersih	-	-	Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Aset pajak tangguhan	93.400	82.917	Modal saham		
Aset tetap	819.420	856.230	Modal dasar : 7.310.000 saham seri A nominal Rp 3.950 (nilai penuh) per saham, 65.068.700 saham seri B nominal Rp 3.950 (nilai penuh) per saham dan 3.556.197.300 saham seri C nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham		
Aset hak-guna	30.126	-	Ditempatkan dan disetor penuh 7.310.000 saham seri A		
Taksiran tagihan restitusi pajak	12.356	12.760	65.068.700 saham seri B dan 1.266.723.879 saham seri C	1.552.620	1.552.620
Goodwill	10.890	10.890	Tambahan modal disetor - bersih	1	1
Aset takberwujud	9.231	10.814	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(190.530)	(190.530)
Uang jaminan yang dapat diterima kembali	1.346	1.397	Komponen ekuitas lainnya	13.498	14.593
Aset tidak lancar lain-lain	11.868	14.109	Saldo laba		
Jumlah Aset Tidak Lancar	988.637	989.117	Telah ditentukan penggunaannya	8.985	7.385
			Belum ditentukan penggunaannya	(453.899)	(467.856)
			Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	930.675	916.213
			Keperluan non-pengendali	0	0
			JUMLAH EKUITAS	930.675	916.213
JUMLAH ASET	2.592.850	2.470.793	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.592.850	2.470.793

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Laba Per Saham Dasar)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENJUALAN BERSIH	4.341.295	4.049.392
BEBAN POKOK PENJUALAN	3.805.701	3.459.707
LABA BRUTO	535.594	589.685
BEBAN USAHA		
Beban penjualan	191.242	185.913
Beban umum dan administrasi	198.951	196.233
Jumlah Beban Usaha	390.193	382.146
LABA USAHA	145.401	207.539
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan keuangan	4.112	1.696
Beban keuangan:		
Beban bunga sewa	(629)	(1.334)
Beban bunga liabilitas sewa	(1.654)	-
Beban bunga pinjaman bank	(71.892)	(89.773)
Lain-lain - bersih	(28.532)	(8.087)
Beban Lain-lain - Bersih	(98.595)	(97.498)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	46.806	110.041
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kiri	(23.148)	(20.762)
Tanggungan	4.608	(9.503)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(18.540)	(30.265)
LABA TAHUN BERJALAN	28.266	79.776
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN PADA LABA RUGI		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	(2.734)	(5.401)
Pajak penghasilan terkait	1.639	1.350
Rugi komprehensif lain - bersih	(1.095)	(4.051)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	27.171	75.725
Lab a tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	28.266	79.776
Keperluan non-pengendali	-	-
Lab a komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	27.171	75.725
Keperluan non-pengendali	-	-
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	21,11	59,58

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	4.303.109	3.959.699
Pembayaran kas kepada pemasok	(3.332.602)	(2.903.007)
Pembayaran kas kepada pihak ketiga lainnya	(466.964)	(456.405)
Pembayaran kas kepada karyawan	(299.639)	(291.496)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(13.976)	-
Penerimaan bunga	4.112	1.696
Pembayaran bunga	(67.745)	(87.007)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	126.295	223.477
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(75.054)	(75.631)
Penjualan aset tetap	33.233	9.416
Divestasi entitas anak/asosiasi	23.610	12.937
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(18.211)	(53.278)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(8.738)	(9.763)
Pembayaran liabilitas sewa	(7.280)	-
Pembayaran utang bank	(10.226.870)	(8.172.610)
Penerimaan pinjaman bank	10.053.368	8.135.367
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(189.520)	(47.006)
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(81.436)	123.194
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	310.039	186.845
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	228.603	310.039
INFORMASI TAMBAHAN		
Kas dan Bank pada akhir tahun terdiri dari:		
Kas	963	388
Bank	227.640	309.651
Jumlah	228.603	310.039

Catatan :
1. Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sulanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 22 Maret 2021. Informasi keuangan diatas bukan merupakan penyajian yang lengkap dari suatu laporan keuangan.
2. Laba per Saham Dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata terimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan.

Jakarta, 14 April 2021

PT SREEYA SEWU INDONESIA Tbk
S.E. & O
Direksi

TAJUK

Jalankan SWF

Gegap gempita pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang dilahirkan UU Cipta Kerja semula memompakan optimisme adanya solusi atas pendanaan infrastruktur, yang sudah lama bermasalah. Apalagi, *sovereign wealth fund* (SWF) sebagai implementasi penting *omnibus law* pertama di Tanah Air ini langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Namun, nama besar yang disematkan ternyata tidak cukup untuk mewujudkan penyelesaian masalah pendanaan pembangunan, terutama infrastruktur yang sangat urgen. Pendanaan yang tersedia jauh dari memadai untuk pembangunan prasarana yang dibutuhkan guna reformasi struktural menuju negara maju.

Padahal, kita membutuhkan lebih banyak pembangunan jalan-jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, jaringan kereta api cepat, bandara, pembangkit listrik, hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk mendukung tumbuhnya industri manufaktur dan sektor jasa bernilai tambah tinggi. Tanpa jalan, pelabuhan, dan sistem logistik yang efisien dan murah, investor bermodal besar tentu enggan masuk dan industrialisasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak terjadi.

Untuk LPI bisa memancing pengalangan dana dari luar guna mencukupi kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur, pemerintah pun membekali modal besar. Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2020 tentang LPI mengamanatkan bahwa badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia ini mendapatkan modal Rp 75 triliun. Yang pertama dengan penyetoran modal awal berupa dana tunai paling sedikit Rp 15 triliun, dan selanjutnya dilakukan secara bertahap sampai tahun 2021.

PP menjelaskan, lembaga ini didirikan secara khusus untuk menarik masuk investor asing, karena tidak memadainya kapasitas pendanaan domestik untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, guna menunjang pertumbuhan ekonomi tinggi. Fiskal pemerintah kita terbatas, demikian pula pendanaan BUMN maupun dari lembaga sektor keuangan.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera *all out* bekerja agar SWF kita bisa berjalan. Artinya, pertama-tama pemerintah harus segera membeli proyek-proyek infrastruktur yang sudah jadi, untuk diracik kembali, dikemas, dan ditambah insentif menarik agar asing mau menanamkan investasinya di sini.

Sepanjang proyek-proyek yang memiliki kekuatan hukum kuat dan mendapat jaminan pemerintah ini bisa menghasilkan keuntungan besar, tentu investor asing mau masuk. Bila bitcoin saja yang tidak memiliki perlindungan hukum maupun *underlying* laku keras di seluruh dunia, apalagi proyek pemerintah Indonesia yang punya prospek cerah, tentu akan laku bila manajemen LPI yang langsung di bawah presiden bisa bekerja.

Lalu, insentif apa yang menarik? Setidaknya, Indonesia tidak boleh kalah dengan India yang juga tengah gencar mempromosikan SWF-nya. Menteri Keuangan India sudah menyatakan akan memberikan pembebasan pajak

100% atas bunga, dividen, dan *capital gain* yang diperoleh dari penghasilan yang berasal dari investasi SWF India di sektor infrastruktur dan sektor-sektor lainnya. *Tax holiday* tersebut dapat dinikmati apabila investor menginvestasikan dananya di India minimal selama tiga tahun. Kebijakan *tax exemption* ini bertujuan untuk menarik investasi jangka panjang di sektor infrastruktur berskala besar di negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia itu.

Dengan insentif pajak yang menarik, investor dipastikan mau memilih investasi di LPI, yang memberikan *return* tinggi setelah pajak dan ada jaminan pemerintah yang kuat. Investor asing ini bisa memilih menanamkan modal di SWF RI dalam bentuk pinjaman yang sudah ada kepastian pembayaran bunganya, bila mereka masih ragu untuk membeli saham.

Dengan proyek infrastruktur yang sudah rampung langsung dibeli LPI, maka BUMN-BUMN karya juga bisa diselamatkan, mengingat kini sudah terseok-seok menanggung beban utang luar biasa besar yang sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Apalagi untuk BUMN yang sudah *go public*, yang sebagian sahamnya sudah dibeli masyarakat, tidak pantas dibicarakan terlintas utang besar karena ditugasi mendanai pembangunan proyek pemerintah.

Sesuai *core business*, perusahaan konstruksi ini semestinya langsung dibayar pemerintah begitu proyek selesai, lewat tangan LPI yang membeli proyeknya. Dengan demikian, tidak terulang lagi emiten BUMN karya merugi karena menanggung beban bunga luar biasa tinggi, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang harus menyediakan infrastruktur di seluruh negeri.

Lihat saja laporan keuangan BUMN konstruksi yang terpuruk karena penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan-jalan tol misalnya, yang dananya harus diusahakan sendiri. Sebut saja PT Waskita Karya Tbk (WSKT), emiten ini menderita rugi bersih Rp 7,38 triliun sepanjang tahun lalu. Pasalnya, total utang yang ditanggung Waskita Karya terus naik menembus Rp 89,01 triliun.

Utang perusahaan konstruksi pelat merah itu terdiri atas utang jangka pendek Rp 48,2 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 40,8 triliun. Alhasil, Waskita Karya harus mengeluarkan biaya Rp 4,74 triliun untuk membayar bunga saja. Beban bunga itu naik 31% dibandingkan tahun sebelumnya, akibat bertambahnya jumlah proyek ruas tol yang harus dibangun berdasarkan penugasan pemerintah.

Artinya, sejatinya sudah sewajarnya jika jalan-jalan tol yang selesai dibangun itu langsung dibeli pemerintah, baik ada SWF maupun tidak. Ke depan, pendanaannya juga harus disediakan oleh pemerintah atau SWF, sehingga BUMN karya pun menjadi sehat kembali dan bisa membangun lagi infrastruktur yang lain. Roda ekonomi daerah yang sangat terganggu proyek-proyek ini juga bisa kembali bergerak, banyak rakyat bisa dipekerjakan, dan yang terpenting kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah meningkat. □

Mengembalikan Industrialisasi Sektor Pertanian pada Mandat Konstitusi Ekonomi

Polemik impor beras yang akan dilakukan melalui kebijakan Kementerian Perdagangan bakal terus terjadi dan berulang-ulang menjadi wacana publik, jika tidak ada kebijakan mendasar dalam menata kelola sektor pertanian secara menyeluruh.

Oleh Defiyan Cori *)

Kebijakan itu tidak saja menyangkut soal kehidupan ekonomi, jumlah petani, daya beli, produksi dan produktivitas pertanian, namun juga soal luas lahan dan penguasaannya.

Dalam periode tahun 1993-2003 atau selama 10 tahun, jumlah petani gurem semakin bertambah, yaitu dari awalnya 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang dengan jumlah lahan pertanian telah berkurang banyak.

Sementara itu, nilai impor komoditas pertanian selama 10 tahun terakhir tersebut, justru terus meningkat dan menunjukkan fakta bahwa produktivitas pertanian nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi atau sisi permintaan (lokal dan produknya) atas produksi pertanian yang dihasilkan (*supply*). Maka, untuk mengatasi selisih kekurangan produksi atas konsumsi komoditas pertanian ini diatasi melalui kebijakan impor.

Data dan fakta juga menunjukkan bahwa impor pangan Indonesia tahun 2013 telah mencapai US\$ 14,9 miliar atau senilai Rp 183,27 triliun (kurs 1 dolar AS = Rp 12.300) atau naik empat kali lipat dari nilai ekspor tahun 2003 yang senilai US\$ 3,34 miliar atau setara Rp 41,09 triliun. Sedangkan dalam soal luas lahan pertanian yang menjadi dasar hitungan produksi sektor pertanian terus mengalami penyusutan sejak tahun 1998 sampai 2003. Pada tahun 2003 luas lahan pertanian yang digunakan adalah 31,2 juta hektare, kemudian telah menyusut menjadi 26 juta hektare, yaitu berkurang sejumlah 5 juta hektare pada tahun 2013 atau selama 10 tahun.

Impor dan Luas Lahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2020 telah menyampaikan hasil verifikasi luas lahan baku sawah. Berdasarkan hasil perhitungan ulang pada tahun 2019 lalu, pemerintah mencatat hanya tinggal 7.463.948 hektare saja luas lahan baku sawah. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi tahun 2020 hanya mencapai 10,66 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan dengan tahun 2019 yang seluas 10,68 juta hektare. Penyusutan luas lahan pertanian secara terus menerus ini jelas tidak menguntungkan posisi pembangunan industri pertanian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Harus ada perubahan kebijakan mendasar atas strategi dan skala prioritas program pembangunan, di tengah ketidakpastian iklim perekonomian dunia, cuaca yang anomali dengan potensi bencana terus terjadi, serta defisit anggaran yang kian lebar.

Produktivitas lahan pertanian pada tahun 2020 memang menghasilkan sejumlah 54,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami kenaikan sejumlah 45,17 ribu ton atau 0,08% dibandingkan tahun 2019 yang sejumlah 54,60 ton GKG. Jika dikonsolidasikan menjadi komoditas beras untuk bahan konsumsi pangan, maka pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 31,33 juta ton atau naik sejumlah 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan tahun 2019 sejumlah 31,31 juta ton. Tapi, peningkatan ini tidak mampu mengatasi ketergan-



■ Defiyan Cori

tungan atas impor bahan pangan yang disebabkan oleh penyusutan luas lahan.

Penyusutan lahan pertanian sejatinya telah terjadi sejak 10 tahun lebih. Mengacu pada data BPS pada tahun 2010, menunjukkan fakta saat itu lahan pertanian Indonesia diperkirakan hanya seluas 9.295.385 ha, dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa. Setelah 10 tahun atau tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia berdasar data BPS yang diolah oleh media riset Datacore mencapai 276.647.735 jiwa (pengurangan akibat kasus meninggal dunia oleh Covid-19). Artinya, produksi beras dibutuhkan lebih banyak dibandingkan apa yang dihasilkan saat ini apabila

hendak mengurangi ketergantungan atas impor. Pemerintah harus secara serius

“ Untuk mengatasi permasalahan impor pangan dan penyusutan luas lahan serta migrasi profesi petani, pekebun dan nelayan, maka mendesak dibutuhkan kebijakan pro-sektor pertanian terintegrasi (*integrated agriculture industry*) dengan melakukan penataan sektor hulu sampai dengan hilirnya.

memperhatikan penyusutan luas lahan pertanian ini dengan meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian seiring jumlah konsumsi pangan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Penyusutan luas lahan pertanian terbesar berdasar data BPN terjadi di Pulau Jawa, yaitu telah menjadi hanya 4,1 juta hektare pada tahun 2007. Sementara per tahun 2010, luas lahan pertanian tersebut kembali berkurang menjadi 3,5 juta hektare. Dalam periode tahun 2007-2010, konversi lahan sawah di Pulau Jawa mencapai 600.000 hektare. Data ini memberikan peringatan kepada pemerintah atas risiko kekurangan pemenuhan konsumsi pangan dari lahan yang semakin menyusut pada masyarakat di Pulau Jawa.

Di samping itu, luas panen tanaman padi juga telah mengalami kemerosotan pada periode tahun 2010-2011. Pada tahun 2010 saja, luas panen tanaman pangan padi hanya sejumlah 13,25 juta hektare dan turun lagi menjadi 13,22 juta hektare pada tahun 2011 atau secara persentase lahan padi turun 0,22%. Bagaimana juga perlu kebijakan rencana cadangan (*contingency plan*) yang disiapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi risiko bencana alamiah dan non-alamiah yang kemungkinan terjadi.

Data BPS tahun 2011 menyebutkan bahwa pengurangan luas lahan sawah yang terjadi di Pulau Jawa tidak sama dengan jumlah penambahan lahan di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi, kualitas lahan di luar Pulau Jawa belum sebaik yang terdapat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat penurunan luas lahan (sawah) yang cukup drastis, ditambah oleh pergeseran status petani, penguasaan lahan dan adanya migrasi profesi. Penurunan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan maupun perumahan, di satu sisi. Di sisi lain, kebijakan penambahan luas lahan atau pencetakan lahan baru di luar Jawa, tidak mampu memenuhi produktivitas yang ditetapkan secara nasional dan hanya menghasilkan produksi padi yang berkualitas rendah.

Yang tidak bisa dikompensasi yaitu soal pengurangan lahan dan produktivitas, misalnya satu hektare di Pulau Jawa, tidak bisa langsung dipenuhi oleh penambahan satu hektare lahan di luar Pulau Jawa. Demikian pula halnya lahan pertanian yang terdapat di Pulau Jawa kualitasnya lebih baik (*well irrigated*), dibandingkan dengan lahan di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, maka produktivitasnya belum dapat disejajarkan secara sekaligus atau juga menghasilkan kualitas yang sama baiknya. Perlu waktu selama 10 tahun (mengacu pada data produksi) melalui kebijakan penataan keasamaan

perbaikan rantai pasok dan distribusi hasil-hasil pertanian yang selama ini tidak memberikan manfaat pada para petani, pekebun dan nelayan. Di tingkat rantai pasok atau jaringan distribusi inilah proses dan mekanisme yang berkaitan dengan pembentukan harga jual pasar dibutuhkan perbaikan kelembagaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan impor pangan dan penyusutan luas lahan serta migrasi profesi petani, pekebun dan nelayan, maka mendesak dibutuhkan kebijakan pro-sektor pertanian kompleks atau terintegrasi (*integrated agriculture industry*) dengan melakukan penataan sektor hulu sampai dengan hilirnya. Penataan kelembagaan ekonomi petani, pekebun dan nelayan, terutama pada fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam hal kemampuan membaca/melek keuangan (*financial literacy*) menjadi keniscayaan atau kunci bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pertanian.

Bukan menjadikan kelembagaan ekonomi petani, pekebun dan nelayan seperti korporasi atau perseroan terbatas (PT) yang hanya menjadi milik orang per orang, dan menyajikannya pemilik modal. Yang lebih prioritas adalah mereformulasi peran dan fungsi KUD secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengelolaan rantai pasok dan distribusi pangan (*supply chain and distribution*). Sebab, inilah yang diperintahkan oleh atau merupakan mandat konstitusi ekonomi yang harus diimplementasikan. Yaitu membangun usaha bersama berdasar asas kekeluargaan melalui badan hukum koperasi sebagai perusahaan yang maju dengan penerapan manajemen yang profesional dan sumber daya manusia (SDM) yang andal melalui pelatihan dan pendampingan untuk kemakmuran bersama.

berswasembada beras ini telah membawa Presiden Soeharto kala itu memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pada tahun 1985.

Namun, sejak tahun 1970-an, Indonesia yang memiliki sasaran dan tujuan menjadi negara pemasok pangan dunia dengan potensi keragaman sumberdaya alam atau hayati sangat besar, melupakan kebijakan yang kurang tepat dalam mengimplementasikan mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Tidak hanya kesalahan dalam menempatkan kebijakan impor bahan pangan, tapi juga berkaitan dengan pengurangan kelembagaan ekonomi atau badan usaha di sektor pertanian pada petani, pekebun dan nelayan. Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah pedesaan justru banyak yang salah kelola dan terlintas masalah citra (*image*) publik dengan anonim yang diplesetkan menjadi “Ketua Untung Duluan”.

Diperlukan kebijakan penataan lahan pertanian yang lebih memberikan peluang Indonesia supaya tidak secara terus menerus bergantung pada impor pangan. Tentu saja pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian sangat dibutuhkan dari kalangan Perguruan Tinggi dalam mengatasi permasalahan impor pangan yang terus menjadi polemik ini dengan memberikan penyelesaian (solusi) alternatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih jauh lagi adalah perbaikan rantai pasok dan distribusi hasil-hasil pertanian yang selama ini tidak memberikan manfaat pada para petani, pekebun dan nelayan. Di tingkat rantai pasok atau jaringan distribusi inilah proses dan mekanisme yang berkaitan dengan pembentukan harga jual pasar dibutuhkan perbaikan kelembagaan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan impor pangan dan penyusutan luas lahan serta migrasi profesi petani, pekebun dan nelayan, maka mendesak dibutuhkan kebijakan pro-sektor pertanian kompleks atau terintegrasi (*integrated agriculture industry*) dengan melakukan penataan sektor hulu sampai dengan hilirnya. Penataan kelembagaan ekonomi petani, pekebun dan nelayan, terutama pada fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam hal kemampuan membaca/melek keuangan (*financial literacy*) menjadi keniscayaan atau kunci bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pertanian.

Bukan menjadikan kelembagaan ekonomi petani, pekebun dan nelayan seperti korporasi atau perseroan terbatas (PT) yang hanya menjadi milik orang per orang, dan menyajikannya pemilik modal. Yang lebih prioritas adalah mereformulasi peran dan fungsi KUD secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengelolaan rantai pasok dan distribusi pangan (*supply chain and distribution*). Sebab, inilah yang diperintahkan oleh atau merupakan mandat konstitusi ekonomi yang harus diimplementasikan. Yaitu membangun usaha bersama berdasar asas kekeluargaan melalui badan hukum koperasi sebagai perusahaan yang maju dengan penerapan manajemen yang profesional dan sumber daya manusia (SDM) yang andal melalui pelatihan dan pendampingan untuk kemakmuran bersama.

*) *Ekonom Konstitusi*

Korupsi Bisa Hambat Indonesia Jadi Negara Maju

Oleh Triyan Pangastuti

▶ JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tindak pidana korupsi berpotensi menghambat upaya Indonesia untuk menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan *law enforcement* yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi.

"Tata kelola dan integritas adalah fondasi sangat penting bagi seluruh bangsa, mencegah dan membangun sistem yang anti-korupsi secara komprehensif akan menentukan apakah sebuah bangsa akan bisa meneruskan perjalanan jadi negara pendapatan tinggi, bermartabat dan kesejahteraan yang adil," ujar Sri Mulyani dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 di Jakarta, Selasa (13/4).

Pemerintah menargetkan, Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Pada tahun tersebut, nilai produk domestik bruto (PDB) akan menjadi yang terbesar ke-5 di dunia, dengan pendapatan per kapita lebih dari US\$ 23.000, atau hampir enam kali dari posisi 2020 yang sebesar US\$ 3.912.

Selain itu, Menkeu meminta upaya dalam pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Karena pemangku kepentingan memiliki andil yang penting dalam membangun sebuah integritas

kejujuran serta menciptakan sistem yang bisa mendeteksi sejak dini mengenai adanya indikasi tindakan koruptif.

"Kita awasi dan minimalkan, sinergi dilakukan Kemenkeu dan seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat penting, selain kita akan terus memperkuat dan pendayagunaan aparat pengawas internal (APIP) di masing-masing K/L," tutur dia.

Tiga Fokus

Menurut Menkeu, keberadaan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tiga fokus meliputi perzinahan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting. "Ketiga fokus tersebut begitu penting dan telah dijabarkan dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dan dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga yang memang memiliki tanggung jawab di tiga hal itu," jelas dia.

Upaya pencegahan tindak korupsi di bidang keuangan

negara berkaitan dengan sisi penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan negara dan kekayaan negara. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara harus mengedepankan aspek tata kelola yang baik, akuntabel, transparan dan terus menjaga profesional dengan penuh menjalankan integritas tujuan dari aksi pencegahan korupsi.

"Sisi penerimaan, Kemenkeu terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi cegah korupsi dengan perbaikan regulasi dan kebijakan integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan pengawasan kegiatan importasi," tegas dia.

Kemudian, Kemenkeu juga melakukan reformasi logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dengan tata kelola yang baik untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Sri mengatakan dari sisi belanja, Kemenkeu mencegah korupsi melalui perencanaan anggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan berbasis elektronik. "Setiap K/L dapat melakukan proses perencanaan anggaran dan memanfaatkan aplikasi KRISNA dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (Sakti), sementara Pemda menggunakan aplikasi sistem informasi pemda," tutur dia.

Ia berharap, dengan perencanaan anggaran digital akan menjauhkan risiko adanya tindak pidana korupsi. Sehingga dapat mendorong birokrasi dan stakeholder lebih profesional, transparan, dan tidak korupsi.

"Kami terus mendorong sistem pengadaan barang jasa elektronik melalui *e-payment* dan *e-catalog*, ini semua untuk menumbuhkan transparansi, keadilan, dan juga profesionalitas. Berbagai aksi yang diharapkan untuk mendorong munculnya budaya pencegahan korupsi yang efektif dan efisien itu tang-



Kunjungan Kerja Mendag

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (tengah) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan pedagang sayur saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/4/2021). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Menteri Perdagangan berkesempatan memantau harga kebutuhan pokok pada hari pertama puasa di Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana.

gung jawab kita semua," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini terbukti tidak membuat seseorang yang terjerat kasus korupsi menjadi jera. "Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak membuat orang jadi kapok," kata Luhut.

Selain OTT, Luhut mengatakan, untuk mencegah kasus korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui pencegahan, dengan menutup celah potensi terjadinya tindakan korupsi.

Oleh karena itu, saat ini ia rutin menjalin komunikasi dengan pimpinan KPK untuk mengantisipasi peluang-peluang tersebut.

Ia menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 37 atau turun 3 skor dari 2019 yang sebesar 40. Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, upaya pencegahan sebenarnya sudah mulai dilakukan pemerintah sejak lama. Di era Jokowi, Presiden sudah meminta penyiapan rancangan pa-yung hukum strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) sejak awal Kabinet Kerja dimulai, sekitar tujuh tahun lalu

atau saat ia menjadi kepala staf Kantor Kepresidenan.

Proyek Strategis

Di samping itu, Luhut mengatakan akan melibatkan peran serta KPK dalam mengawasi berbagai proyek strategis nasional, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan konsep *single windows*, lumpung perikanan, hingga belanja tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Upaya ini untuk meningkatkan fungsi pencegahan dan dapat memperkecil peluang korupsi di proyek infrastruktur.

"Banyak sekali megaprojek di negeri yang sedang jalan yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan,

dan saya senang sekali kalau KPK memainkan peran ini ke depan," tutur dia.

Selain peran aktif KPK, Luhut berjanji akan mendorong digitalisasi dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Dengan harapan akan mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi, karena mendorong adanya transparansi dan akuntabel.

"KPK ini super sakti, kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan banyak maka akan menurunkan korupsi. Tapi, jika penindakan-penindakan terus tanpa adanya pencegahan itu tidak akan arif. Jangan kita biarkan orang sampai berbuat salah kalau masih bisa kita ingatkan," pungkask dia.

TINGKATKAN TRANSPARANSI

Kemensos Sampaikan Data Penerima Bansos pada Pertengahan April

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyampaikan data seluruh penerima bantuan sosial (bansos) kepada publik pada pertengahan April 2021. Diharapkan dengan adanya data yang transparan, seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat bisa ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bansos.

"Hal itu yang coba kita upayakan, mudah-mudahan pertengahan bulan ini kami bisa membuka data itu, sehingga data itu bisa transparan, bisa dilihat oleh siapapun warga masyarakat Indonesia," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 di Jakarta, Selasa (13/4).

Sistem transparan ini, kata Risma, dilakukan bukan tanpa alasan. Dirinya ingin masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi penerima bansos. Sebab, jika memang ada warga yang ternyata tidak layak menerima, warga bisa langsung menyampaikan keberatan dan koreksinya.

"Jadi koreksi (data) bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya yang bilang tetangga saya tidak layak terima bantuan tapi di situ ada, yang koreksi masyarakat langsung," kata dia.

Risma mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan pemer-

intah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sinkronisasi data para penerima bansos. Selama ini, pemerintah sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran bansos, namun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan pemaparan data. Untuk penyaluran bansos Maret dan April, Kemensos telah menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pihak pemerintah daerah (pemda) juga bisa memperbarui data bila ada perubahan kondisi di lapangan saat penyaluran bansos.

"Pemda juga bisa *update* karena tidak bisa data itu selamanya sama, karena ada yang pindah rumah, meninggal, dan lain-lain. Harus terus dilakukan *updating* data," kata Risma.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, dengan adanya transparansi data maka masyarakat bisa ikut langsung mengawasi. Sehingga tidak lagi terjadi keresahan mengenai validitas masyarakat yang berhak atau tidak berhak menerima bansos.

"Karena memang ada transparansi, dengan dibukanya data akan ada *feedback* dari masyarakat. Dengan adanya *feedback* bisa ditanggap oleh pemda dan Kemensos, dan bisa langsung diperbaiki," ujarnya.

KPK akan Dampingi

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya terus mendampingi Kemensos dalam penyaluran bansos. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan masyarakat miskin tetapi masih belum masuk dalam DTKS. Oleh karena itu dilakukan penambahan penerima bansos di luar DTKS, namun tetap dengan validasi dan pengawasan yang ketat.

"Kalau tidak divalidasi maka akan ada yang dapat dan ada yang tidak dapat bansos. Padahal dalam kondisi pandemi Covid-19, ada orang miskin, rentan miskin, dan miskin baru. Gara gara pandemi jadi miskin," ucap Firli.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, pemerintah menjalankan sejumlah program dalam kategori perlindungan sosial yaitu Bantuan Produktif untuk UMKM (BPUM), kartu prakerja, hingga bantuan subsidi upah. Menurut Firli sejumlah program tersebut harus dijalankan dengan sejumlah pengawasan agar bisa tepat sasaran sampai ke masyarakat.

"KPK mengawasi dengan cara berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga agar tidak ada peluang untuk menjadi korupsi," pungkask Firli. (ark)

UNTUK INDUSTRI, BISNIS, DAN SOSIAL

Diskon Tagihan Listrik PLN Diperpanjang hingga Juni

JAKARTA – Pemerintah akan memperpanjang masa diskon tagihan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) hingga Juni 2021. Bantuan ini diberikan kepada pelanggan listrik golongan industri, bisnis, dan sosial sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yakni subsidi sebesar 100% pada periode Januari hingga Maret 2021. Kemudian, subsidi listrik berkurang yakni sebesar 50% untuk pemakaian listrik pada April sampai dengan Juni 2021.

"Jangka waktu bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat diperpanjang dan/atau diubah sesuai dengan keputusan sidang kabinet/rapat terbatas dan/atau hasil rapat koordinasi tingkat menteri dan/atau surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ebutkan, bantuan tersebut diberikan untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai tagihan listrik Januari sampai dengan Juni 2021. Besaran bantuan ditetapkan sebesar selisih kurang bayar antara pemakaian riil dengan rekening minimum dan sebesar biaya beban atau abodemen.

Adapun bantuan yang diberikan pemerintah yakni subsidi sebesar 100% pada periode Januari hingga Maret 2021. Kemudian, subsidi listrik berkurang yakni sebesar 50% untuk pemakaian listrik pada April sampai dengan Juni 2021.

"Jangka waktu bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat diperpanjang dan/atau diubah sesuai dengan keputusan sidang kabinet/rapat terbatas dan/atau hasil rapat koordinasi tingkat menteri dan/atau surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 3 Ayat 3 PMK tersebut.

Kemudian, dari sisi kriteria, PMK 40/2021 itu mengacu pada beleid sebelumnya yakni pasal 2 PMK 136/2020 yang mengatur bantuan diberikan kepada pelanggan listrik golongan industri, bisnis, dan sosial dengan dua kriteria.

Pertama, bantuan pembayaran selisih kurang bayar antara pemakaian riil dengan rekening minimum diberikan kepada pelanggan listrik golongan industri, bisnis, dan sosial dengan daya 1.300 VA ke atas.

Kedua, pembebasan biaya beban atau abodemen bagi pelanggan golongan industri dan bisnis dengan daya 900 VA, dan golongan sosial berdaya listrik 220 VA, 450 VA, serta 900 VA.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk stimulus pem-

bebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen sebesar Rp 1,27 triliun selama enam bulan dalam periode Januari hingga Juni 2021.

Ia mengatakan, tujuan perpanjangan bantuan hingga Juni untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilaksanakan pada 2020. "Terutama memberikan perlindungan dan stimulus bagi dunia usaha yang terdampak agar dapat bertahan," ujar dia saat dihubungi *Investor Daily*, Selasa (13/4).

Dengan demikian, Isa berharap program ini dapat membantu dunia usaha agar tetap melanjutkan aktivitas ekonominya dalam menghadapi kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19. "Pemerintah konsisten untuk meringankan beban dan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dengan stimulus ini," pungkask dia. (try)

BKPM Gandeng China ENFI Jalankan Industri Peleburan Tembaga

JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perjanjian kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) mengenai proyek peleburan tembaga yang akan dibangun di Kabupaten Fakkaf, Provinsi Papua Barat.

Kepala BKPM Bahilil Lahadalia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. "Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perzinahan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu selama proposal dari China ENFI yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia," ujar Bahilil dalam siaran pers yang diterima, Selasa (13/4).

Selain itu, Bahilil juga mengatakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung rencana investasi tersebut dan menjamin ketersediaan suplai bahan baku yang akan disediakan oleh PT Freeport Indonesia sebanyak minimal

800.000 ton/ tahun. Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor Indonesia ke dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengemukakan mendukung kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut. Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai penyedia bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Arifin, pengelolaan usaha pertambangan, termasuk pengelolaan mineral ini memiliki ciri modal yang

padat, teknologi tinggi, dan adanya ketidakpastian. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang sangat mendalam, sehingga keekonomiannya dapat terhitung secara baik.

"Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh BKPM dengan ENFI, kami harap dapat memberikan nilai tambah pembangunan fasilitas pemurnian tembaga yang kompetitif di Indonesia, pengelolaan industri berbasis tembaga lebih berkembang, dan mendorong industri lain demi kesejahteraan masyarakat," ucap Arifin.

Presiden China ENFI Liu Cheng menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini. Kedepannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai.

"Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan *preliminary study* agar proyek bisa cepat selesai. Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng.

Bentuk Tim Kecil

Menindaklanjuti nota kesepahaman ini, akan dibentuk tim kecil dari pihak pemerintah Indonesia dan China ENFI. China ENFI akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pembahasan teknis atas kelanjutan proyek.

ENFI merupakan perusahaan milik negara teregister di Beijing, Republik Rakyat Cina, dan merupakan anak perusahaan dari MCC Group dalam usaha penyediaan teknologi smelter, pembangunan industri smelter, khususnya tembaga, nikel, aluminium, dan logam non besi lainnya.

BKPM dan ENFI akan bekerja sama untuk membantu dan mendukung rencana investasi dan pembangunan peleburan tembaga di Indonesia. Kapasitas peleburan tembaga yaitu katoda tembaga 400.000 ton per tahun yang akan dibagi menjadi dua tahap. Dalam proyek ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan lokal Indonesia sebagai mitra strategis yaitu PT Freeport Indonesia dan MIND ID. (ark)



Terima BST

Warga menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di lingkungan Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/4/2021). Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program Bantuan Sosial Tunai (bansos tunai/BST) hanya sampai April 2021. Padahal, masih banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 masih membutuhkan BST.



Garuda Dukung Konservasi Satwa Dilindungi

Petugas kargo memasukkan kontainer berisi empat orangutan yang terdiri atas dua orangutan Sumatera (pongo abelii) dan dua orangutan Kalimantan (pongo pygmaeus), ke dalam bagasi pesawat Garuda Indonesia, di Bandara Yogyakarta, kemarin. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendukung proses konservasi satwa langka dilindungi, dengan menerbangkan empat orangutan dari Yogyakarta menggunakan armada Airbus A330-300 (GA215) menuju Jakarta, yang dilanjutkan menggunakan armada Boeing 737-800 (GA 560) menuju Balikpapan, dengan memastikan seluruh dokumen persyaratan maupun prosedur pengangkutan orangutan yang tergolong *live animal* telah memenuhi regulasi internasional dari International Air Transport Association (IATA) dan peraturan karantina, serta kepabeanan Indonesia, termasuk kesiapan ruangan (*live animal room*) selama transit.

Trafik Tol Jasa Marga Mulai Rebound

Oleh Muawwan Daelami

► JAKARTA - Trafik kendaraan di ruas-ruas tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk secara umum mulai terlihat meningkat (*rebound*). Pada 2020 terjadi penurunan trafik kendaraan sebesar 40% dibanding sebelum pandemi Covid-19, namun saat ini penurunannya hanya 10-15%.

"Jasa Marga sampai saat ini kalau secara *historical* tahun lalu di bulan April, kami masih negatif 40% turun dari trafik normal sebelum pandemi Covid-19. Tapi sekarang ini, mungkin sekitar 10-15%. Artinya sudah kelihatan *rebound*," kata *Corporate Secretary* PT Jasa Marga (Persero) Tbk Agus Setiawan kepada *Investor Daily* baru-baru ini.

Ia menambahkan, data tersebut memang masih di bawah kondisi normal. Akan tetapi, sudah jauh lebih meningkat jika dibanding dengan masa pandemi Covid-19 pada awal pertengahan tahun 2020. Dengan demikian, secara *historical* posisi trafik di jalan tol Jasa Marga sekarang ini mulai *recovery*. Apalagi, jika dilihat dari aktivitas masyarakat yang semakin disiplin dalam menjaga protokol kesehatan sehingga berpengaruh pada pergerakan masyarakat yang mulai menggeliat.

"Jadi gambaranannya, kalau di pertengahan 2020 saat mulai dilakukan pembatasan pergerakan akibat pandemi, devisiasinya 40% dari kondisi normal, sekarang sudah *recovery*," tegas Agus.

Bahkan di titik-titik tertentu, pergerakannya sudah mendekati kondisi normal. Walaupun demikian, di ruas-ruas menuju bandara, jalur pariwisata, dan Bali masih terkonsentrasi cukup dalam.

Selebihnya, secara keseluruhan sudah menurun di kisaran 10-15%.

Selanjutnya, tinggal bagaimana persoalan menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi trafik sekarang ini agar keuangannya tetap terjaga. Agus menyatakan, jika pendapatan perusahaan agak tertekan berarti pengeluarannya juga harus diatur dan direm.

"Direm yang mana, tentu yang direm adalah yang tidak pernah terkait dengan pelayanan dan keselamatan pengguna jalan," ucap dia.

Sedangkan jika menyangkut pemeliharaan seperti jalan berlubang dan sebagainya, Jasa Marga bakal cepat melakukan perbaikan. Sementara, untuk program-program yang sifatnya beutifikasi dan perbaikan gedung yang tidak berdampak langsung kepada pengguna jalan, pengerjaannya akan ditunda.

Tol Gedebage-Cigatas

Pada bagian lain, Jasa Marga juga akan mengelar untuk menggarap pembangunan proyek *unsolicited* Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cigatas sepanjang 206,6 km. Keikutsertaan tersebut karena Jasa Marga bertindak selaku pemrakarsa (*project initiator*).

"Kami kejar karena ruas itu tersambung dengan ruas Tol Padalarang - Cileunyi (Padaleunyi). Jadi,



Agus Setiawan

kami sudah tahu karakteristik lalu lintas dan segala macamnya. Jasa Marga sangat memahami. Kami punya ruas sampai ke Cileunyi dan saat ini ruas Cileunyi akan tersambung ke Tasik," paparnya.

Selain itu, pertimbangan lain kenapa Jasa Marga menginginkan ruas tersebut karena akan dijadikan ruas di Jalur Selatan. Jika di Jalur Utara sudah ada Tol Jakarta-Cikampek, kemudian radialnya ada Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), maka Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cigatas akan menjadi Jalur Selatan.

Di samping itu, saat ini Jasa Marga juga masih memiliki cadangan proyek tol yang pengerjaannya belum selesai dan terus berlangsung seperti Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) sepanjang 45 km dan Tol Japek Selatan.

"Jadi, Jasa Marga masih punya tabungan. Artinya, kami atur ritmenya agar semuanya jalan bareng-bareng," tutur Agus.

Sementara itu, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengelola Jalan Tol Cengkareng - Batucapeper - Kunciran, sejak Sabtu (10/4) lalu mulai mengoperasikan seluruh *on/off Ramp* atau akses masuk/keluar jalan tol sepanjang 14,19 km ini.

Pada awal pengoperasiannya, jalan tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2021 tersebut hanya mengoperasikan Gerbang Tol (GT) Kunciran 6, GT Kunciran 7, GT Kunciran 8, dan Gerbang Tol Benda Utama untuk melayani pengguna jalan menerus dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Namun, kini persoalan telah mengoperasikan seluruh *On/Off Ramp* 8 Gerbang Tol (GT) yaitu GT Tanah Tinggi 1 dan 2, GT Buaran Indah 1 dan 2, serta GT Pinang 1, 2, 3 dan 4. Terhitung sejak 2 April 2021, Jalan Tol Cengkareng-Batucapeper-Kunciran masih dioperasikan tanpa tarif sebagai bentuk sosialisasi kepada pengguna jalan.

Direktur PT JKC Agus Widodo mengatakan, dengan dioperasikannya seluruh akses jalan tol ini, maka pengguna jalan asal Pamulang, Serpong, dan sekitarnya bisa melakukan perjalanan menerus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Begitu pula sebaliknya atau sebaliknya menggunakan dari dan menuju daerah Tanah Tinggi, Buaran Indah, dan Pinang.

"Saat ini, akses di Jalan Tol Cengkareng-Batucapeper-Kunciran sudah dioperasikan semua sehingga sudah dapat digunakan untuk perjalanan menerus ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun akses dari dan menuju daerah sekitar Tanah Tinggi, Buaran, dan Pinang. Jalan ini juga sudah terhubung hingga Pamulang melalui Jalan Tol Kunciran-Serpong dan Jalan Tol Serpong-Cinere Ruas Serpong-Pamulang," jelas Agus dalam pernyataan resminya baru-baru ini.

Agus berharap, dengan beroperasinya ruas Jalan Tol Cengkareng-Batucapeper-Kunciran yang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol JORR II, dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta meningkatkan roda perekonomian di wilayah Jakarta umumnya dan Kota Tangerang khususnya.

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya PK CLC

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berhasil mengunduh data percakapan dari kotak hitam (*black box*) bagian *cockpit voice recorder* (CVR) pesawat Sriwijaya Air PK CLC yang jatuh di Perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan, dari hasil pengunduhan CVR diperoleh rekaman percakapan selama dua jam.

"Pada 1 April 2021, data CVR berhasil diunduh di laboratorium KNKT dan didapatkan rekaman percakapan selama dua jam, termasuk percakapan penerbangan yang mengalami kecelakaan," kata Soerjanto dalam pernyataan resminya, Selasa (13/4).

Dia menambahkan, KNKT berhasil mengunduh empat *channel* dari CVR. Akan tetapi *channel* 4 pada CVR mengalami gangguan. "Meskipun demikian, berdasarkan rekaman yang ada tersebut,

telah menambah data penting bagi investigasi yang hasilnya akan disampaikan dalam laporan akhir," ujar Soerjanto.

Dia menekankan, hingga saat ini, proses investigasi masih terus dilakukan KNKT disertai dengan proses penelitian yang mendetail.

"KNKT menegaskan bahwa setelah ditemukannya semua bagian *black box* ini memberikan titik terang untuk dapat mengustut penyebab terjadinya kecelakaan yang meluluhlantakan seluruh isi pesawat agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak kembali terulang di kemudian hari," terang Soerjanto.

Saat mengalami kecelakaan, pesawat Sriwijaya Air dengan tipe Boeing 737-500 itu baru lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Bandara Supadio, Pontianak. Armada tersebut membawa 56 penumpang dengan dikendalikan dua pilot beserta

empat awak kabin.

Soerjanto kembali menjelaskan, tiga hari pasca pesawat jatuh, tim pencari berhasil menemukan *flight data recorder* (FDR), yakni pada 12 Januari 2021. Dari FDR tersebut, KNKT mengolah datanya dan telah diumumkan ke publik melalui laporan awal investigasi pada 10 Februari 2021.

Adapun kotak hitam bagian CVR dari pesawat Sriwijaya Air PK-CLC berhasil ditemukan pada 30 Maret 2021. CVR kemudian dilakukan proses serah terima secara simbolis dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono pada 31 Maret 2021 di Dermaga JITC II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Alhamdulillah Selasa (30/3) malam pukul 20.00 WIB CVR Sriwijaya Air SJ-182 ditemukan di tempat yang tidak jauh dari tempat ditemukannya FDR (*flight*

data recorder)," kata Menhub Budi saat itu.

Menhub Budi menyampaikan, apresiasi kepada KNKT, Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), instansi terkait, dan para relawan serta masyarakat Kepulauan Seribu yang telah bahu-membahu berupaya secara maksimal dalam operasi pencarian baik korban, puing-puing pesawat, hingga kotak hitam FDR dan CVR.

Menhub mengharapkan, KNKT dapat melakukan investigasi secara mendalam dan segera menyampaikan hasil investigasi.

"Harapan kami KNKT bisa melakukan suatu penelitian yang detail dan menyampaikan apa yang ditemukan dalam CVR ini. Saya harapkan ketua KNKT bisa melakukan dengan baik," ucap Menhub. (esa)

CITILINK TETAP BEROPERASI DI MASA LARANGAN MUDIK

Tunggu Detail Aturan, KAI Belum Jual Tiket KA Keberangkatan Mei

JAKARTA - Sampai saat ini, PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) baru melayani penjualan tiket kereta api (KA) jarak jauh hingga keberangkatan 30 April 2021. Untuk keberangkatan bulan Mei 2021, KAI masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait detail pengaturan moda transportasi kereta api.

VP *Public Relations* KAI Joni Martinus menjelaskan, KAI mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pengaturan moda transportasi pada masa mudik. KAI berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Untuk keberangkatan bulan Mei 2021, KAI masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait detail pengaturan moda transportasi kereta api," kata Joni dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (13/4). Dia menambahkan, KAI masih tetap mengoperasikan KA dengan normal sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

"Sejauh ini, tidak ada pembatasan jam operasional kereta api seluruh perjalanan masih sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket," ujar Joni Martinus.

Joni menambahkan, pada bulan Ramadan KAI mempersilakan pelanggan yang ingin sahur dan berbuka selama dalam perjalanan KA Jarak Jauh. Sedangkan untuk KA jarak dekat yang perjalanannya kurang dari dua jam, makan dan minum diperbolehkan khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. Bagi pelanggan yang ingin membeli makanan dan minuman di atas KA jarak jauh, layanan tersebut bisa didapatkan di kereta makan maupun melalui pramugari yang bertugas.

Untuk memberikan kemudahan, pelanggan dapat memesan lebih awal makanan dan minumannya melalui aplikasi KAI Access pada menu Lokomart. Pemesanan juga dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0811 1061 2121.

Sejak 6 April 2021 pula,



Joni Martinus

papar Joni, pelanggan KA jarak jauh akan mendapatkan *healthy kit* yang berisi satu buah masker KF94 dan tisu antiseptik. Penyediaan ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan agar para pelanggan tetap merasa aman dan nyaman saat menggunakan KA Jarak Jauh.

Untuk memenuhi persyaratan naik KA jarak jauh pula, KAI menyediakan layanan pemeriksaan Ge Nose C19 seharga Rp 30.000 di 44 stasiun serta *rapid test antigen* seharga Rp 85.000 di 42 stasiun.

"Perjalanan kereta api saat ini masih mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No. 12 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No 27 Tahun 2021," ujar Joni.

Citilink

Pada bagian lain, maskapai Citilink Indonesia memastikan tetap beroperasi selama periode larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk melayani angkutan logistik dan calon penumpang yang dikecualikan dari kebijakan larangan mudik.

"Sehubungan dengan adanya informasi yang beredar mengenai pemberhentian sementara seluruh penerbangan domestik Citilink pada periode 6-17 Mei 2021, dapat kami informasikan bahwa saat ini penerbangan Citilink pada periode tersebut akan tetap beroperasi untuk angkutan logistik dan melayani masyarakat yang memenuhi kriteria untuk melakukan perjalanan," kata VP *Corporate Secretary* Citilink Indonesia Resty Kusandandina dalam keterangannya yang

dikutip Selasa (13/4).

Adapun masyarakat yang memenuhi kriteria untuk melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021.

"Citilink mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid 19 yang salah satunya melalui larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021," ujar Resty.

Citilink juga berkomitmen, lanjut dia, untuk melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelumnya, induk perusahaan Citilink, yakni Garuda Indonesia menyatakan dukungan penuh kebijakan pemerintah terkait pengendalian transportasi selama periode mudik Lebaran 2021 yang berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 menyusul diterbitkannya Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaprata sempat menyampaikan, Garuda Indonesia tentunya akan mendukung kebijakan tersebut mengingat upaya

pengendalian itu dilakukan guna mengoptimalkan upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

"Sejalan dengan dukungan tersebut, Garuda Indonesia sebagai *national flag carrier* berkomitmen untuk turut berperan aktif dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, yaitu dengan memastikan ketersediaan konektivitas udara bagi masyarakat yang harus melakukan perjalanan dalam periode tersebut, atau masyarakat yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari ketentuan larangan mudik yang tentunya dengan tetap mengacu pada syarat perjalanan dan regulasi yang berlaku," jelas Irfan. (esa)

Luhut Minta KPK Terlibat dalam Mega Proyek infrastruktur

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam pengerjaan mega proyek infrastruktur, seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung maupun penerapan *national single window* di berbagai pelabuhan.

Menurut Luhut dalam peluncuran aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa (13/3), KPK perlu dilibatkan dalam proyek infrastruktur untuk meningkatkan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan peran aktif KPK, diharapkan tindakan penyalahgunaan (*fraud*) dapat dicegah, sehingga turut meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya bagi kas negara.

"Kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, banyak yang

bisa kita hemat sebenarnya. Kemudian juga proyek seperti perubahan *national single window*," ujarnya.

Luhut menginginkan peran KPK dengan meningkatkan fungsi pencegahan dapat diperkecil atau menghilangkan peluang korupsi di proyek infrastruktur. Terlebih, saat ini Indonesia sedang menggebut proyek infrastruktur di berbagai sektor, seperti jalan tol, kereta api, hingga pangan.

"Banyak sekali mega proyek di negeri yang sedang jalan, yang perlu pencegahan agar tidak terjadi bahan korupsi ke depan, dan saya senang sekali kalo KPK memainkan peran ini ke depan," ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Jika KPK terlibat aktif dalam proyek infrastruktur sedari awal, itu akan turut mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang sudah mengincar peluang korupsi dari berbagai ke-

giatan pengadaan. Luhut menyebutkan terdapat juga oknum-oknum yang tidak suka jika KPK terlibat dalam proyek infrastruktur.

"Saya mohon KPK ikut ke dalam ini karena banyak yang tidak mau ini jalan, karena di situ sumber korupsi yang sangat banyak," ujar dia.

Selain peran aktif KPK, Luhut juga berjanji akan mendorong penerapan digitalisasi dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Sarana ini akan mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena mengedepankan sistem yang transparan dan akuntabel.

Dia ingin KPK tidak hanya getol melakukan penindakan, melainkan juga aktif terjun langsung melakukan pencegahan.

"Jangan kita biarkan orang lain buat salah kalau bisa kita ingatkan," ujar dia. (tm/ant)



Jalan Ambles di Depok

Jalan terlihat ambles di ruas jalan Boulevard, Grand Depok City (GDC), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (13/4/2021). Amblynya jalan berada di atas gorong-gorong ke aliran sungai sedalam 3 hingga 5 meter. Panjang ruas jalan yang ambles sekitar 10 meter dan berbahaya jika dibiarkan. Petugas mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mempermudah evakuasi.



Penjual Takjil di Bali

Warga memilih beraneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa di lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali, Selasa (13/4/2021). Kawasan bazar takjil dadakan tersebut menjadi lokasi favorit warga di kawasan Denpasar untuk membeli hidangan berbuka puasa.

TERKEREK INSENTIF PPNBM

Maret, Penjualan Mobil Melesat 72%

Oleh Leonard Al Cahyoputra

► JAKARTA – Penjualan mobil secara *wholesales* (pengiriman mobil ke dealer) mencapai 84.910 unit pada Maret 2021, melesat 72,6% dari Februari 2021, sedangkan penjualan mobil secara ritel naik 65% menjadi 77.511 unit. Dibandingkan bulan sama 2020, penjualan mobil secara *wholesales* tumbuh 10,5%, sedangkan ritel melejit 28%.

Kenaikan itu dipicu insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% untuk pembelian mobil baru berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc yang berlaku Maret 2021. Sebanyak 21 mobil menikmati insentif ini.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GaiKindo) Kukuh Kumara menuturkan, GaiKindo tidak ingin terburu-buru merevisi naik target penjualan 2021 sebanyak 750 ribu unit tahun ini, meski penjualan melonjak fantastis pada bulan lalu. Selain dinikmati produsen mobil, agen pemegang merek (APM), insentif itu juga dirasakan kalangan pemasok komponen, yang mencetak lonjakan order.

Hal ini, kata dia, sesuai harapan GaiKindo. Sebab, ketika penjualan mobil melesat, para pemasok pemasok komponen turut menggeliat. "Saat ini, target penjualan 2021 kami evaluasi dahulu. Terlalu dini kalau kita mengambil kesimpulan. Kami akan lihat trennya

seperti apa, jangan sampai fenomena ini hanya keagetan. Mudah-mudahan trennya terus berlanjut. Ini yang kami harapkan," ucap Kukuh kepada *Investor Daily*, Selasa (13/4).

Kukuh menerangkan, kenaikan penjualan mobil pada Maret 2021 diharapkan terus berlanjut, sehingga pemanfaatan kapasitas terpasang (utilisasi) industri mobil naik. Pada 2019, utilitas industri mobil mencapai 54%, lalu jeblos hingga setengahnya pada 2020. Saat ini, utilitas bergerak di atas 29%.

Kukuh menerangkan, industri otomotif bukan industri dadakan atau keagetan dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Jika pemain otomotif hanya bicara komitmen 3-4 tahun, kemudian pada tahun kelima tidak melakukan pembaruan, akan ditinggalkan konsumen.

"Industri otomotif sangat kompetitif. Jadi, komitmen tidak bisa hanya lima tahun, melainkan 20-30 tahun ke atas. Kalau



Kukuh Kumara

mereka yang ketinggalan dengan kandungan lokal masih rendah, ya akhirnya begitu ada kebijakan seperti relaksasi PPNBM akan gigih jari," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah memperluas relaksasi PPNBM tidak hanya untuk mobil 1.500 cc ke bawah, tetapi juga 1.500 cc sampai 2.500 cc. Terdapat delapan mobil bermesin 1.500-2.500 cc yang mendapatkan relaksasi PPNBM. Jika ditambah dengan mobil bermesin di bawah 1.500 cc, total mobil yang mendapatkan insentif ini mencapai 29.

Diskon PPNBM mobil 1.500-2.500 cc hanya berkisar 25-50%, lebih rendah dari mobil bermesin di bawah 1.500 cc sebesar 0% untuk tahap awal. Insentif mobil di bawah 1.500 cc diberikan secara progresif. Selam tiga bulan pertama (Maret-Mei 2021), tarif PPNBM 0%, kemudian untuk tiga bulan kedua, diberikan diskon PPNBM 50% dari tarif

dan untuk tiga bulan ketiga diberikan diskon 25% dari tarif.

Adapun insentif PPNBM mobil 2.500 cc diberikan dalam dua skema. Pertama, untuk kendaraan 4x2, diskon PPNBM mencapai 50%, dari 20% menjadi 10% untuk tahap I (April-Agustus 2021) dan diskon 25%, dari 20% menjadi 15% untuk tahap II (September-Desember 2021). Skema kedua, diskon PPNBM kendaraan 4x4 mencapai 25%, dari 40% menjadi 30% untuk tahap I (April-Agustus 2021) dan 12,5%, dari 40% menjadi 35% untuk tahap II (September-Desember 2021). Kuartal I-2021, penjualan mobil domestik mencapai 178 ribu unit.

Dampak positif kebijakan itu dirasakan Daihatsu, dengan capaian penjualan sekitar 12 ribu unit pada Maret 2021. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, Maret 2020. Per Maret 2021, penjualan Daihatsu mencapai 30 ribu unit, dengan pangsa pasar 17%.

"Pasar mobil pada Maret 2021 naik signifikan, karena dampak insentif PPNBM. Daihatsu bersyukur dapat bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan pasar mobil. Kami berharap, tren positif ini dapat terus berlangsung," ujar *Marketing Director* dan *Corporate Planning & Communication Director* PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, relaksasi PPNBM membuat penjualan mobil melonjak. Selain itu, kebijakan tersebut mampu menaikkan indeks manajer pembelian (*purchasing managers index*/PMI) Indonesia pada Maret 2021 menjadi 53,2 poin.

Industri 4.0 Jadikan Indonesia Masuk 10 Besar Ekonomi Global

JAKARTA - Penerapan industri 4.0 diyakini dapat mewujudkan visi besar untuk menjadikan Indonesia bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Aspirasi ini tertuang dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition, bahwa kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia Top 10 ekonomi global di tahun 2030," kata Menteri Per-

industrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (13/4).

Menperin menjelaskan, peta jalan Making Indonesia 4.0 merupakan inisiatif strategi sekaligus menjadi agenda nasional, yang salah satu tujuannya untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0. Langkah ini diyakini membuat produksi industri semakin efisien dan berkualitas sehingga bisa lebih berdaya saing global. "Artinya, transformasi digital saat

ini sangat penting, terlebih lagi dapat mendukung dan mempermudah aktivitas di tengah dampak pandemi, termasuk di sektor industri," tutur dia.

Hal ini, menurut Menperin, akan memacu kinerja sektor industri untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan menyejahterakan masyarakat. "Jadi, sesuai arahan Presiden, dengan industri 4.0 kita juga akan mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti atau satu abad kemerdekaan Indonesia. Sebab, industri

merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB nasional," ungkap dia.

Pada 2025, lanjut Menperin, industri ditargetkan mampu berkontribusi pada PDB nasional sebesar US\$ 133 miliar. Sasaran ini akan didukung dengan 185 juta penduduk yang telah memiliki akses internet, terbesar ke-4 di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan pemain ekonomi digital dan industri 4.0 tercepat di Asia Tenggara. (leo)

Penjualan Indec Diagnostics Naik Tiga Kali Lipat

JAKARTA – PT Indec Diagnostic mencatatkan kenaikan penjualan alat-alat kesehatan hingga tiga kali lipat sepanjang tahun 2020. Sebanyak 50% dari total penjualan tersebut, diktribusi dari produk rapid test Covid-19 yang dikembangkan perusahaan.

"Yang kita ingin kedepankan, kita sebagai anak bangsa sesungguhnya sudah sanggup, sudah mampu, memproduksi sendiri *rapid test* antigen atau antibodi. Sudah saatnya kita melepas ketergantungan kita dari produk impor, khususnya untuk produk rapid test antigen dan antibodi," kata Direktur Indec Diagnostics Suroso dalam wawancara dengan media secara virtual, Selasa (13/4).

Suroso menerangkan, di tengah pandemi Covid-19, Indec Diagnostic turut mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk deteksi Covid-19 Antigen dan Anti-

bodi (IgG/IgM). Sebelum pandemi Covid-19, sejak berdiri tahun 2002, PT Indec Diagnostic sebetulnya telah memproduksi berbagai produk deteksi penyakit, antara lain untuk HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, demam berdarah, dan malaria.

"Rata-rata tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk Indec Diagnostic telah mencapai 70%," tambah dia.

Suroso melanjutkan, produk rapid test Covid-19 antigen dan Covid-19 antibodi Indec Diagnostic telah melalui uji klinis Badan Penelitian dan Pengembangan Kese-

hatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Jakarta. Hasil dari uji klinis tersebut menunjukkan tingkat sensitivitas dan spesifisitas kedua produk Indec Diagnostics itu tinggi. Selain telah memenuhi standar pemerintah, harga rapid test Indec Diagnostics cukup bersaing yakni hanya sekitar Rp 70-80 ribu per tes.

Setelah vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan, Suroso meyakini, penjualan produk Indec Diagnostics akan tetap meningkat. Pihaknya menargetkan penjualan perusahaan akan naik dua kali lipat pada tahun ini dibanding tahun lalu. Indec Diagnostics akan berfokus mengembangkan produk untuk mendeteksi kadar antibodi orang yang telah divaksin.

"Kalau kita lihat vaksinasi itu, dari 100% orang yang divaksin, baik itu hepatitis dan lainnya, rata-rata 10% orang tidak memberikan imun respon atau kekebalan. Jadi vaksinasi 10% orang gagal, berdasarkan data statistik demikian. Jadi Indec Diagnostics lagi berupaya membuat produk deteksi kekebalan setelah divaksin," terang Suroso.

Suroso mengatakan, pihaknya akan mengembangkan kapasitas produksi perusahaan hingga 8-10 kali lipat mulai akhir 2021 sampai April 2022. Selain itu, Indec Diagnostics juga akan membangun infrastruktur untuk memproduksi bahan baku utama produk yang masih diimpor. (sny)

Pengusaha Keberatan dengan Tarif Baru Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA – Pengusaha keberatan dengan kebijakan PT Pelindo II atau IPC yang menaikkan sejumlah pos tarif di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pengenaan tarif baru untuk biaya penumpukan (*storage*) dan biaya pengangkutan kontainer ke truk (*lift-on*) dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan biaya logistik.

Selain itu, langkah tersebut dipandang kontraproduktif terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi menjelaskan, Pemerintah menaikkan biaya logistik nasional dapat diturunkan dari 23,5% menjadi 17% pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Target tersebut juga selaras dengan Inpres No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Namun, dengan kenaikan sejumlah pos tarif hingga 39% dibandingkan tarif lama, ini akan berdampak langsung pada peningkatan biaya logistik," kata Rico Rustombi dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (13/4).

Dia melanjutkan, kenaikan tarif di pelabuhan juga akan berdampak luas ke berbagai sektor usaha yang terkait. Hal ini dikarenakan posisi pelabuhan sebagai lini penghubung kegiatan produksi dan perniagaan.

"Perubahan skema tarif di pelabuhan, dengan demikian tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tapi juga pada sektor industri, kegiatan ekspor-impor hingga konsumen," ujar dia.

Rico mengungkapkan, kenaikan biaya tersebut dapat berdampak pada peningkatan biaya bahan baku industri, peningkatan harga jual barang jadi, dan penurunan daya saing industri nasional secara umum. Selain itu, momentum



Rico Rustombi

kenaikan tarif kali ini juga kurang tepat, karena kondisi perekonomian masih negatif walaupun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

"Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, perekonomian Indonesia di Kuartal I-2021 diprediksi masih tetap negatif di kisaran -1% hingga -0,1%. Hal senada juga disampaikan Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia serta sejumlah pengamat ekonomi," papar dia.

Lebih lagi, kata Rico, pemerintah masih aktif mendorong berbagai stimulus dan insentif fiskal dalam rangka merealisasikan program PEN. Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5-5,3% di tahun 2021 ini.

Hal senada disampaikan Mahendra Rianto, ketua harian Asosiasi Logistik Indonesia (ALI). Menurut dia, kebijakan ini diambil dengan langkah komunikasi dan sosialisasi yang minim.

Seharusnya, kata Mahendra, para pemangku kepentingan sektoral terlibat dalam urun rembuk sebelum skema tarif baru dikeluarkan. Alhasil, muncul reaksi dari Kadin Indonesia dan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI). (epa)

Teknologi Bosch Dongkrak Produktivitas Manufaktur 10%

JAKARTA – Bosch Indonesia menampilkan solusi perangkat lunak Industri 4.0 Nexeed Industrial Application System dan ActiveCockpit dalam gelaran Hannover Messe 2021 Digital Edition yang berlangsung 12-16 April 2021. Nexeed mengklaim dapat meningkatkan produktivitas manufaktur sebesar 5-10%. Sedangkan ActiveCockpit dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses operasi perusahaan.

"Nexeed Industrial Application System merupakan solusi Industri 4.0 yang komplet untuk mendigitalkan seluruh rantai nilai produksi. perangkat lunak ini mencatat, memproses, dan memvisualisasikan data dari proses produksi dan logistik,"

kata *Bussines Development Manager Connected Solutions* Bosch Indonesia Dhuha Abdul dalam konferensi pers dengan media secara virtual, Selasa (12/4).

Dhuha menambahkan, sistemnya mampu menyediakan data secara kompatibel dan standar, serta memberikan informasi penting secara *real-time*, serta menghasilkan wawasan yang menyeluruh. "Keuntungan menggunakan Nexeed adalah output produksi menguat 5-10%. Ini karena produk gagal/cacat semakin berkurang," ucap dia.

Dhuha menjelaskan, keuntungan lainnya adalah ketersediaan mesin pabrik untuk bekerja lebih besar. Hal ini karena Nexeed memperkuat kemampuan *predictive maintenance*, sehingga me-

lebih siap difungsikan, naik 15%. Selanjutnya, mengurangi biaya pemeliharaan hingga 25%, karena data dan informasi yang disediakan jelas dan akurat.

Nexeed, menurut Dhuha, juga memerlukan waktu 50% lebih sedikit untuk mengumpulkan data status dan mengkoordinasikan proses aliran material, karena proses produksi dapat dimonitor secara langsung. "Dan juga meningkatkan pemanfaatan aset intralogistik hingga 10-15%," ucap dia.

Dhuha mengungkapkan, Nexeed Industrial Application System mudah dipelajari pengoperasian tanpa perlu memiliki latar keterampilan teknologi informasi (IT) secara khusus. Nexeed juga memiliki fleksibilitas dan keamanan yang dapat diandalkan

untuk kebutuhan pengaplikasian di masa mendatang berkat arsitektur perangkat lunak modern, antarmuka yang terdokumentasi dan open standard.

"Kita juga memberikan pelatihan bagi pekerja/petugas di pabrik atau lokasi produksi, serta memastikan Nexeed Industrial Application System terimplementasikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan," ucap dia.

Sementara ActiveCockpit merupakan solusi Industri 4.0 yang mampu meningkatkan operasi produksi di fasilitas manufaktur Bosch di Cikarang, Bekasi. Melalui pengumpulan data jalur produksi secara *real-time*, solusi ini membantu memfasilitasi peningkatan operasi dan fleksibilitas produksi yang lebih besar. (leo)



Kenaikan Permintaan Barang

Pengunjung mencari kebutuhan pokok untuk berbuka puasa bersama hari pertama di sebuah swalayan di kawasan Sawangan, Depok, Selasa (13/4/2021). Supply Chain Indonesia (SCI) mencatat adanya kenaikan permintaan barang khususnya bahan kebutuhan pokok sebesar 15-20% sepekan menjelang Ramadan 1442 H.

Linknet

FiRST
MEDIA

Sebagai manusia yang mewakili First Media,
maafin saya ya kalo pernah tanpa sengaja
salah kata dan ucapan.

Saya tetap berusaha memberikan yang terbaik
yang **#BeneranTanpaBatas** buat kalian semua

Makasih ya :')

**SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA
MOHON MAAF LAHIR & BATHIN**



CUSTOMER
SERVICE: **1500 595**

**#BENERAN
TANPA BATAS**

Menteri ESDM Putuskan Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang Didanai APBN

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memutuskan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang akan menggunakan dana APBN. Skema pembiayaan ini guna mempercepat pembangunan pipa gas yang telah tertunda 15 tahun sejak dilelangkan pada 2006 lalu.



Ego Syahrial

Hal ini tercantum dalam surat Menteri ESDM kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tertanggal 1 April 2021. Dalam surat ini terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat kementerian memutuskan pembangunan Pipa Cirebon-Semarang menggunakan APBN, alih-alih digarap oleh PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai pemenang lelang urutan kedua.

Dalam surat ini dijelaskan, penetapan Bakrie & Brothers sebagai pemenang lelang Pipa Cirebon-Semarang sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPH Migas No 06/KT/BPHMIGAS/KOM/2021 dikawatirkan tidak menjadi solusi agar proyek cepat selesai. Pasalnya, dengan skema ini, tetap ada potensi tidak dapat dipenuhinya volume pasokan dan kebutuhan gas yang disyaratkan keekonomian proyek, serta kemungkinan terjadinya gagal bangun jika tidak ada penyesuaian terms and condition sesuai kondisi sekarang.

Di sisi lain, hasil pertemuan antara Menteri ESDM dengan BPH Migas pada 20 Januari 2021 lalu untuk mempercepat pembangunan Pipa Cirebon-Semarang telah dikordinasikan dengan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menggunakan APBN. Apalagi, pipa ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional dan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 terkait harga gas khusus industri. Sementara pembangunannya sudah tertunda 15 tahun.

Tak hanya itu, dengan pendanaan APBN, penetapan ongkos angkut pipa hanya akan berdasarkan biaya operasi dan perawatan. Hal ini akan sangat mendukung harga jual gas terjangkau untuk konsumen dan mendukung pengembangan industri yang berdaya saing.

"Cirebon-Semarang diusulkan (dibangun) dengan APBN, tujuannya memanfaatkan pengalihan ekspor gas," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial di Jakarta, Senin (13/4).

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan, Bakrie & Brothers ditetapkan untuk menggantikan PT ReKayasa Industri (Rekind) untuk menggarap Pipa Cirebon-Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pemenang pertama lelang proyek pipa menyatakan mundur, maka pemenang kedua dan ketiga berhak memperoleh kesempatan melanjutkan proyek tersebut. Baru jika ketiga pemenang tidak sanggup, pihaknya akan mengembalikan proyek ini ke pemerintah.

Meski menyanggapi pembangunan proyek dengan *terms and condition* sesuai lelang, Bakrie & Brothers diwajibkan menyertakan Surat Jaminan Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Bank Persepsi yang ditunjuk pemerintah sebesar 1% dari nilai investasi dalam dokumen penawaran lelang pada 15 April ini. Setelahnya, studi kelayakan (*feasibility study/FS*) dan desain rinci (*front end engineering design/FEED*) harus diserahkan maksimal pada 15 Juni. Baru kemudian, Bakrie & Brothers menggarap pipa ini dalam 35 bulan.

Sesuai ketentuan dalam lelang di 2006, Pipa Cirebon-Semarang direncanakan sepanjang 255 kilometer (km) dan diameter 28 inch, serta kapasitas alir gas 350-500 juta kaki kubik per hari (*million standard cubic feet per day/MMscfd*). Nilai investasi proyek ini diperkirakan US\$ 169,41 juta.

Untuk ongkos angkut, dalam lelang pada 2006 silam, ReKayasa Industri menjadi pemenang pertama dengan tawaran US\$ 0,36 per juta british thermal unit (*million british thermal unit/MMBTU*). Selanjutnya, Bakrie & Brothers mengajukan toll fee US\$ 0,42 per MMBTU dan PGN US\$ 0,7-1,14 per MMBTU.

Proyek Jargas

Sementara itu, Kementerian ESDM telah merampungkan seluruh kontrak pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk tahun ini senilai Rp 976,76 miliar. Pada tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jargas sebanyak 120.776 sambungan yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Penyelesaian kontrak pembangunan jargas ini menyusul diterkannya kontrak Tahap III sebanyak 44.461 sambungan dengan nilai Rp 372,14 miliar. Tahap III ini mencakup pembangunan jargas di tujuh lokasi, yakni Kabupaten Wajo 5.750 sambungan, Kabupaten Banggai 5.005 sambungan, Kabupaten Bojonegara 10.000 sambungan, Kabupaten Lamongan 5.935 sambungan, Kota Mojokerto 5.699 sambungan, Kabupaten Mojokerto 5.935 sambungan, dan Kabupaten Jombang 6.137 sambungan.

Selanjutnya, pembangunan jargas ini bisa segera dimulai. "Kami meminta agar para pelaksana menjaga mutu dan kualitas, serta memperhatikan tata waktu," kata Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Alimuddin Baso dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, pemerintah telah meneken kontrak pembangunan jargas Tahap I dan II pada Maret kemarin. Kontrak Tahap I senilai Rp 467,79 miliar mencakup pembangunan jargas di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 sambungan, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon 8.273 sambungan, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo 17.506 sambungan, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan 12.753 sambungan, serta Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo 10.817 sambungan. Selanjutnya, kontrak Tahap II senilai Rp 137,13 miliar mencakup pembangunan jargas di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang sebanyak 8.541 sambungan, serta Kabupaten Banyuwangi sebanyak 6.899 sambungan.



Bahan Bakar Khusus

Petugas SPBU Pertamina mengisi Bahan Bakar Khusus Pertamina 92 ke kendaraan pelanggan, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Pengendara menggunakan bahan bakar khusus untuk mendukung upaya penurunan emisi gas buang kendaraan, mengurangi pencemaran udara, khususnya pencemaran yang disebabkan arus transportasi.

Kuota Ekspor Batu Bara Bertambah 75 Juta Ton

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah target ekspor batu bara pada tahun ini sebesar 75 juta ton, menjadi 487,5 juta ton dan target produksi bertambah dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton. Namun, penambahan target produksi ini tak membuat alokasi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) meningkat.

Peningkatan volume ekspor ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 66.K/HK/02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Penentuan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021.

"Menetapkan tambahan jumlah produksi batu bara tahun 2021 sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri," demikian bunyi dari Keputusan Menteri yang dikutip pada Selasa (13/4).

Beleid yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 6 April tersebut membuat target produksi tahun ini mengalami perubahan. Sedianya target produksi tahun ini sebesar 550 juta ton. Dengan tambahan volume ekspor tersebut maka target produksi batu bara tahun ini menjadi 625 juta ton.

Penambahan target produksi ini tak membuat alokasi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) meningkat. Seharusnya vol-

ume ditetapkan sebesar 25% dari produksi. Beleid ini menegaskan penambahan produksi ini tidak dikenakan kewajiban DMO 25%. Dengan begitu kuota kebutuhan dalam negeri tahun ini tidak mengalami peningkatan alias tetap sebesar 137,5 juta ton. Besaran 137,5 juta ton itu merupakan 25% dari 550 juta ton yang merupakan target produksi sebelum revisi.

"Tambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75.000.000 ton sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu B, tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri," bunyi Kepmen tersebut.

Dalam Kepmen dinyatakan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pertambangan pada 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan pertambangan secara global, sehingga perlu adanya dukungan pemerintah melalui penambahan jumlah produksi batu bara 2021 untuk penjualan ke luar negeri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengungkapkan penambahan volume produksi ini disambut positif oleh pelaku usaha. Dia menyebut sejumlah perusahaan telah mengajukan revisi rencana kerja anggaran belanja (RKAB) ke Kementerian ESDM.

"Perusahaan tertarik memanfaatkan kondisi karena didorong oleh harga komoditas yang sedang membaik

sehingga pelaku usaha mencoba memaksimalkan produksi. Selain itu, perusahaan mencoba memaksimalkan produksi yang sedikit terhalang di kuartal-I serta awal kuartal-II akibat curah hujan masih tinggi," ujarnya.

Hendra mengungkapkan vaksinasi membuat potensi permintaan batu bara dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pasalnya Tiongkok yang menjadi importir batu bara terbesar di dunia dalam kondisi perekonomian membaik. Begitu pula dengan kondisi perekonomian negara-negara tujuan ekspor batu bara lainnya. "Dari pengamatan kami, Purchasing Manager Index (PMI) yang selama ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur potensi demand, dari negara-negara tujuan ekspor batu bara kita berada di level yang positif," ungkapnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, penambahan kuota ekspor batu bara pernah dilakukan Kementerian ESDM sebelumnya. Pada 2018 pemerintah membuka peningkatan kran ekspor hingga 100 juta ton. Hal ini seiring dengan membaiknya harga komoditas. Di 2019 dan 2020 pun dilakukan kebijakan yang sama. Hanya saja pada 2020 kemarin pemerintah memberikan kesempatan terhadap kuota DMO yang belum terserap untuk diekspor. Pasalnya penyerapan batu bara dalam negeri tahun lalu terimbas pandemi Covid-19. (rap)

Karpowership Berperan Penting dalam Memasok Listrik ke NTT



Agustinus Jatmiko

JAKARTA - Keberadaan kapal pembangkit listrik Karadeniz Powership Gokhan Bey asal Turki berkapasitas 125 MW yang ada di Bolok, Ka, berperan penting dalam memulihkan kondisi kelistrikan di Kota Kupang pada Minggu (4/4), pascabencana alam.

"Jadi setelah angin kencang itu, pada Senin (5/4) pukul 23.40 wita, BTS Telkom dan Telkom sudah menyala, dan beberapa rumah sakit menyala itu adalah berkat suplai dari kapal listrik yang ada di Bolok," kata General Manager PT. PLN UJW NTT Agustinus Jatmiko di Kupang, Selasa (13/4).

Agustinus menceritakan bahwa pertama kali usai cuaca membaik pascakencang pada Minggu (4/4) malam, hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa mesin-mesin PLN untuk memastikan tidak ada yang rusak akibat angin kencang itu.

"Jadi mereka (kapal listrik, red) yang pertama kali beroperasi. Karena jalur dari desa Bolok ke kecamatan Maulafa ke tempat-tempat BTS Telkom punya itu adalah jalur-jalur yang sudah kami perbaiki," ujar dia.

Pihaknya bersyukur karena usai dilakukan pemeriksaan tak ada satu-pun mesin milik PLN yang rusak termasuk mesin dari kapal listrik Karpowership

yang sudah ada di Bolok sejak akhir tahun 2016 itu.

Melihat betapa pentingnya kapal listrik Karpowership asal Turki di wilayah pulau Timor khususnya Kota Kupang, Walikota Kupang Jefry Riwu Koreh menilai bahwa keberadaan kapal listrik Karpowership yang berada di desa Bolok, Kabupaten Kupang sangat membantu masalah kelistrikan di pulau Timor khususnya Kota Kupang pasca bencana siklon Seroja yang menerjang daerah itu.

"Keberadaan kapal listrik ini di Bolok membantu sekali terkait kelistrikan di Kotas Kupang khususnya. Saya justru yang mengusulkan pada saat saya masih berada di kursi DPR RI," katanya.

Ia menceritakan bahwa pada tahun 2016 lalu, dirinya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat soal seringnya pemadaman listrik sampai dengan enam jam. Jeffry kemudian bertemu direktur PLN untuk meminta bantuan agar ada bantuan kapal listrik di daerah itu sehingga masalah listrik di kota Kupang tidak jadi masalahnya.

"Oleh karena itu pada bulan November 2016 kalau tidak salah kapal itu tiba di Kupang. Saya kurang tahu berapa lama kontraknya tetapi saya harap ini bisa diperpanjang kontraknya mengingat saat ini pasca bencana sistem kelistrikan di pulau Timor khususnya kota Kupang masih terganggu," tambah dia.

Sementara itu tokoh masyarakat di Kota Kupang Freddy Ongko Saputra menilai bahwa keberadaan kapal listrik di Bolok perlu diperpanjang kontraknya jika jangka waktu masa kontraknya sudah mau selesai. "Kita tidak tahu kebutuhan listrik di wilayah pulau Timor mencukupi atau tidak saat

ini apalagi dengan adanya bencana saat ini," tambah dia. Saat ini menurut dia sejumlah gardu induk serta PLTU di beberapa wilayah di wilayah Kupang belum

selesai dibangun. Selama belum selesai dibangun menurut dia pemerintah perlu mempertahankan kapal listrik asal Turki itu. (es)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS")

Direksi PT Indosat Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 6 Mei 2021
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Indosat Ooredoo
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110

Mekanisme RUPS : RUPS secara elektronik.
Dengan mata acara dan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST.
- Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021.
 - Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPST.
- Persetujuan penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK RUPS").
- Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 - Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan melalui suatu RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

Persetujuan penjualan menara Perseroan yang merupakan transaksi material sesuai dengan keterbukaan informasi kepada OJK No. 07/AT/ATO-ATA/LGU/21 tanggal 17 Februari 2021.

- Mata acara ini disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Catatan:

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham.
- Berdasarkan Peraturan OJK RUPS jo. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS secara elektronik, akan menyelenggarakan RUPS secara elektronik **tanpa kehadiran fisik pemegang saham**. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS secara elektronik atau memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- Perseroan menyediakan fasilitas registrasi perseroan secara online melalui tautan <https://rups.indosat.com> yang mulai dibuka tanggal 14 April 2021 dan akan ditutup pada tanggal pelaksanaan RUPS. Panduan lebih lanjut untuk melakukan registrasi secara online dapat diakses pada <https://indosatoooredoo.com/portal/id/corporategeneralmeetings?defabid=2>. Untuk keperluan autentikasi dan verifikasi, pemegang saham yang telah melakukan registrasi tetap **wajib** melakukan registrasi ulang secara elektronik pada <https://rups.indosat.com>.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
 - Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2021 pukul 16.00 WIB.
 - Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 13 April 2021 pukul 16.00 WIB.
- Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan eProxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASYKSEI melalui www.ksei.co.id.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS dan dalam pemungutan suara dalam RUPS, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
- Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah tersedia sejak tanggal pengumuman sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dapat diunduh pada <https://indosatoooredoo.com/portal/id/corporategeneralmeetings?defabid=2>.
- Pemberian suara dalam RUPS akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan diumumkan secara langsung pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.

Untuk terbentuknya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah bergabung dalam live event RUPS elektronik Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 14 April 2021
PT INDOSAT TBK
Direksi

INVITATION

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")

The Board of Directors of PT Indosat Tbk ("Company") hereby invites all of the shareholders of the Company to attend the Company's GMS that will be convened on:

Date : Thursday, 6 May 2021
Time : 02.00 p.m. (Western Indonesia Time) until end
Venue : Gedung Indosat Ooredoo
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110

Electronic AGMS
With the following GMS agenda (including explanation for each item):

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"):

- Approval of the annual report and to ratify the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2020.
 - This agenda is proposed to comply with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), whereby the annual report and the financial statements must be approved and ratified by the AGMS.
- Approval of the determination of the remuneration for the Board of Commissioners of the Company for 2021.
 - This agenda is proposed pursuant to Article 20 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 113 of the Company Law, where the amount of the remuneration of the Board of Commissioners is determined by the AGMS.
- Approval of the appointment of the Company's Independent Auditor for the financial year ended on 31 December 2021.
 - This agenda is proposed pursuant to Article 11 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 59 of Regulation of the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK GMS Regulation").
- Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.
 - Pursuant to the Company's Articles of Association, Company Law, and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, changes to the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors must be resolved through a GMS.

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS")

Approval of the sale of Company's towers as a material transaction consistent with the disclosure to OJK No. 07/AT/ATO-ATA/LGU/21 dated 17 February 2021.

- This agenda is required pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Alteration of Business Activities.

Notes:

- This invitation is intended as an official invitation to the Company's shareholders. The Company will not submit or send any other invitation letter to each shareholder.
- Based on OJK GMS Regulation jo. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies, the Company, as an electronic GMS organizer, will convene the GMS through electronic platform **without any physical attendance of the shareholders**. Therefore, the Company encourage all shareholders to participate in the electronic GMS or grant their proxy via eProxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- The Company provides online registration which can be accessed through <https://rups.indosat.com>, which opened from 14 April 2021 and closed on the date of the GMS. Further information and guidance on how to access the online registration is available via <https://indosatoooredoo.com/portal/id/corporategeneralmeetings?defabid=2>. For purposes of authentication and verification, shareholders who have registered are still **required** to re-register on <https://rups.indosat.com>.
- Shareholders who are entitled to attend or represented at the GMS are:
 - For those whose shares have not been electronically registered in the Collective Custody of KSEI, only the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register as at 4.00 p.m. (Western Indonesia Time) on 13 April 2021.
 - For those whose shares are in the Collective Custody of KSEI, only the account holders whose names are registered as the Company's shareholders in the securities account of the Custodian Banks or Securities Companies as at 4.00 p.m. (Western Indonesia Time) on 13 April 2021.
- The shareholders who are unable to attend the GMS may be represented by their authorized representative using eProxy as provided by KSEI. Procedures in the granting of authority by eProxy are provided by KSEI which can be accessed electronically on the eASYKSEI platform through www.ksei.co.id.
- Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are not eligible to act as an authorized representative at the GMS. Any of their voting rights in the GMS will be deemed void and invalid.
- Materials relating to the agenda of the GMS is already available starting from the date of this invitation until the GMS date and can be downloaded via <https://indosatoooredoo.com/portal/id/corporategeneralmeetings?defabid=2>.
- Voting in the GMS will be conducted electronically through the Company's electronic voting platform, and voting can be conducted from 13 April 2021 until the opening of each agenda that requires voting in the GMS.

For keeping orderliness of the GMS, the shareholders or its proxies are kindly requested to join the electronic GMS live event at the latest 30 (thirty) minutes prior to the start of the GMS.

Jakarta, 14 April 2021
PT INDOSAT TBK
The Board of Directors

PUPR Siap Bedah 1.000 Rumah di Kendal



Khalawi Abdul Hamid

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap membedah 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal segera menyiapkan data calon penerima bantuan serta lokasi penyaluran bantuan agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak.

“Bedah rumah untuk 1.000 RTLH di Kabupaten Kendal akan kami salurkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers, Senin (12/4).

Dia menjelaskan, Program BSPS adalah salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat untuk mewujudkan hunian yang layak huni. Meskipun bantuan yang diberikan pemerintah hanyalah berupa stimulan senilai Rp 20 juta, kenyataan di lapangan hal tersebut dapat memacu motivasi masyarakat untuk membangun rumahnya agar

lebih layak huni.

“Bantuan yang diberikan Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Tapi rumah yang dibangun oleh masyarakat nilainya bisa lebih dari itu bisa sekitar Rp 50 juta lebih,” terangnya.

Kementerian PUPR, imbuhnya, terus mendorong agar pemerintah daerah memiliki data RTLH di daerahnya masing-masing yang *up to date*. Dengan demikian, pelaksanaan penyaluran program bantuan di bidang perumahan dapat berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kalau bisa pemda membuat satu percontohan dimana ada satu Kelurahan yang bebas dari RTLH. Jadi pelaksanaan Program BSPS bisa lebih fokus dan bisa menjadi contoh bagi Kelurahan lain untuk mengentaskan RTLH di daerah,” ujar Khalawi.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengaku kebutuhan rumah di Kendal sekitar 39.000 tapi kemungkinan tahun ini diberikan bantuan sekitar 1.000 dan ada arahan dari Dirjen Perumahan bahwa itu merupakan stimulus dari pemerintah pusat. Pihaknya juga sudah mempersiapkan lahan untuk lokasi pembangunan rumah susun pekerja yang *clean and clear* di Kawasan Industri Kendal.

“Kita akan konsepkan bagaimana dengan bantuan 1.000 unit ini bisa memberikan motivasi bagi masyarakat Kendal yang lainnya. Kemungkinan Program CSR bisa diikuti dalam kegiatan ini agar bisa menyelesaikan target ini. Selain itu, kita juga sudah anggarkan untuk pengurusan tanah sebagai lokasi Rusun pekerja dengan luas lahan yang disiapkan sekitar 1,5 hektare,” ujarnya. (imm)



Demand dan Supply Perkantoran

Gedung-gedung perkantoran di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, di Jakarta, Selasa (13/4/2021). Konsultan properti Colliers memproyeksikan tercapainya titik keseimbangan antara demand dan supply properti subsektor perkantoran terjadi pada tahun 2023–2024.

Pembangunan Rumah Subsidi Berpotensi Naik 30%

Oleh Edo Rusyanto

▶ JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) memperkirakan pembangunan rumah tapak bersubsidi meningkat pada 2021. Rumah tapak (*landed house*) masih menjadi motor penggerak bisnis properti di Indonesia.

“Tahun 2021, paling tidak akan ada kenaikan minimal 30% dari pencapaian tahun 2020,” ujar Bambang Eka Jaya, wakil ketua umum DPP REI, kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Mengutip data DPP REI, tahun 2020, rumah bersubsidi yang terbangun oleh REI sebanyak 115.388 unit. Angka itu melemah sekitar 35% dibandingkan torehan tahun sebelumnya yang sebanyak 177.248 unit. Tahun ini, anggota REI berencana membangun 174.631 unit.

“Pasar rumah tapak tetap menjadi primadona tahun 2021. Untuk apartemen masih perlu terobosan kreatif agar bisa bersaing dengan rumah tapak yang harganya Rp 1 miliar ke bawah,” urai Bambang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Eko D Heri Poerwanto, pernah mengatakan, kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi menjadi soko guru perekonomian.

“KPR subsidi menjadi soko guru pertumbuhan perekonomian di Indonesia, kami mengapresiasi para *stakeholder* yang saat ini terus bahu mem-

bahu menjaga sektor perumahan ini tetap berjalan,” kata Eko Heri.

Dia menjelaskan, saat ini, sektor properti menjadi *rigid sector* meliputi konstruksi dan real estat yang dapat menimbulkan *multiplier effect* atas pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha mikro dan menengah untuk menghasilkan bahan baku bangunan maupun tenaga.

Tahun 2021, terkait rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk dapat memfasilitasi rumah bersubsidi sebanyak 157.500 unit senilai Rp 19,1 triliun. Lalu, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) untuk sebanyak 19.950 unit senilai Rp 8,7 miliar.

Kemudian, subsidi selisih bunga (SSB) untuk membayar SSB ulang sebanyak 859.582 unit senilai Rp 5,96 triliun. Selanjutnya, subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp 630 miliar untuk 157.500 unit yang merupakan komplementer dari FLPP se-



Bambang Eka Jaya

banyak 157.500 unit. Selain itu, melalui Tapera sebanyak 51.000 unit dengan target realisasi pada semester 1/2021 sebesar 11.000 unit.

Insentif Diperluas

Sementara itu, Bambang menegaskan, relaksasi atau insentif sangat dibutuhkan oleh sektor properti saat ini. Hal itu mengingat rata-rata setiap tahunnya para pengembang menyediakan rumah untuk rakyat berkisar 250-300 ribu unit. Selain itu, sektor properti berkontribusi sebesar 2,7% terhadap PDB nasional.

“Kami berharap pemerintah memperpanjang periode relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minimal 1-2 tahun,” harap Bambang.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rusun yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar.

Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Insentif itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (*ready stock*) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Ketentuan PPN ditanggung pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

“PPN berdampak sangat positif khususnya bagi pengembang-pengembang besar yang punya rumah siap huni (*ready stock*). Begitu juga dengan apartemen siap huni, banyak diserbu pembeli,” kata Bambang.

Ke depan, kata Ali Traghanda, *chief executive officer* (CEO) Indonesia Property Watch (IPW), pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi pengurangan PPN bagi penjualan perumahan inden sehingga dapat berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Seperti diberitakan *multiplier effect* sektor properti termasuk perumahan sangat besar sebagai lokomotif perekonomian nasional dan mendorong sekitar 174 industri ikutan lainnya.

Dia menilai, saat ini, pasar properti dalam tren kenaikan, meskipun masih belum stabil dan diperkirakan mulai terasa titik balik paling cepat pada semester II/2021. “Prediksi sementara pasar perumahan 2021 memberikan pertumbuhan minimal 15% dibandingkan 2020 dan dimungkinkan akan melonjak bila stimulus properti *total football*,” ujar Ali.

The Grand Shopping Center Dibuka Juli 2021

JAKARTA – Crown Group membuka pusat ritel The Grand Shopping Center, Eastlakes di pinggir selatan di timur Sidney, Juli 2021. Kawasan Eastlakes merupakan area pertumbuhan kota baru serta menjadi pusat hunian dan ritel.

Direktur Penjualan Crown Group, Prisca Edwards mengatakan bahwa Kawasan Eastlakes menjadi komunitas dari *masterplan* hunian dan ritel yang dikembangkan oleh Crown Group dengan nilai Rp 10 triliun. The Grand, yang sebelumnya dikenal sebagai Eastlakes LIVE, saat ini selesai dibangun dengan tiga menara yang telah melaksanakan proses *topping-off* dan tujuh ritel baru siap pindah ke The Grand Shopping Center pada Juli tahun ini.

Lima gerai ritel lainnya sedang dalam proses negosiasi tentang ruang sewa di pusat perbelanjaan dengan harapan telah disewakan sepenuhnya pada saat pembukaan. Hal ini menandai tonggak penting dalam pembangunan hunian dan ritel paling menarik yang pernah dilihat di daerah ini dalam beberapa dekade. Hal ini juga menandai terciptanya gedung tertinggi di kawasan pinggiran kota tersebut.

“Mereka telah melihat peningkatan kunjungan ke *marketing gallery* mereka sebesar 300% karena pembeli terus mencari apartemen di daerah dengan jaringan infrastruktur yang kuat,” kata Prisca Edward, dalam keterangan pers, Selasa (13/4).

Dia menjelaskan, pada tahap pertama The Grand Shopping Center terdiri atas ruang ritel seluas 2.800 meter persegi (m²) dan 15 gerai akan dibuka secara progresif bersama-sama dengan format baru ALDI yang lebih besar, toko ritel pertama yang akan dibuka pada akhir Mei atau awal Juni. Gerai ritel lainnya termasuk Woolworths Metro, Sushi Row, Ausome Nails, Hatch Espresso, Wholelife Pharmacy, Rini’s Car Wash dan outlet Australia Post/Newsagency dibuka pada Juli.

Pusat perbelanjaan tahap pertama akan berada di bawah kompleks hunian di mana 133 unit apartemen akan segera diselesaikan, mencakup tiga bangunan di sisi utara pengembangan. Kawasan hunian



Prisca Edwards

dan ritel kedua yang menawarkan 65 atau lebih toko dan gerai kuliner akan mulai dibangun tahun depan.

Keduanya akan membentuk pusat perbelanjaan baru dan menarik bernama The Grand, yang menggantikan Eastlakes Shopping Centre yang dibangun tahun 1960-an, yang hingga saat ini masih beroperasi. Kawasan ritel dan kuliner baru, dengan interior karya Buchan, bertujuan untuk mengubah area tersebut menjadi tujuan wisata tersendiri.

Edwards mengatakan bahwa banyak pembeli datang dari berbagai pinggiran kota di sekitarnya seperti Pagewood, Mascot, Botany, Eastgardens dan Rosebery, dengan berbagai pembeli termasuk pelajar yang ingin tinggal di dekat UNSW hingga keluarga yang ingin downsizing.

“Kawasan The Grand milik Crown Group menampilkan desain kontemporer yang menakjubkan oleh arsitek terkenal internasional Francis-Jones Morehen Thorp. Menampilkan 490 unit apartemen mewah dan akan menjadi pusat kota baru dan hingga 80 restoran, kafe, toko dan supermarket ketika sepenuhnya selesai,” kata dia.

Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan The Grand adalah pengembangan hunian tunggal terbesar di kawasan timur, menciptakan katalisator paling signifikan untuk pertumbuhan di daerah tersebut. (imm)

Asia Menjadi Pertumbuhan Global Masa Depan

JAKARTA - Asia Pacific Real Estate Association (APREA) menilai bahwa kawasan Asia tetap akan menjadi tempat pertumbuhan global di masa depan. Tiongkok, Jepang, India, dan kawasan ASEAN pada 2030 dan seterusnya diperkirakan memiliki ekonomi terbesar di dunia.

Terlepas dari gejolak pandemi, transformasi ekonomi Asia selama 60 tahun terakhir belum pernah terjadi sebelumnya dengan abad ke-21 yang digambarkan sebagai “Asian Century”.

“Infrastruktur pada akhirnya menerjemahkan efek urbanisasi menjadi manfaat bagi real estat. Dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh ekonomi yang berkembang pesat yang akan menciptakan lebih dari setengah kota besar di dunia, investasi untuk pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik adalah siklus yang akan dimainkannya selama beberapa dekade,” ujar Ketua APREA John Lim, dalam keter-

angan pers, baru-baru ini.

Menurut dia, didorong oleh penurunan demografis, urbanisasi di Asia Pasifik merupakan ledakan besar yang akan mendorong pertumbuhan kelas menengah. Dengan itu, siklus konsumsi pun meningkat. Aset riil merupakan cara megatren struktural kawasan yang akan bertahan lebih lama dari pandemi.

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa kawasan Asia perlu menginvestasikan US\$ 26 triliun dari tahun 2016 hingga 2030 jika kawasan tersebut ingin mempertahankan momentum pertumbuhannya, memberantas kemiskinan, dan menanggapi perubahan iklim, yang menghasilkan US\$ 1,7 triliun setahun hingga akhir tahun dasawarsa.

Saat ini, diperkirakan hanya sekitar US\$ 900 juta yang akan diinvestasikan setiap tahun. Dengan kata lain, jika kebijakan kondusif bagi sektor swasta

untuk mengisi kekosongan ini, Asia Pasifik memberikan peluang investasi infrastruktur lebih dari US\$ 8 triliun selama sepuluh tahun ke depan.

Dengan permintaan infrastruktur yang diperkirakan meningkat secara eksponensial, ada kemungkinan pembiayaan berkelanjutan untuk proyek-proyek besar ini akan mendapatkan daya tarik. “Akan ada peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi, karena banyak prakarsa infrastruktur sejalan dengan pembangunan kembali konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi,” kata John Lim yang juga *Co-Founder & Deputy Chairman* ARA Asset Management Limited.

Dia mengatakan, Tiongkok telah mengumumkan rencana untuk fokus pada pengembangan “infrastruktur baru” untuk mencapai target pembangunan. Rencana investasi infrastruktur yang diumumkan untuk 5-7 tahun ke depan akan membutuh-

kan hampir US\$ 7 triliun. Rencana juga dilakukan pada sektor infrastruktur India. Pemerintah India dalam anggaran terbarunya, telah berjanji untuk memperluas pengeluaran ke dalam rencana infrastruktur senilai US\$1,5 triliun, menciptakan lembaga pembiayaan yang dapat membuka peran pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur.

Di Asia Tenggara, proyek infrastruktur yang ambisius sedang berlangsung di seluruh wilayah. Rencana infrastruktur “Bangun! Membangun! Membangun!” di Filipina sedang berlangsung dengan 75 proyek berbeda diproyeksikan memerlukan biaya US\$ 180 miliar. Di Indonesia, sistem rel kecepatan tinggi yang menghubungkan perjalanan sejauh 140 km antara Jakarta dan Bandung juga sedang dibangun.

“Saat ini, ekonomi Asia Tenggara senilai US\$ 2,4 triliun adalah yang terbesar ketujuh di dunia dan diperkirakan akan melonjak ke posisi keempat pada tahun 2050,” kata CEO APREA, Sigrid Zicalita.

Dia menambahkan, tenaga kerja di Asia Tenggara akan bertambah hingga 60 juta sementara populasi perkotaannya diperkirakan meningkat sebanyak 90 juta pada 2030. ASEAN membutuhkan pembangunan

infrastruktur jika ingin mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

Kebangkitan REIT

Kebijakan pemerintah di daerah ini akan terus kondusif dengan upaya signifikan yang dilakukan oleh masing-masing untuk mengembangkan rezim REIT-nya sendiri. Perekonomian berlomba untuk mengamankan masa depan REIT dan momentum yang signifikan akan tercipta karena regulator berusaha untuk tetap relevan dalam permainan.

Pertumbuhan lebih lanjut dari kelas aset juga akan didorong oleh partisipasi negara berkembang terbesar di kawasan itu. Seiring dengan percepatan gerakan REIT di wilayah tersebut, stok aset yang dilembagakan akan terus bertambah.

“Kapitalisasi pasar REIT di kawasan ini telah meningkat dari di bawah US\$ 6 miliar pada awal abad baru menjadi lebih dari US\$ 315 miliar sekarang,” kata Zicalita.

Dia menuturkan, ada pendorong penting untuk direnungkan bahwa setelah pasar REIT Tiongkok dan India mapan dan matang, Asia Pasifik akan duduk sebagai episentrum REIT Global dengan kapitalisasi pasar total mencapai US \$ 1 triliun pada akhir dekade ini, melebihi AS. (imm)



Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas UMKM, Bakti Keminfo kembali menggelar acara pelatihan yang bertajuk Digitalisasi Negeri Menuju Sumber Daya UMKM Go Digital. Acara yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu itu menghadirkan 30 peserta offline dan 100 peserta Online. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Bakti Kominfo, Hipmi serta diemirahkan oleh komedian Temon. Pelatihan juga menggelar lomba pembuatan video dengan hadiah total Rp.10 juta rupiah. Tampil sebagai pemenang UMKM Ayam Potong Lidah, UMKM Batik dan UMKM Akuarium

Trenggono: Kegiatan Ekonomi Ruang Laut Harus Terapkan Keberlanjutan

Oleh **Ridho Syukra**

► **JAKARTA** – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan jajarannya bahwa kegiatan ekonomi di ruang laut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan atau ramah lingkungan. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ruang laut memang harus terus didorong guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya juga wajib dijaga karena perannya yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan PNBP dari pemanfaatan ruang laut kembali meningkat tahun ini. Dalam mencapai target itu, KKP memastikan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan sehingga ekosistem laut tetap terjaga. Salah satu yang dilakukan KKP dalam memastikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan di ruang laut adalah dengan melibatkan para ahli dari kampus-kampus ternama di Indonesia, baik ahli di bidang kelautan, ekonomi, hingga lingkungan. "Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut," ujar Trenggono dalam keterangan KKP, kemarin.

Pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan ekonomi beragam bentuknya, seperti penanaman kabel atau pipa bawah laut untuk sarana telekomunikasi, pengeboran minyak dan gas alam, hingga kegiatan wisata. Selama ini, kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi pada PNBP alias kas negara. Untuk itu, kegiatan ekonomi di ruang laut tetap harus didorong agar manfaat yang didapat negara maupun masyarakat menjadi lebih optimal.

Namun di sisi lain, kegiatan ekonomi di ruang laut tidak boleh mengancam kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. "Keberadaan padang lamun, karang, dan semua biota yang ada di lautan sangat penting karena memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya berperan menghasilkan oksigen, sumber pangan bergizi, hingga mengurangi efek pemanasan global. Ruang laut harus dijaga, kalau tidak maka efek lebih luas dalam kurun waktu



Sakti Wahyu Trenggono

yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan," jelas Trenggono.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, PNBP di bidang PRL pada 2021 melonjak menjadi Rp 7,90 miliar dari tahun sebelumnya Rp 3,70 miliar. Penerimaan antara lain dari perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, serta dari kerja sama pemanfaatan (KSP) pulau-pulau kecil. Untuk mencapai peningkatan PNBP dari bidang PRL, KKP meningkatkan layanan ke masyarakat serta mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk perizinan sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. "Aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PRL juga dibuat penyelesaiannya agar bisa segera terbit. Aturan turunan ini untuk mempercepat implementasi arahan Presiden dalam penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut," papar Haeru.

Pencurian Ikan

Pada bagian lain, KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(PSDKP) menangkap lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Sedikit berbeda dalam modus operasinya, para pencuri ikan tersebut mengincar cumi sebagai komoditas sasaran. Penangkapan lima kapal pencuri ikan tersebut semakin menegaskan komitmen KKP dibawah komando Menteri Trenggono untuk tidak berkompromi dengan para pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia. "Kami memastikan proses hukum atas kapal-kapal tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Sekjen KKP yang juga Plt Dirjen PSDKP KKP Antam Novambar Operasi Kapal Pengawasan Perikanan (KPP) di bawah komando Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP yang terdiri atas Hiu Macan Tutul 1, Hiu Macan Tutul 2, Hiu 11, serta Orca 3 di Perairan Laut Natuna Utara berhasil mengamankan lima kapal ilegal berbendera Vietnam pada Kamis (8/4). Para pelaku pencurian ikan ini sempat melawan dengan cara melarikan diri dari kejaran aparat namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kelima kapal tersebut adalah KM BD 93277 (28,60 GT), KM BD 30925 TS (27 GT), KM BD 30135 TS (23 GT), KM BV 99689 TS (27 GT), dan KM BV 78409 (27 GT). Selain barang bukti berupa kapal, aparat turut mengamankan 28 awak kapal yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksiono menyampaikan, alat tangkap yang digunakan kelima kapal tersebut berupa jaring cumi. Hal ini berbeda dengan yang biasa digunakan kapal Vietnam sebelumnya yakni *trawl* yang menargetkan ikan-ikan dasar (demersal). "Ini modus operandi yang relatif baru, mereka mengincar komoditas cumi di perairan kita," jelas dia. Pengungkapan modus baru ini menunjukkan bahwa para pencuri ikan di laut Indonesia memang mengincar sumber daya ikan nasional, karena itu KKP akan semakin memperketat pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan. "Kami perkuat pengawasan di Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Utara Laut Sulawesi," jelas Pung.

Penangkapan lima kapal ikan asing ilegal tersebut memperpanjang catatan penangkapan pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Pada 2021, KKP telah melakukan proses hukum terhadap 72 kapal yang terdiri atas tujuh kapal berbendera Vietnam, lima kapal berbendera Malaysia, dan 60 kapal berbendera Indonesia. (t)



Panen Timun Suri

Petani memanen timun suri di Kampung Cangkring, Kasemen, Serang, Banten, Selasa (13/4/2021). Menurut petani, hasil panen timun suri saat ini menurun dari biasanya 10 - 12 kwintal per hektare menjadi hanya 6 - 7 kwintal per hektare akibat cuaca buruk.

RI Ekspor 72 Komoditas Pertanian Rp 220 Miliar

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Efendi melepas ekspor komoditas pertanian senilai Rp 220,40 miliar di Terminal Kontainer Jakarta Internasional (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/4). Komoditas pertanian yang dilululintaskan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta terdiri 72 jenis sebanyak 7.100 ton menuju 41 negara.

Mentan Syahrul menjelaskan, keberhasilan ekspor komoditas pertanian itu membuktikan Indonesia sangat kaya dengan beragam komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia, ini juga peluang untuk terus berinovasi dalam produk pertanian sehingga bisa memenuhi kebutuhan negara lain. Saat terjadi keterbatasan akibat pandemi Covid-19, seluruh insan pertanian termasuk di DKI Jakarta dan sekitarnya tetap bekerja dan berproduksi. "Keberhasilan ekspor komoditas ini menjadi bukti bahwa produk pertanian Indonesia selalu hadir dan dibutuhkan hingga ke pasar dunia," kata dia.

Sedangkan Muhajir menuturkan, dengan ikut mendorong ekspor pertanian maka mata



Syahrul Yasin Limpo

rantai dan proses dari komoditas ekspor itu dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat. "Saya berharap kegiatan ekspor pertanian ini dapat bersinggungan langsung dengan seluruh kalangan masyarakat hingga ke petani, sehingga otomatis dapat ikut menentaskan kemiskinan," ujar dia. Kehadiran Menko PMK dalam acara pelepasan ekspor pertanian tersebut untuk memastikan bahwa yang dilakukan Menteri Pertanian dan jajarannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia khususnya petani.

Kepala Badan Karantina Per-

tanian Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil menjelaskan, pada pelepasan ekspor itu terdapat komoditas baru yakni pakan hewan kesayangan 15 ton senilai Rp 891,80 juta dengan tujuan India. Dengan iklim, layanan, dan kemudahan serta inovasi teknologi pertanian, ke depan diharapkan makin banyak komoditas baru dapat menyusul sarang burung walet (SBW), porang, dan rempah-rempah yang berjaya di pasar ekspor. Secara nasional, Karantina Pertanian di 50 tempat pengeluaran, baik pelabuhan, pos lintas batas, dan bandara di Indonesia memfasilitasi ekspor 140 produk tumbuhan dan sembilan produk hewan 44.200 ton senilai Rp 1,22 triliun ke 94 negara tujuan.

Pertanian NTT

Pada bagian lain, Kementan segera memulihkan sektor pertanian yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan dampak bencana di NTT menjadi salah satu perhatian utama Kementan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah memerintahkan jajaran Kementan bersama pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun rumusan program yang tepat guna memulihkan produksi padi, jagung, dan peternakan, mengingat NTT

merupakan sentra produksi jagung dan sapi. "Masalah padi, jagung, dan ternak akibat bencana alam ini akan dihitungkan dan saya perintahkan dirjen turun cepat menyusun agenda dan program nyata pemulihan," tutur Mentan.

Syahrul berkunjung ke Kupang, NTT, Sabtu (10/4), guna meninjau lokasi terdampak bencana alam akibat badai tropis seroja sekaligus menyerahkan bantuan sebanyak 20 truk dan sarana pertanian, ini sebagai respons cepat Kementan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mengambil langkah strategis guna menanamkan dampak bencana alam khususnya mengembalikan produksi padi, jagung, dan ternak. Kementan juga memberi bantuan program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Setiap rumah yang terdampak bencana diberi bantuan bibit pisang varietas baru dari Badan Litbang Kementan hingga difasilitasi aspek hilirnya. "Kita siapkan bibit pisang 100 ribu pohon, tanam setiap rumah, hasilnya sangat bagus beda dengan pisang umumnya. Ini bukan soal makan pisangannya, tapi hasilnya dikelola dengan *home industry*. Bikin keripik dalam kemasan yang bagus dan nilai jualnya tinggi," jelas dia. (t)

Pengusaha Minta Tambahan Waktu Jalankan Zero Odol

JAKARTA – Para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk menjalankan kebijakan *zero over dimension over load (zero odol)* secara bertahap hingga 2025. Alasannya, biaya yang dibutuhkan industri sangat besar, bisa mencapai triliun rupiah dan tidak mungkin bisa dijalankan pada 2023 sesuai waktu yang ditetapkan.

Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Agung Wibowo mengatakan, ongkos angkut kelapa sawit (CPO) berpotensi meningkat dua kali lipat dengan diterapkannya kebijakan *zero odol* tersebut. "Kami perlu mempersiapkan dana besar untuk kebutuhan investasi tambahan untuk modifikasi dan operasional. Kami minta pemerintah memberikan tambahan waktu setidaknya pada 2025 agar pelaku usaha

bisa menjalani kebijakan *zero odol* ini dengan sebaik mungkin," ujar dia di Jakarta, Selasa (13/4).

Industri perkebunan kelapa sawit membutuhkan biaya sekitar Rp 59 triliun untuk menjalankan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih (*zero odol*) jika tetap dijalankan pada 2023. Rinciannya, sebesar Rp 10 triliun untuk peremajaan armada lama sebanyak 14.628 unit dan pengadaan truk baru sebanyak 70.837 ribu unit senilai Rp 49 triliun. Kebijakan *zero odol* juga membuat biaya angkut logistik dalam industri perkebunan melonjak dua kali lipat menjadi Rp 32 triliun per tahun.

Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Boycke Garda Aria mengatakan, kebijakan *zero odol* ini menjadi

tantangan bagi industri pupuk yang harus menyediakan investasi besar dalam penyediaan truk. *Zero odol* ini akan menyebabkan jumlah rit juga naik 100%, yakni sebelumnya bisa dilayani 1.000 truk sekarang menjadi 2.000 truk dan tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Aryan Warga mengatakan juga mengatakan, dengan penerapan kebijakan *zero odol* ini akan ada penambahan 765 ribu truk baik untuk ukuran kecil, medium, dan besar yang harus dipersiapkan. "Nantinya akan terjadi peningkatan yang cukup besar dan pada tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai 1 juta truk dan apakah industri otomotif bisa menyiapkannya?" ujar dia. (dho)

Bank Mandiri Terbitkan Sustainability Bond US\$ 300 Juta

Sambungan dari hal 1

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, saat ini kondisi likuiditas perseroan cukup mendukung untuk tahun 2021 bahkan mencukupi sampai tahun 2022. Namun, dengan mempertimbangkan pengembangan bisnis jangka menengah 3 tahun dan 5 tahun, Bank Mandiri masih

memiliki plafon *global bond* US\$ 2 miliar dan telah direalisasikan US\$ 1,25 miliar, sehingga tersisa plafon US\$ 750 juta.

"US\$ 750 juta ini tentu dimanfaatkan dalam tahun 2020, di antaranya dalam rencana Bank Mandiri penerbitan *green bond* dengan *size* lebih kurang US\$ 300 juta di 2021 ini," terang Darmawan.

Pihaknya memaparkan, selain dalam dolar, perseroan juga

masih memiliki plafon obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 19 triliun yang berakhir pada Mei 2022.

"Rupiah juga masih punya ruang Rp 19 triliun obligasi melalui PUB sampai Mei 2022. Untuk rupiah kita masih kaji pelaksanaan untuk eksekusi mencari *timing* tepat, dengan mempertimbangkan likuiditas rupiah dan likuiditas pasar yang *ample*," jelas Darmawan.

Industri Daging Olan Minta Solusi Mahalnya Bahan Baku

JAKARTA – Pengusaha daging olahan yang tergabung dalam Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia atau National Meat Processor Association (Nampa) mengeluhkan harga daging kerbau di tingkat nasional yang melonjak hingga Rp 68 ribu per kilogram (kg) atau lebih mahal dari Malaysia. "Jadi, harga daging kerbau saat ini naik banyak dan mahal, padahal diimpor oleh BUMN. Ini harus dicari solusi bersama jangan sampai masyarakat terbebani menjelang Lebaran," kata Ketua Umum Nampa Ishana Mahisa, kemarin.

Harga daging kerbau dari Oktober 2020-29 Maret 2021 telah naik 30,76%, yakni dari Rp 52 ribu per kg menjadi Rp 68 ribu per kg. Produk daging kerbau juga melonjak, daging kerbau yang dijual di supermarket Indonesia lebih mahal sekitar Rp 20 ribu per kg dari harga di Malaysia. Nampa meminta pemerintah mencontoh apa yang dilakukan Malaysia yakni tidak mengenakan pajak untuk

daging impor demi menjaga harga dan ketersediaan. Pemerintah Indonesia juga belum secara maksimal menerapkan praktik *good corporate governance* untuk impor daging. Sebagai perbandingan, harga daging kerbau untuk keperluan konsumen Indonesia lebih mahal sekitar 17% dari Malaysia, daging kerbau potong untuk kebutuhan industri antara Malaysia dengan Indonesia memiliki selisih sangat besar di atas 50%. Karena itu, Nampa memandang pemerintah memerlukan regulasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan industri.

Pengusaha akan berinvestasi di industri pengolahan daging jika pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga stabil. Kenaikan harga bahan baku hingga mendekati 30% ini dipandang sebagai keadaan yang luar biasa. "Industri memerlukan kepastian pasokan bahan baku dan juga kestabilan, kita kalah jauh dengan Malaysia yang menurut Kilang Pemroses Daging yang berlokasi di Taman Medan Selangor Malaysia membeli daging kerbau jenis *slice* atau *trimming* sekitar Rp 41 ribu per kg," tutur Ishana. Sementara itu, Ketua Bidang Kemaritiman Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup BPP Hipmi Robert Muda Hartawan mengatakan, pemerintah perlu segera melibatkan pelaku usaha rumah potong hewan (RPH) untuk segera melakukan uji empiris untuk menghitung angka konversi yang lebih tepat dari ternak ke daging dengan melakukan proses uji penyembelihan berbagai jenis sapi maupun kerbau secara bersama-

sama. Bulog diharapkan dapat mempercepat proses importasi dan segera melibatkan mitra distributor untuk merencanakan distribusi daging kerbau ke masyarakat sampai Lebaran nanti. "Hal ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga berlebihan, serta pikiran negatif terhadap Bulog dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," jelas Robert.

Menurut dia, cara paling efektif menurunkan harga daging sapi dan kerbau dengan menjamin ketersediaan pasokan dan stok. Artinya, stok tersebut mesti terjaga dalam jangka pendek dan panjang. Kelancaran pasokan dan stok daging kerbau bisa menumbuhkan respon positif pasar. "Hipmi mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja luar biasa baik, jadi apapun yang sudah dilakukan kalau kita bisa bersama-sama berkontribusi sehingga hasilnya nanti bisa luar biasa apakah di sisi suplai maupun harga," ujar dia. (sny)

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspada Banjir

Oleh Imam Suhartadi

▶ JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar masyarakat mewaspada terjadi banjir, karena adanya bibit siklon tropis 94W di sekitar Pasifik Barat sebelah utara Papua.

Bibit siklon tropis 94W ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13-19 April 2021.

"Tanggal 12 April 2021 (07.00 WIB) terbentuk bibit siklon tropis 94W di sekitar Pasifik Barat sebelah utara Papua, tepatnya -5,8 LU -141,1 BT yang termasuk sebagai wilayah monitoring TCWC Jakarta," kata Deputy Meteorologi BMKG Guswanto dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut dia, tekanan minimum bibit siklon tropis 94W ini mencapai 1.007 hPa, dengan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 37 kilometer per jam.

Citra Satelit Himawari-8 kanal inframerah menunjukkan pertumbuhan awan konvektif yang cukup signifikan dalam 6 jam terakhir.

"Bibit 94 W berada di lingkungan yang cukup mendukung dengan suhu muka laut hangat (29-30 derajat Celsius), konvergensi level bawah lemah (10-20s-1), divergensi lapisan atas sedang (20-30s-1), vertikal shear lemah (5-10kt), dan vortisitas lapisan bawah sedang. Sirkulasi sistem ini terdeteksi di lapisan bawah hingga lapisan menengah (925-500 hPa)," katanya.

Namun, kata Guswanto, masih tampak melebar, terutama di lapisan 850 hPa dan 700 hPa. Model skala global menunjukkan bibit ini akan berpropagasi ke arah barat laut seiring dengan

peningkatan intensitasnya.

"Potensi 94W untuk mencapai intensitas siklon tropis lebat dalam 24 jam ke depan dalam kategori sedang," ujarnya.

Potensi hujan dengan intensitas lebat dalam 24 jam ke depan yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang akan terjadi di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Selain itu, wilayah dengan level waspada untuk potensi banjir/bandang dua hari ke depan berdasarkan prakiraan berbasis dampak adalah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Tinggi gelombang 1,25-2,5 meter, lanjut Guswanto, berpotensi terjadi di Laut Sulawesi bagian tengah dan timur, perairan utara Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaud, Laut Maluku, perairan utara dan timur Halmahera, Laut Halmahera, Samudera Pasifik utara Halmahera.

Tinggi gelombang 2,5-4 meter juga berpotensi terjadi di perairan Raja Ampat Sorong, perairan Manokwari, perairan Biak, Teluk Cendrawasih, perairan Jayapura-Sarmi, Samudera Pasifik utara Papua Barat.

Tinggi Gelombang 4-6 meter berpotensi terjadi di Samudra Pasifik utara Papua.

Karena itu, BMKG terus memantau perkembangan potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia.

"Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati pada potensi angin kencang dan hujan lebat yang masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah serta mewaspada potensi dampak seperti banjir, tanah longsor dan banjir bandang," kata Guswanto.

Pemda Diminta Waspada

Deputi Bidang Pencegahan Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi peringatan dini bencana.

BNPB menyampaikan pesan peringatan dini dan kesiapsiagaan ke-30 wilayah administrasi setingkat provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

"Serta menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan," ujar Lilik melalui surat tertulis ke 30 pemerintah daerah provinsi, dalam keterangan resminya yang diterima *Beritasatu.com*, Selasa (13/4).

Kedua, pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.

Ketiga, Lilik meminta koordinasi antardinas terkait dan aparat untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Upaya ini bertujuan un-



Vaksinasi Awal Puasa

Petugas menyuntikan vaksin Covid-19 kepada seorang lansia pada hari pertama bulan Ramadhan 1442 H di Rumah Sakit Dr Suyoto, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Kementerian Kesehatan tetap melangsungkan vaksinasi Covid-19 saat umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan yang didasari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 13 tahun 2021 tentang vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa.

tuk mencegah dampak yang mungkin timbul. Koordinasi menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi.

Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, per-

alatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Lilik juga meminta pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevaluasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.

"Mengaktifkan tim siaga ben-

cana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi," tambah Lilik.

Ia meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk memberikan informasi peringatan, berupa *Sigmat* dan *Aerodrome Warning*.

Masih terkait kesiapsiagaan,

Lilik mengatakan untuk mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.

Selanjutnya, Lilik mengingatkan, apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi. (b1)

HARI PERTAMA PUASA

Ribuan Guru di Tangerang Jalani Vaksinasi Covid-19

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang hingga kini masih terus menjalankan program vaksinasi Covid-19 dalam upaya menekan penyebaran kasus positif di wilayahnya.

Hal ini terlihat dari proses vaksinasi sekitar 2.500 guru dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang yang dijalani pada hari pertama bulan puasa.

"Hari ini kita laksanakan vaksinasi tahap dua bagi tenaga pendidik, karena ini bulan puasa jadi kami perketat pemeriksaan kesehatannya, setelah itu baru kita lakukan vaksinasi. Dan, kita lihat mereka tetap antusias menjalani vaksinasi meski sedang berpuasa," ungkap Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah di Tangerang, Selasa (13/4).

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Jamaluddin, vaksinasi yang dilakukan ini sebagai upaya mereka untuk persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) yang diwacanakan terlaksana pada bulan Juli 2021.

"Vaksinasi ribuan guru ini memang sengaja untuk mempersiapkan PTM di Kota Tangerang. Di mana sampai saat ini masih 40% yang belum divaksin. Mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan sudah ada kuota vaksin lagi, sebagai kesiapan kami dalam pelaksanaan PTM. Yang pasti kita akan terus mendata guru dan tenaga pendidik yang belum vaksin agar segera vaksin," tutur Jamaluddin.

Jamaluddin menyatakan, di Kota Tangerang proses pembelajaran daring masih terus dilaksanakan bagi siswa di Kota di Tangerang. Dan dirinya me-

astikan proses PTM akan segera dilaksanakan Juli 2021 bila kondisi sudah siap.

"Simulasi sedang kami siapkan SOP-nya (standar operasional prosedur) tentang infrastruktur di sekolah. Nanti dalam waktu dekat, baik SOP dan simulasinya, akan kami sampaikan," tandasnya.

Vaksinasi Bulan Ramadhan

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan program vaksinasi Covid-19 tetap akan dilakukan siang hari selama bulan Ramadhan dengan alternatif malam hanya akan dilakukan dalam kondisi tertentu.

"Pada pelaksanaannya vaksinasi akan tetap kita lakukan pada siang hari, tetapi sebagai alternatif karena di dalam fatwa MUI

juga sudah menyebutkan bahwa kita harus memperhatikan kondisi kesehatan," kata Nadia dalam diskusi virtual tentang vaksin di bulan Ramadhan dipantau dari Jakarta, Selasa (13/4).

Nadia mengatakan bahwa vaksinasi tidak memberikan dampak langsung terhadap seseorang yang berpuasa. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah efek samping yang muncul pada sebagian orang.

Sebagai alternatif terkait hal itu maka dapat dilakukan pemberian vaksinasi Covid-19 pada malam hari yang pelaksanaannya harus dijadwalkan dengan dengan koordinasi dengan pengurus masjid, RT/RW dan Puskesmas setempat. Alternatif itu merupakan salah satu langkah untuk mempercepat proses vaksinasi, terutama untuk orang lanjut usia. (b1/ant)

Kerugian Kebakaran Pasar Minggu Capai Rp 2 Miliar

JAKARTA – Kepala Sektor IX Pasar Minggu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan Mochamad Arief mengatakan, kerugian akibat kebakaran di Pasar Inpres, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (12/4) mencapai kurang lebih Rp 2 miliar.

Kebakaran terjadi di Blok C, yang memiliki lima lantai, yakni lantai basemen, lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga. "Kerugian kurang lebih Rp 2 miliar," ujar Arief kepada wartawan, Selasa (13/4).

Kebakaran tersebut, kata Arief, menghancurkan 389 tempat usaha, dengan perincian 268 tempat usaha di lantai basemen, 120 tempat usaha di lantai dasar, dan satu toko berada di lantai satu. Luas area terdampak sekitar 2.000 meter persegi. "Penyebab adalah korsleting listrik," ungkap dia.

Arief menjelaskan, awalnya seorang pedagang melihat adanya api di salah satu tempat usaha. Kemudian, pedagang tersebut memberitahukan pada pedagang lainnya, lalu dilakukan pemadaman oleh pedagang lainnya dan sekuriti tetapi gagal dan kemudian menghubungi petugas damkar.



"Kami tiba di lokasi pada pukul 18.35 WIB hari Senin kemarin, mulai pemadaman pukul 18.39 WIB dan selesai melakukan pemadaman Pukul 00.55 WIB. Kita kerahkan 31 unit berikut penunjang dan 116 personel untuk proses pemadaman tersebut," pungkas Arief.

Relokasi Pedagang

Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji

meminta PD Pasar Jaya selaku manajemen merelokasi pedagang korban kebakaran di Blok C ke blok lain yang masih bisa memadamkan di Pasar Inpres Pasar Minggu.

"Segera lakukan pendataan pedagang dan tempatkan di lokasi blok lain yang ada dan masih memungkinkan pedagang bisa tertampung," kata Isnawa Adji ketika meninjau Blok C Pasar Inpres Pasar Minggu, Jakarta

Sisa Kebakaran Blok C Pasar Minggu

Warga mengamati sisa-sisa kebakaran yang melanda gedung Blok C Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (13/4/2021). Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Helbert Pilder Lumba Gaol menjelaskan, kebakaran yang terjadi pada Senin (12/4) malam itu menghancurkan total 389 kios atau tempat usaha. Rinciannya, 268 di lantai basemen, 120 di lantai dasar, dan satu di lantai 1, mengakibatkan kerugian Rp 2 miliar, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Selatan, Selasa (13/4).

Ia juga meminta manajemen pengelola pasar tersebut untuk melarang para pedagang blok C memasuki gedung yang hangus terbakar itu karena dikhawatirkan struktur bangunan rapuh setelah dilalap api.

Isnawa menyebutkan, total ada 389 tempat usaha yang terbakar di Blok C dan sebagian besar merupakan pedagang sembako, ikan, dan daging. (b1/ant)

Presiden Jokowi Teken Keppres Cuti Bersama Dua Hari untuk ASN pada 2021

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi penetapan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk 2021 sebanyak dua hari, termasuk satu hari pada 12 Mei untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan 24 Desember 2021 terkait Hari Raya Natal.

"Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal," seperti dikutip dari salinan Keppres Nomor 7 Tahun 2021 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa

(13/4).

Pada diktum kedua Keppres tersebut, pemerintah menyatakan cuti bersama yang diberikan pemerintah tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN.

Sehingga pada diktum ketiga disebutkan bahwa ASN yang tidak mendapat hak cuti bersama karena jabatannya, akan mendapatkan penambahan hak cuti tahunan sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi diktum keempat Keppres yang ditandatangani Jokowi pada Jumat (9/4).

Adapun menjelang Idul Fitri, pemerintah telah resmi melarang kegiatan mudik pada 6 - 17 Mei 2021 untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Kementerian Perhubungan menghentikan operasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara selama masa pelarangan tersebut, terkecuali untuk beberapa kegiatan seperti pengiriman logistik, perjalanan dinas, kebutuhan darurat pelayanan kesehatan dan kepentingan mendesak lainnya.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyebutkan jika pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terdapat 81 juta masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menjelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. (nov)

Kadin Jakarta Minta Pengertian Pekerja Soal Pembayaran THR

JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai perlu adanya kelonggaran dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang masih mengalami kesulitan keuangan.

Dewi juga berharap para pekerja bisa memahami kondisi perusahaan yang saat ini masih mengalami kesulitan *cash flow*.

"Bila ada pengusaha yang terdampak pandemi sehingga tidak bisa beroperasi penuh selama 1 tahun atau hampir satu tahun, sehingga membuat kondisi *cash flow*-nya tidak baik, harapannya apabila tidak dapat membayarnya THR *full*, minta pengertian pekerja dengan hanya memberikan secara proporsional saja sesuai jumlah bulan operasional perusahaan di tahun 2020, dan jangan sampai perusahaan diberikan sanksi," kata Diana Dewi kepada *Beritasatu.com*,

Selasa (13/4).

Diana juga berharap segala permasalahan terkait pembayaran THR dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

"Yang diketahui kondisi perusahaan adalah pekerjaannya, sehingga apabila perusahaan tidak mampu agar dilakukan musyawarah bipartit antara pemberi kerja dan pekerja. Untuk pemerintah juga harus memaklumi itu dengan memberikan kelonggaran, dan tidak memberi sanksi ke perusahaan yang kondisinya tidak mampu," harap Diana.

Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para gubernur di

seluruh Indonesia. Menaker Ida meminta THR dibayar penuh dan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," ungkapnya. (b1)



Peluncuran Stranas PK

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

KSP: Pekan Ini, Jokowi akan *Reshuffle* Kabinet

Oleh Imam Suhartadi

► JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membenarkan kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan *reshuffle* kabinet atau perombakan kabinet. Ngabalin memperkirakan *reshuffle* kabinet akan dilakukan Jokowi pada pekan ini.

"Mudah-mudahan pekan ini. Kalau tidak aral melintang, ya pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi wartawan, Selasa (13/4).

Ngabalin mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya terhadap cara kerja Presiden Jokowi dalam mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu akan diambil bila Presiden sudah mengantongi persetujuan dari DPR.

Sementara, surat pemberitahuan tentang penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembentukan Kementerian Investasi serta Badan Riset dan Teknologi yang berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah dikirimkan Presiden Jokowi ke DPR pada 30 Maret 2021.

"Begini, kebiasaan yang sering kita ikuti dari cara bapak presiden mengambil keputusan itu, kalau sudah ada persetujuan dari DPR. Kayak kemarin, kan suratnya sudah dikirim tanggal 30 Maret 2021 tentang penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, serta Kementerian Investasi. Kalau itu sudah disetujui, ya *enggak* lama (keputusannya)," terang Ngabalin.

Ngabalin memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahliil Lahadalia menjadi Menteri Investasi.

Ngabalin mengungkapkan, Presiden Jokowi senang dengan

cara kerja Bahliil Lahadalia selama menjabat sebagai Kepala BKPM. Dengan demikian, Bahliil berpeluang akan dipilih menjadi Menteri Investasi.

"Presiden punya kewenangan, punya hak prerogatif. Tapi kalau dilihat dari gaya kerja pak Bahliil, kan kerjanya luar biasa tuh. Jadi yang begitu-begitu Presiden senang. Ya yang saya lihat dari kerjanya," ujar Ngabalin.

Terakhir Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang berpeluang dipilih menjadi Kepala BRIN, Ngabalin belum bisa memastikannya. Namun, saat ini Bambang sudah berpamitan dengan seluruh pegawai Kementerian Riset dan Teknologi, menyusul Presiden Jokowi telah mengusulkan pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi dan memisahkan BRIN dari kementerian tersebut.

"Kemarin sudah pamit di depan para pegawai Kementerian Riset ya. Itu (menjadi) Kepala BRIN) juga belum ada informasi sama sekali," terang Ngabalin.

Begitu juga dengan adanya isu Jokowi akan mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim setelah usulan Jokowi menggabungkan dua kementerian, yakni Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disetujui DPR. "Wah itu yang tidak diikuti. Mungkin Kamis saya tahu," tukas Ngabalin. Ia menambahkan, Presiden Jokowi selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Namun ketika ditanya tepat

nya kapan *reshuffle* kabinet itu dilakukan, Ngabalin mengaku tidak tahu secara rinci. Ia hanya menegaskan pada Kamis (15/4) pekan ini, diharapkan sudah mendapatkan informasi utuh mengenai *reshuffle* tersebut.

Seperti diketahui, isu *reshuffle* kabinet muncul ketika DPR RI menyetujui usulan pemerintah merombak sejumlah kementerian. Persetujuan diberikan lewat Sidang Paripurna DPR RI pekan lalu.

Lewat surat tertanggal 30 Maret, Jokowi mengusulkan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.

Optimalkan Kinerja Kementerian

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai penggabungan dua institusi itu wajar karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian di masa mendatang.

"Saya melihatnya wajar saja dan buat saya pribadi melihat hal ini baik karena Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurus Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Riset Dikti itu mengurus Pendidikan Tinggi. Kita tahu Pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi," ujar Qodari melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4).

Mengenai siapa yang bakal memimpin kementerian hasil peleburan itu, Qodari berpendapat Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat. Hal itu bisa dilakukan jika Presiden Joko Widodo merencanakan untuk merombak (*reshuffle*) kabinet.

"Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qou-

mas menjadi Menteri Agama," bebernya.

Qodari menambahkan, postur Kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).

"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof. Abdul Mu'ti ini akan menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," sambungnya.

Qodari memprediksi Muhammadiyah akan mendukung bila Prof. Abdul Mu'ti diangkat jadi Menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada *reshuffle* kabinet pada Januari 2021 kemarin. "Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu'ti jadi Mendikbudristek," beber Qodari.

Selain itu, kata Qodari sosok Prof. Abdul Mu'ti merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal itu relevan di tengah suburnya paham radikal, jadi sudah saanya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyediaan pemikiran toleran melawan radikalisme.

"Pendidikan jadi pintu menuju penyediaan pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu'ti. Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof. Abdul Mu'ti menggambarkan pemikiran Islam nya yang moderat dan toleran." Ungkapnya.

Lanjut Qodari, sudah saatnya Kementerian Pendidikan dikembalikan kepada Muhammadiyah yang sudah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020. (b1)

Firli Bahuri: KPK Sudah Tangkap 1.552 Koruptor di Indonesia

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut lembaga antikorupsi sejauh ini telah menangkap 1.552 orang karena melakukan korupsi, hingga hari ini. Sementara itu, kata Firli, masih ada ratusan juta orang baik di Indonesia.

"Yang tertangkap oleh KPK karena melakukan korupsi, itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih, warga negara Indonesia yang baik," kata Firli saat menjadi penanggap kegiatan peluncuran "Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022" yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Selasa (13/4).

Untuk itu, Firli menyayangkan perbincangan mengenai isu pemberantasan korupsi hanya terpusat pada segelintir orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK saja yang ramai dibicarakan. Padahal, kata Firli, masih banyak praktik baik yang perlu dikembangkan dan dijadikan kon-

sentrisi seluruh daerah.

"Praktik baik ini perlu dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh daerah. Karena jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai, sementara, masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik," kata Firli.

Firli berharap praktik-praktik baik dapat lebih dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia ketimbang harus ramai-ramai membahas orang-orang yang terjerat kasus korupsi.

"Praktik-praktik baik ini perlu dikembangkan, karena sesungguhnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dunia ini diisi oleh orang-orang baik, jadi yakinlah dunia ini diisi oleh orang baik. Kalau pun kita menemukan ada yang tidak baik, setidaknya, kita satu-satunya menjadi orang baik. Praktik baik harus kita kembangkan," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan siapa pun yang

masih nekat untuk korupsi akan dihukum tanpa pandang bulu.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam sambutan pada peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4).

"Jadi bagi siapa pun yang masih nekat korupsi, pasti akan 'disikat' tanpa pandang bulu," ujar Moeldoko sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.

Aksi Stranas PK 2021-2022 meliputi percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran.

Selain itu juga terdapat penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain. (b1)

BNN Gelar Rapat Persiapan untuk Sidang Internasional

JAKARTA - Komisi Khusus dalam Penanganan Permasalahan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang PBB (*United Nations Commission on Narcotic and Drugs-CND*), akan menggelar sidang internasional seluruh anggota, 12-16 April 2021 mendatang di Wina, Austria.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai delegasi yang akan mewakili Indonesia dalam pertemuan internasional tersebut, terus melakukan serangkaian persiapan. BNN pun telah melakukan berbagai pertemuan secara intensif dengan kementerian/ lembaga terkait.

Direktorat Kerja Sama Deputi Hukker BNN pun menggelar rapat yang dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan dari mitra kerja BNN. Rapat digelar di Hotel Ciputra Jakarta.

Para pejabat dan perwakilan yang hadir di antaranya Direktur TPPU BNN, Direktur PLRIP BNN, Direktur KIPS

Kementerian Luar Negeri, perwakilan Polri, perwakilan Kementerian Kesehatan, perwakilan BPOM, dan lain-lain.

Direktur Kerja Sama BNN Achmad Djatniko menyatakan, agenda dalam rapat persiapan kali ini yaitu memantapkan materi terkait implementasi traktat internasional tentang pengendalian obat-obatan, dan tindak lanjut implementasi komitmen-komitmen yang tercermin pada Declaration 2019 dalam tataran nasional, regional, dan internasional dalam menangani dan memberantas permasalahan narkoba di dunia. Dalam rapat itu juga dibahas mengenai pembahasan teknis terkait dengan pelaksanaan pertemuan ke-64 CND mendatang.

Isu

Sejalan dengan pernyataan di atas, Direktur Keamanan Internasional dan Peluncuran Senjata Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, mengatakan, BNN sebagai

delegasi Indonesia dalam pertemuan ke-64 CND harus memiliki persiapan matang dengan penekanan pada isu-isu yang menjadi prioritas nasional Indonesia.

"Kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang terdepan dalam isu-isu penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga diperlukan persiapan yang matang dan statement yang tajam dalam sesi pertemuan ke-64 CND," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Koordinator Fungsi Dewan Keamanan PTIR New York tersebut. Selasa (14/4).

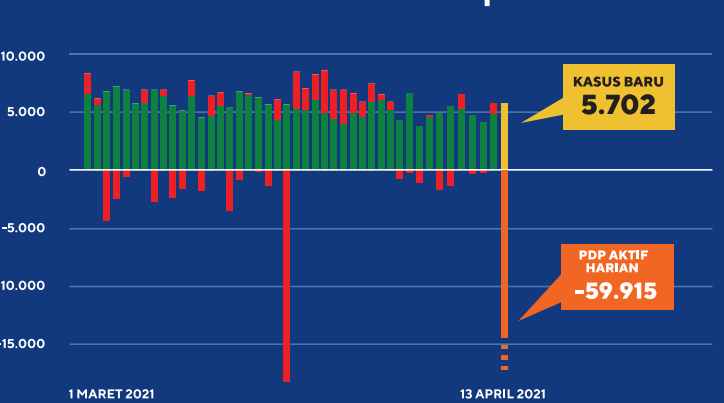
Di akhir rapat, Rolliansyah menambahkan, BNN sebaiknya tidak hanya menyampaikan capaian-capaian Indonesia dalam penanggulangan permasalahan narkotika, tetapi juga yang terpenting adalah turut aktif dalam membentuk norma internasional terkait narkotika dan obat-obatan terlarang. (b1)



Buka Puasa Pertama Pengungsi Gempa Malang

Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) membagikan nasi bungkus untuk buka puasa bagi para pengungsi gempa di Majangtengah, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/4/2021). Sebagian besar para pengungsi gempa Malang mengandalkan pembagian nasi bungkus dari dapur umum untuk berbuka puasa, karena dapur di rumah mereka telah hancur.

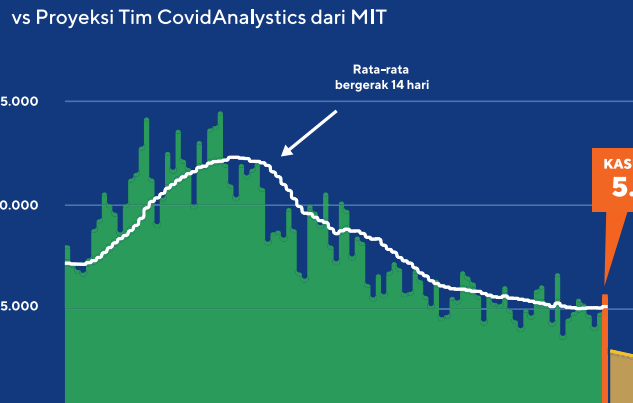
Data Kasus Baru Covid-19 dan Suspect Aktif Harian



Keterangan: Mulai tanggal 14 Juli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengganti istilah PDP dengan suspect dan menggabungkan data orang dalam pemantauan (ODP) dengan data suspect.

SUMBER: BERITASATU RESEARCH

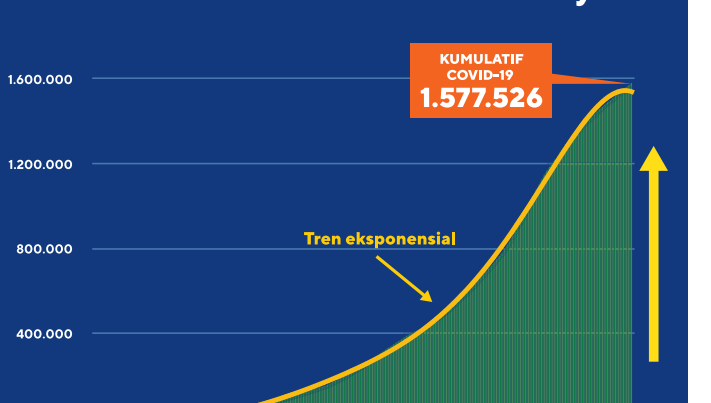
Kasus Baru Harian Covid-19 di Indonesia



Keterangan: Proyeksi dimutakhirkan pada tanggal 17 Maret 2021. Model memperkirakan jumlah kasus akan terus menurun sampai jumlah kasus baru mencapai 1.000-an kasus pada bulan Mei. Sebelumnya, dalam ramalan tanggal 21 Februari 2021 tim CovidAnalytics memperkirakan pandemi akan mencapai lebih dari 16.000-an kasus per hari pada bulan April.

SUMBER: MIT OPERATIONS RESEARCH CENTER

Kasus Kumulatif Covid-19 dan Trennya



SUMBER: BERITASATU RESEARCH

INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 15

REKOMENDASI

Victoria Sekuritas

IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 5.863-6.000 untuk perdagangan Rabu (14/4). Analisis merekomendasikan Buy ESSA (TP 400), ASSA (TP 2.080), INKP (TP 10.125), WSKT (TP 1.040), dan TOWR (TP 1.160). Mayoritas bursa Asia mencatatkan *rebound* pada perdagangan Selasa (13/4), diantaranya ASX 200 (+0,04%), HSI (+0,15%), KOSPI (+1,07%), Nikkei (+0,72%), dan SSEC (-0,48%). Pergerakan bursa Asia yang cenderung menguat terjadi menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) bulan Maret yang dijadwalkan hari Selasa waktu setempat (13/4).

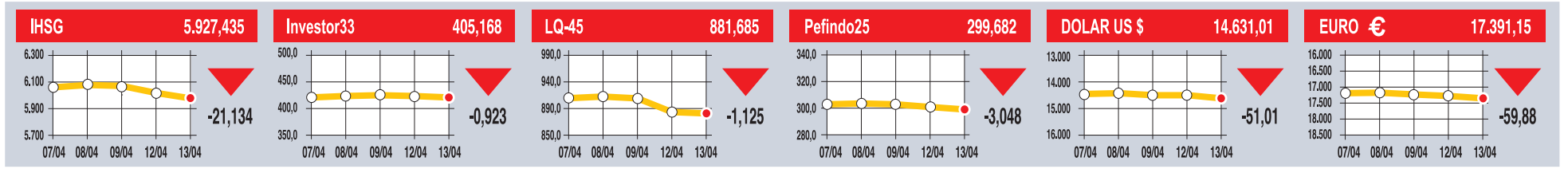
Artha Sekuritas

IHSG diprediksi menguat pada perdagangan hari ini dengan bergerak pada kisaran *support* 5.848-5.887 dan *resistance* 5.961-5.996. Secara teknikal terlihat *candlestick* membentuk doji di area *oversold* mengindikasikan trend pelemahan yang mulai terbatas sehingga ada potensi penguatan dalam jangka pendek. Namun perlu waspada pergerakan masih dibayangi sentiment negatif.

IHSG ditutup melemah di akhir penutupan kemarin. IHSG ditutup di level 5.927.43 (-0,35%). Pergerakan didorong oleh Property (-1,21%) dan Mining (-0,91%). IHSG ditutup melemah meskipun bursa Asia menguat. Pergerakan masih dibayangi kekhawatiran dampak dari inflasi Amerika Serikat dan kekhawatiran akan divestasi saham oleh BPJS serta pelemahan nilai tukar rupiah.

DISCLAIMER

Materi tulisan ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.



Smartfren Tukar Utang Jadi Saham Rp 3,9 Triliun

Oleh Farid Firdaus

► JAKARTA – PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) melakukan konversi atas sejumlah obligasi wajib konversi (OWK) menjadi saham perseroan dengan nilai transaksi Rp 3,9 triliun. Aksi ini membuat salah satu pemegang OWK tersebut, yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), menambah kepemilikan saham di Smartfren menjadi 19,9% dari sebelumnya 15%.

Smartfren melaksanakan konversi OWK II dan OWK III sebanyak 39 miliar saham seri C dengan harga pelaksanaan Rp 100 per saham. Pencatatan saham hasil konversi tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 12 April. Setelah transaksi ini, saham Smartfren yang tercatat di BEI seluruhnya mencapai 302,26 miliar saham.

Smartfren tidak menjelaskan detail pemegang OWK II dan III yang melakukan konversi. Namun, Dian Swastatika beserta anak usahanya menyatakan menukar OWK menjadi saham, yang membuat kepemilikan perseroan dan anak usaha di Smartfren bertambah menjadi 19,9%.

"Investasi ini akan dicatatkan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan nilai pasar saham tersebut," kata Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Susan Chandra dalam

keterangan tertulis, Selasa (13/4).

Selain Dian Swastatika, pemegang OWK II dan III Smartfren per 31 Desember 2020 antara lain Neat Action Finance Ltd, PT Nusantara Indah Cemerlang, PT Andalas Satria Permai, dan Cascade Gold Ltd.

Aksi penukaran OWK Smartfren telah melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Agustus 2020. Sebelumnya, perseroan melaksanakan konversi sebanyak 34 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 3,4 triliun pada September 2020. Adapun target konversi OWK yang ditargetkan adalah 80 miliar saham.

Sebagai catatan, OWK II diterbitkan Smartfren pada 2014 senilai Rp 3 triliun dan OWK III dirilis pada 2017 senilai Rp 5 triliun. Ketika itu, aksi ini merupakan strategi perseroan dalam menambah modal dan melakukan pelunasan

utang supaya rasio-rasio keuangan menjadi lebih baik. OWK yang diterbitkan pada 2017 mempunyai jangka waktu lima tahun sejak tanggal penerbitan.

Rights Issue

April ini, Smartfren juga bersiap menggalang dana senilai Rp 840 miliar dari penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *rights issue*. Perseroan akan menerbitkan hingga 7 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 120 per saham. Pada saat yang sama, perseroan juga menerbitkan waran seri III hingga 91,99 miliar. *Rights issue* ini telah meraih restu pemegang saham pada 2 Maret 2021.

Sesuai rencana, Smartfren akan menyerap sekitar 82% dan hasil *rights issue* untuk pembayaran utang bunga dan sisanya 18% akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha.

Smartfren menjadwalkan pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD pada 21 April dan pencatatan HMETD di BEI pada 22 April. Kemudian, perdagangan HMETD ditargetkan berlangsung selama 23-29 April.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan atau dilusi saham sampai maksimum 27,33%. Persentase ini dengan asumsi bahwa seluruh waran seri III yang diterbitkan dilaksanakan oleh pemegang waran seri III.

Tahun ini, Smartfren menganggarkan be-

lanja modal (*capital expenditure/capex*) sekitar US\$ 200-300 juta. Perseroan diperkirakan akan bergantung pada pendanaan eksternal untuk kebutuhan ekspansi maupun membayar utang jatuh tempo sepanjang 2021.

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings menilai, industri telekomunikasi Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi secara terus menerus agar tetap kompetitif, terutama karena jangkauan jaringan Smartfren masih tergolong terbatas dibandingkan tiga operator besar lain.

Fitch menilai, pengurangan investasi dapat mengakibatkan Smartfren menjadi tertinggal lebih jauh dibanding dengan kompetitor-kompetitornya yang lebih besar dan berdampak pada momentum pertumbuhannya, walaupun belanja modal pada dasarnya bersifat fleksibel.

Fitch mencatat, perseroan memiliki utang jatuh tempo sebesar US\$ 37,5 juta pada semester I-2021, dan US\$ 37,5 juta pada semester II-2021. Kemudian, arus kas bebas negatif Smartfren diprediksi akan bertahan dalam jangka menengah. Hal ini karena perusahaan berencana untuk mempertahankan belanja modal yang signifikan untuk memperkuat cakupan 4G *long-term evolution* (LTE).

"Kami memperkirakan arus kas dari operasi (*cash flow from operation/CFO*) Smartfren akan tetap tidak mencukupi untuk menutupi belanja modal tahunan yang diproyeksikan sekitar Rp 2-4,5 triliun untuk 2021-2023, meskipun Smartfren telah menunjukkan perbaikan CFO," jelas Fitch. (lov)



JII Terkoreksi

Pekerja melintasi layar pergerakan saham di Jakarta, kemarin. Jakarta Islamic Index (JII) terpantau berada di zona merah pada penutupan perdagangan sesi I Selasa, (13/4/2021), atau hari pertama bulan Ramadan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks yang beranggotakan 30 saham syariah paling likuid itu parkir di level 584,004, terkoreksi 0,84% atau 4,94 poin pada penutupan perdagangan sesi I.

Merger dengan Altimeter, Grab Siap Catat Saham di Nasdaq

JAKARTA – Grab Holdings Inc bersiap mencatatkan sahamnya di Nasdaq, Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama dengan *special purpose acquisition company* (SPAC), Altimeter Growth Corp. Transaksi tersebut akan membuat Grab meraih dana segar hingga US\$ 4,5 miliar.

Perusahaan baru hasil merger antara Grab dan Altimeter akan tercatat dengan kode GRAB di Nasdaq dalam beberapa bulan mendatang. Aksi ini berpotensi menjadi penawaran saham terbesar yang pernah ada oleh perusahaan Asia Tenggara di Bursa AS.

Nilai transaksi yang diusulkan Grab untuk proforma ekuitas awal sekitar US\$ 39,6 miliar dengan ukuran investasi swasta pada ekuitas publik (*private investment in public equity/PIPE*) senilai US\$ 4 miliar. Alhasil, dana tunai yang akan dikantongi Grab sekitar US\$ 4,5 miliar.

Group CEO and Co-founder Grab Anthony Tan mengatakan, pihaknya sangat bangga bisa mewakili Asia Tenggara di pasar publik global. Aksi ini adalah tonggak perjalanan perusahaan untuk membuka akses bagi semua orang mendapatkan manfaat dari ekonomi digital. "Aksi ini bahkan lebih penting karena wilayah kami pulih dari pandemi Covid-19. Itu juga sangat menantang bagi kami, tetapi sangat mengajari kami tentang ketahanan

bisnis," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4).

Anthony menjelaskan, strategi *super app* Grab yang terdiversifikasi membantu mitra pengemudi fokus pada pengiriman dan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitas. "Saat kami menjadi perusahaan publik, kami akan bekerja lebih keras untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas, karena ketika Asia Tenggara berhasil, Grab juga berhasil," jelas dia.

Sementara itu, *Founder and CEO* Altimeter Brad Gerstner mengatakan, sebagai salah satu perusahaan internet terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Grab membuka jalur digital ke depan bagi 670 juta warga Asia Tenggara. Pihaknya mengapresiasi Grab memilih Altimeter Capital Markets sebagai mitra untuk *go public*.

Asia Tenggara merupakan salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Populasinya kira-kira dua kali ukuran AS. Namun, penetrasi *online* untuk pengiriman makanan, mobilitas sesuai permintaan, dan transaksi elektronik hanya sebagian kecil dibanding AS dan Tiongkok.

Keputusan Grab menjadi perusahaan publik didorong oleh kinerja keuangan yang kuat pada 2020, sekalipun terjadi pandemi.

Grab membukukan *gross merchandise value* (GMV) sekitar US\$ 12,5 miliar pada 2020, melampaui tingkat pra-pandemi dan lebih dari dua kali lipat dibanding 2018.

Alur Transaksi

Sesuai dengan transaksi yang diusulkan, Altimeter Growth dan Grab akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk baru. Perusahaan gabungan tersebut diharapkan memiliki valuasi ekuitas secara pro-forma sekitar US\$ 39,6 miliar.

Pada penutupan transaksi, perusahaan gabungan diharapkan menerima sekitar US\$ 4,5 miliar dana tunai, termasuk lebih dari US\$ 4 miliar dari penawaran skema PIPE yang dinaikkan karena minat investor yang signifikan. Selain itu, Altimeter telah memberikan komitmen hingga US\$ 500 juta sebagai bentuk *contingent investments*. Adapun skema PIPE dipimpin oleh dana yang dikelola oleh Altimeter Capital Management senilai US\$ 750 juta.

Investor yang berpartisipasi dalam dana tersebut antara lain BlackRock, Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management), T. Rowe Price Associates, Inc, Fidelity International, Fidelity Management and Research LLC, Janus Henderson Investors, Mubadala, Nuveen, Permodalan Nasional Berhad, dan Temasek. (rid)

Aman untuk Semua

WANITA TANGGUH DAN MANDIRI SECARA FINANSIAL

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI*

GALILA MAHARIPAH
Head of Sales AXA Mandiri

JULIEN STEIMER
Country CEO AXA Indonesia, Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services, Presiden Komisaris PT Mandiri AXA General Insurance

ESRA MANURUNG
Survivor

ARIANA OCTAVIA
Influencer

NIHARIKA YADAV
President Director of AXA Financial Indonesia, Global Sponsor D&I of AXA Indonesia

HOST **ELLYZA HASAN** (Presenter BeritaSatu TV)

JUMAT, 16 APRIL 2021
PUKUL 13.30 - 16.00 WIB

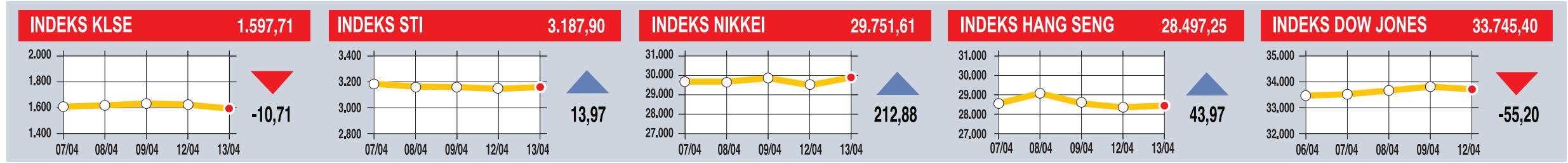
FREE E-SERTIFIKAT

TOP UP E-WALLET @ Rp. 200.000,- UNTUK PENANYA TERBAIK

FREE ONLINE REGISTRATION
brt.st/aus

* invited speaker

LIVE VIA ZOOM



Puradelta Lestari dan Permintaan Lahan Industri

Oleh Parluhutan Situmorang

Penjualan lahan industri masih menjadi penopang kinerja keuangan PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) sepanjang tahun ini. Terlebih, pemulihan ekonomi bakal mendorong permintaan lahan industri.



Analisis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano mengungkapkan, permintaan lahan industri Puradelta diprediksi tetap kuat tahun ini, meskipun realisasi tahun lalu sudah menunjukkan angka yang mengembirakan di tengah pandemi Covid-19. Hingga kini, perseroan mencatatkan permintaan lahan industri seluas 13 hektare (ha) atau setara dengan pendapatan Rp 240 miliar.

"Tingginya permintaan mendorong kami untuk merevisi naik target penjualan lahan industri Puradelta dari 80 ha menjadi 90 ha tahun ini. Rata-rata harga jual dipertahankan sebesar Rp 2,1 juta per meter persegi," tulis Victor dalam risetnya.

Penjualan lahan industri ditambah dengan penjualan properti rumah tinggal dan komersial, bisa mendorong penjualan pemasaran (*marketing sales*) perseroan mencapai Rp 1,9 triliun pada 2021. Angka tersebut masih di bawah target manajemen yang senilai Rp 2 triliun.

Meski demikian, revisi naik target penjualan lahan industri Puradelta membuat BRI Danareksa Sekuritas untuk mer-

evisi naik target harga saham DMAS menjadi Rp 250 dengan rekomendasi dipertahankan beli. Target harga tersebut merefleksikan perkiraan nilai aset bersih (NAV) sekitar Rp 687 per saham.

Rekomendasi beli dan target harga itu juga mempertimbangkan kuatnya neraca keuangan pengembang kawasan perkotaan terpadu modern Kota Deltamas tersebut, serta prospek penjualan lahan industri yang tetap cerah dan valuasi saham DMAS yang tergolong atraktif.

Adapun laba bersih Puradelta tahun ini diperkirakan turun menjadi Rp 1,15 triliun tahun ini dibandingkan tahun lalu Rp 1,34 triliun. Pendapatan perseroan diperkirakan meningkat menjadi Rp 2,17 triliun dibandingkan tahun 2020 senilai Rp 2,62 triliun.

Tahun lalu, perseroan membukukan kenaikan tipis laba bersih menjadi Rp 1,34 triliun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Rp 1,33 triliun. Sedangkan pendapatan perseroan turun tipis dari Rp 2,65 triliun menjadi Rp 2,62 triliun.

Pertumbuhan laba bersih di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia tersebut didukung oleh

tingginya realisasi penjualan lahan industri sepanjang 2021. Penjualan lahan industri menyumbang hingga Rp 1,9 triliun terhadap total pendapatan tahunan lalu. Penjualan tersebut dicatatkan pada kuartal IV-2021 yang berasal dari PT Parrot Smart Logistic Bekasi, PT Frisand Flag, dan PT Astra Hondar Motor.

"Realisasi laba bersih tersebut di atas target kami atau setara dengan 115% dari proyeksi. Pencapaian itu juga telah melampaui konsensus analis atau setara dengan 144%," jelas Victor.

Tahun ini, Puradelta membidik *marketing sales* senilai Rp 2 triliun. Nilai tersebut sama dengan target *marketing sales* perseroan sepanjang tahun 2020. Direktur Puradelta Lestari Tondy Suwanto menuturkan, target *marketing sales* diharapkan berasal dari penjualan lahan industri.

"Kami melihat bahwa potensi penjualan lahan industri tetap baik di tahun 2021, seiring dengan permintaan lahan industri yang masih tinggi walaupun masa pandemi belum berakhir. Oleh karenanya, target *marketing sales* sebesar Rp 2 triliun realistis untuk dicapai," tuturnya.



Prospek DMAS
BRI Danareksa Sekuritas
Rekomendasi : Buy
Target Harga : Rp 250
Harga Terakhir : Rp 234
Potensi Gain : 6,8%

Ringkasan Kinerja Keuangan Puradelta Lestari
(dalam miliar Rp)

	2019	2020	2021F	2022F	2023F
Pendapatan	2.650	2.629	2.179	2.192	2.427
EBITDA	1.288	1.383	1.171	1.146	1.292
Laba bersih	1.335	1.348	1.158	1.132	1.263
EPS (Rp)	27,7	28	24	23,5	26,2
Net margin (%)	50,4	51,3	53,1	51,6	52
PER (x)	8,5	8,4	9,8	10,1	9
PBV (x)	1,8	2,1	2	2	2
ROAA (%)	17,7	18,8	17,4	17,1	18,8
ROAE (%)	19,5	22,4	20,9	20,2	22,3
Net gearing (x)	-0,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,7
Kas akhir tahun	745	667	1.375	2.057	2.869
Aset	7.617	6.752	6.594	6.653	6.813

Sumber: BRI Danareksa Sekuritas

Peningkatan permintaan lahan industri, ungkap dia, didukung berkembangnya infrastruktur dan peningkatan kemudahan berinvestasi yang menjadi daya tarik Indonesia bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Hal ini menjadi sentimen positif bagi usaha pengembang kawasan industri secara umum, termasuk perseroan. "Pada awal tahun 2021, masih ada permintaan lahan industri yang cukup tinggi, terutama dari sektor otomotif dan *data center*," jelas Tondy.

Pada tahun 2020, Puradelta

Lestari telah menarik berbagai pelanggan industri berkelas dunia, termasuk dari sektor industri pangan, pergudangan, otomotif, hingga *data center*, dan menjadi pemimpin pangsa pasar untuk usaha pengembang kawasan industri.

"Kami harap bahwa dengan tren positif ini, kami dapat mempertahankan keunggulan kami sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri terdepan dan terpercaya di Indonesia," tambahnya. Selain pengembangan



Hongky Jeffry Nantung

Presiden Direktur PT Puradelta Lestari Tbk

Hongky menjabat sebagai presiden direktur perseroan sejak tahun 2016 dan kemudian ditetapkan kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 8 November 2019. Dia yang lahir di Tomohon pada 8 September 1962 ini meraih gelar *bachelor of engineering* dari University of Wollongong, New South Wales, Australia pada 1990. Sebelum menempati posisi saat ini, Hongky berkarier di PT Duta Pertiwi (1991-1996), kemudian menjabat sebagai *General Manager* Radjawali PDI Wisma Real Estate (1997-1998), dan *General Manager* PT Excelcomindo Pratama (1998-2002).

Dia kemudian kembali berkarier di PT Duta Pertiwi dan menjabat berbagai posisi, sebagai *General Manager* (2002-2003), Deputi Direktur (2003-2006), Direktur (2006-2010), dan Direktur *Property Management* (2010-2012). Hongky juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (2010-2015). Dia juga menjabat sebagai Direktur PT Duta Pertiwi Tbk (sejak 2010), CEO *Commercial Sinar-mas Land* (sejak 2012), dan Wakil Presiden Direktur PT Pembangunan Deltamas.

kawasan industri, Puradelta Lestari terus melanjutkan pengembangan kawasan hunian dan komersialnya dengan meluncurkan produk-produk hunian tahun 2021 dan juga melengkapi fasilitas-fasilitas komersial untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni di Kota Deltamas, termasuk pusat perbelanjaan, rumah sakit, serta fasilitas komersial lainnya yang menunjang gaya hidup modern.

Dana Kelolaan Industri Reksa Dana Terus Bertumbuh

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, dana kelolaan (*asset under management/AUM*) industri reksa dana hingga 7 April 2021 mencapai Rp 578,13 triliun, meningkat 0,18% dibandingkan akhir 2020 yang mencapai Rp 573,54 triliun.

Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II OJK Yunita Linda Sari menjelaskan, pertumbuhan dana kelolaan tersebut seiring dengan pertumbuhan jumlah produk reksa dana. "Hingga 7 April 2021, jumlah produk reksa dana mencapai 2.244 produk atau bertambah 1,26% dari akhir 2020 yang mencapai 2.219 produk," jelas dia dalam bahan presentasi pelatihan wartawan OJK yang dikutip *Investor Daily*, Selasa (13/4).

Adapun produk reksa dana tersebut paling banyak berupa reksa dana terproteksi sebanyak 867 produk, reksa dana pendapatan tetap sebanyak 320 produk, reksa dana saham sebanyak 272 produk, reksa dana pasar uang sebanyak 201 produk, dan reksa dana campuran sebanyak 196 produk. Sisanya adalah reksa dana syariah, reksa dana indeks, dan *exchange traded fund* (ETF).

Pertumbuhan dana kelolaan juga ditopang oleh pertumbuhan

investor individu (*single investor identification/SID*). Per Februari 2021, OJK mencatat jumlah investor mencapai 4,51 juta orang. Dari jumlah tersebut, investor reksa dana berkontribusi paling banyak sejumlah 3,82 juta orang atau bertumbuh 20,49% dari akhir 2020. Sementara, investor saham mencapai 2,05 juta orang dan investor SBN sebanyak 497,06 ribu orang.

Industri penunjang juga menjadi menopang pertumbuhan industri reksa dana. Per 1 April 2021, OJK mencatat ada 98 manajer investasi dan 69 Agen Penjual Reksa Dana (APERD) di tanah air. Di periode yang sama, jumlah Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) mencapai 24.572 orang dan bank kustodian sebanyak 24 entitas.

Lebih lanjut, pertumbuhan tidak hanya terjadi di industri reksa dana, namun juga dari sisi emiten yang tercatat di bursa. Hingga 1 April 2021, OJK mencatat ada 39 emisi dengan nilai sebesar Rp 39,01 triliun. Emisi tersebut paling banyak disumbang oleh penerbitan efek berjangka utang dan sukuk (EBUS) tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 24,86 triliun. Penyumbang lain-

nya adalah *rights issue* sebesar Rp 12,04 triliun dan penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*) saham sebesar Rp 2,11 triliun.

Dengan adanya penawaran umum tersebut, OJK mencatat sudah ada 724 emiten yang tercatat di bursa dan 9 perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan terbuka. Emiten tersebut berhasil membukukan kapitalisasi pasar sebesar Rp 7.173,15 triliun hingga 8 April 2021 atau meningkat 2,93% dari akhir 2020.

Tahun ini, OJK berharap kinerja pasar modal bisa bertumbuh positif, meski pandemi Covid-19 belum sepenuhnya usai. Tanda perbaikan kinerja pasar modal ini terlihat dari indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mulai memasuki tren bullish pada periode 2-11 November 2020. Perbaikan ini ditopang oleh kemenangan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) yang membawa dampak positif bagi bursa regional dan global.

Hingga 8 April 2021, IHSG sudah berada di atas level 6.000 atau sebesar 6.071. IHSG ini meningkat 1,55% dibandingkan akhir 2020. "Meskipun menguat,



RUPST Cahayaputra

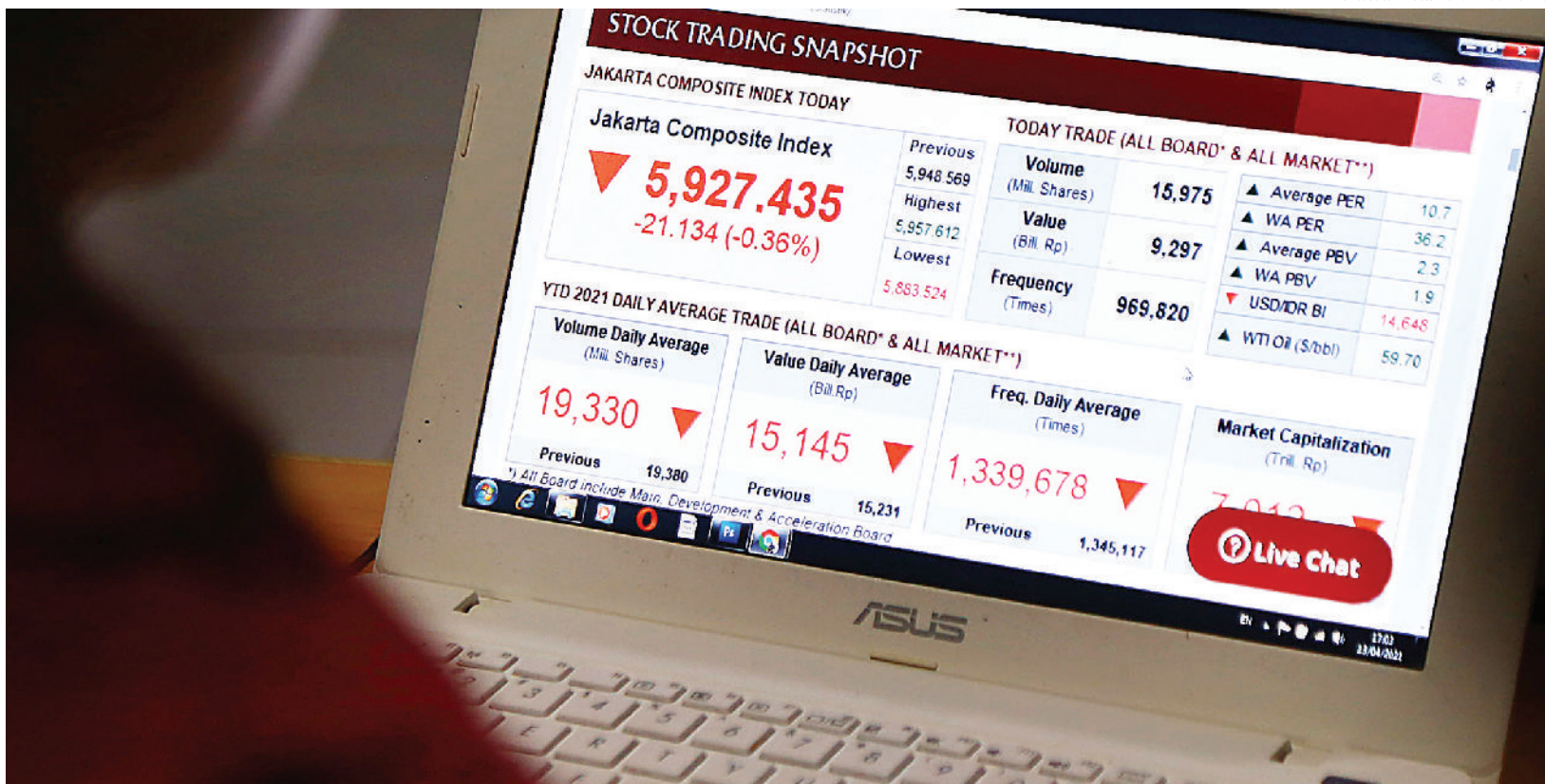
Direktur Utama PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Johan Silitonga dan Komisaris Utama Independen Theo Lekatompessa saat RUPST di Jakarta, kemarin. Perusahaan perdagangan dan industri keramik itu berhasil melalui tahun 2020 dengan performa yang cukup baik. Pada akhir 2020, perseroan berhasil mencatatkan pendapatan bersih Rp 217,01 miliar.

namun belum *flattening*nya kasus baru Covid-19 di Indonesia berpotensi menimbulkan shock bagi pergerakan pasar ke depan, meskipun koreksi

yang akan terjadi di pasar saham masih wajar," tulis Yunita.

OJK juga sedang meramu berbagai kebijakan untuk bisa menggerakkan kinerja pasar

modal itu. Adapun kebijakan strategis yang akan dikeluarkan tahun ini adalah perluasan produk dan aktivitas di pasar modal, implementasi *disorgement and disgorgement fund*, efisiensi *primary market* dan *secondary market*, notasi khusus di level broker, serta kebijakan lainnya. (git)



Investor Asing Net Sell

Investor melihat pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Jakarta, Selasa (13/4/2021). Indeks kemarin bergerak dalam rentang 5.883,52 - 5.957,61 dengan nilai transaksi Rp9,88 triliun. Sedangkan pemodal asing merealisasikan penjualan bersih (net sell) saham Rp 459,90 miliar.

Waskita Lepas Saham di 2 Ruas Tol

Oleh Nabil Al Faruq

JAKARTA — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR), telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (*conditional sale purchase agreement/CSPA*) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melakukan dua transaksi. Keduanya adalah transaksi konversi saham (*share swap*) dan divestasi dengan pembayaran tunai.

Berdasarkan keterangan tertulis perseroan, Selasa (13/4), aksi korporasi tersebut merupakan perjanjian divestasi 20% saham milik WTR di ruas tol Semarang-Batang (JSB) dan 34,99% saham milik WTR di Cinere-Serpong (CSJ) kepada SMI.

SMI merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur yang didirikan untuk menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. SMI memiliki 10,62% saham WTR.

Nilai transaksi konversi 10,62% saham SMI di WTR sebesar Rp 2,69 triliun yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui konversi 6,12% saham SMI di WTR sebesar Rp 1,55 triliun dengan dua badan usaha jalan tol (BUJT), yaitu 13,2% kepemilikan saham WTR di JSB yang setara dengan Rp 1 triliun dan

seluruh saham WTR di CSJ sebesar Rp 550 miliar.

Sisa 6,8% kepemilikan saham WTR atas JSB atau setara dengan nilai Rp 515 miliar akan diambil alih oleh SMI secara tunai dan dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian transaksi tahap pertama.

"Sementara, tahap kedua merupakan konversi atas 4,501% kepemilikan SMI di WTR sebesar Rp 1,14 Triliun yang akan dilakukan selambat-lambatnya setahun setelah transaksi tahap pertama selesai dilaksanakan," ujar *Director Business Development & QHSE* Waskita Karya Fery Hendriyanto.

Fery menambahkan, dalam CSPA tersebut, dilakukan dua kesepakatan antara Waskita dengan SMI untuk pembelian saham SMI di WTR dan WTR dengan SMI untuk pengambilalihan saham WTR di BUJT. Para pihak sepakat sebagian besar penggunaan transaksi



Fery Hendriyanto

jual beli saham pada BUJT JSB dan CSJ akan digunakan untuk konversi saham SMI di WTR kepada Waskita.

Sementara itu, Direktur Utama Waskita Toll Road Septiawan Andri menjelaskan bahwa setelah menandatangani CSPA, WTR masih harus melakukan pemenuhan persyaratan administrasi dan memastikan proses divestasi dilakukan secara proper dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebelum penandatanganan *sale purchase agreement* (SPA) antara WTR dengan SMI.

"Kegiatan divestasi tersebut merupakan strategi WTR untuk optimalisasi portofolio konsesi jalan tol yang dimiliki dan mendukung percepatan penyelesaian konstruksi jalan tol sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pemerintah dalam bidang

infrastruktur khususnya jalan tol," ujar Andri.

Sebagai informasi, ruas tol Semarang-Batang adalah salah satu ruas tol di Trans Jawa dan telah beroperasi penuh sejak bulan Desember 2018 sepanjang 75,00 km. Ruas ini merupakan jalur penting di Trans Jawa yang menghubungkan Jawa bagian Barat menuju Ibu Kota Jawa Tengah.

Sedangkan ruas Cinere-Serpong merupakan bagian dari jaringan jalan tol JORR 2 yang menghubungkan antara Jakarta dan Tangerang Selatan yang salah satu seksinya yaitu seksi I telah beroperasi sepanjang 6,59 km dari total panjang 10,14 km.

Program divestasi ruas tol Waskita terus berproses, dan pada tahun 2021 perseroan akan merealisasikan pelepasan kepemilikan saham di 9 ruas tol di Pulau Jawa dan Sumatra. Divestasi tersebut rencananya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Indonesia Investment Authority (INA) dan diharapkan dapat memperoleh pendanaan sebesar Rp 10-11 triliun.

Tak hanya dengan INA, rencana realisasi divestasi juga melalui skema tender terbuka kepada investor dalam dan luar negeri dan melalui skema RDPT. Dana tunai hasil divestasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan kewajiban kepada kreditor dan sebagai modal kerja menyelesaikan proyek tol yang sedang dikerjakan.

Waskita menargetkan nilai seluruh divestasi ruas tol tahun 2021 ini sebesar Rp10-11 triliun dengan pengurangan utang melalui dekonsolidasi jalan tol setidaknya sebesar Rp 20 triliun.

Perkuat Kinerja 2021, Cahayaputra Keramik Siapkan Strategi Bisnis

JAKARTA — Perusahaan perdagangan dan industri keramik, PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), akan menerapkan sejumlah strategi bisnis guna memperkuat kinerja pendapatan dan laba bersih pada 2021. Adapun kinerja sepanjang 2020, masih tetap positif meskipun tergerus dampak pandemi Covid 19.

Sekretaris Perusahaan Cahayaputra Asa Keramik Alex Dwi Adha mengatakan, strategi pertama adalah mengambil langkah efisiensi produksi untuk memaksimalkan laba perseroan. Langkah ini diambil sebagai respon atas berbagai kendala dan dampak yang timbul akibat kondisi pandemi sepanjang tahun lalu.

Kemudian, strategi dalam hal pemasaran dan produk, Cahayaputra Keramik akan terus memberikan inovasi pada produk-produk yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Perseroan juga akan memperluas jaringan distribusi dengan membidik gerai-gerai di kawasan yang masih banyak pengembangan proyek properti.

"Ini untuk lebih memperkuat jaringan distribusi dan kehadiran produk perseroan di pasar domestik," ujar Alex Dwi dalam siaran persnya kepada *Investor Daily*, Selasa (13/4).

Selanjutnya, strategi pemasaran perseroan akan berfokus pada pertumbuhan pasar dan membangun *brand image* guna meningkatkan pangsa pasar. Langkah ini guna mencermati produksi perseroan di pasar domestik sekaligus memfokuskan pada efisiensi produksi, sehingga dapat memproduksi keramik yang berdaya saing tinggi di pasar.

"Kami juga berfokus pada pengembangan produk terutama *design*/motif keramik yang dapat diterima atau *absorb* oleh setiap segmen yang ada," jelas Alex.

Dia menambahkan, perseroan juga akan memperluas jaringan penjualan terutama untuk divisi proyek, baik itu untuk perumahan sederhana maupun proyek perumahan segmen menengah. "Serta meningkatkan layanan pasca jual kepada konsumen melalui

distributor-distributor yang ditunjuk perseroan untuk dapat memenuhi tingkat kepuasan pelanggan," tegas Alex.

Masih Positif

Kemarin, Cahayaputra Asa Keramik telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) beserta Paparan Publik di Jakarta. Di tengah kondisi yang kurang menguntungkan, perseroan telah berhasil melalui tahun 2020 dengan performa yang cukup baik.

Pada akhir tahun 2020, perseroan berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 217,01 miliar, menurun sekitar 25,01% dari tahun 2019 sebesar Rp 289,38 miliar. Sejalan dengan itu, pandemi Covid-19 memicu turunnya pencapaian laba bersih tahun berjalan menjadi Rp144 juta per 31 Desember 2020, turun sebesar 93,03% dibanding Rp 2,06 miliar per 31 Desember 2019.

RUPST memutuskan menerima seluruh usulan yang diajukan perseroan yaitu mengenai Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020,

usulan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2020, usulan mengenai penentuan remunerasi, gaji honorarium beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kemudian, usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, dan usulan pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Cahayaputra Asa Keramik dalam perjalanan bisnisnya selama 2 dekade ini, telah menjadi salah satu perusahaan perdagangan dan industri keramik terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1995, Perseroan telah berkembang secara luas, tidak hanya melalui fasilitas produksi yang besar namun juga kualitas produk yang terpercaya.

Perseroan menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum saham perdana dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2018. (ely)

Satu Dekade, Pasar Modal Syariah Berkembang Sangat Masif

JAKARTA — Sejak tahun 2011 atau satu dekade, pasar modal syariah di Tanah Air telah mengalami peningkatan signifikan. Tak heran, pasar modal syariah semakin dilirik oleh investor yang tak hanya berasal dari kaum muslim.

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi menyatakan bahwa perkembangan pasar modal syariah berjalan sangat masif selama 10 tahun terakhir. Jumlah saham syariah sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 2011 sampai dengan Maret 2021 telah meningkat sebesar 83,1%. Bahkan yang lebih mengembirakan, jumlah investor syariah telah bertumbuh sebesar 17.191% sejak diluncurkannya *Shariah Online Trading System* (SOTS) pada tahun yang sama.

"Jumlah saham syariah meningkat 83% sejak tahun 2011, dari 237 saham menjadi 432 saham syariah atau

59% dari total saham. Kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 47,9% dari total kapitalisasi pasar dengan persentase total nilai transaksi saham syariah mencapai 60,4%," ujar Inarno dalam acara *Peringatan Satu Dekade Kebangkitan Pasar modal Syariah Indonesia* yang berlangsung secara virtual, baru-baru ini.

Adapun volume transaksi syariah saat ini telah mencapai 48,1%, serta frekuensi transaksi saham syariah yang mencapai 62,2% dari total frekuensi transaksi saham di BEI.

Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota bursa penyedia layanan *Shariah Online Trading System* (ABSOTS), sejak peluncuran pertama pada 2011, jumlah investor syariah telah meningkat dari sebelumnya hanya 531 investor menjadi 91.703 investor per Februari 2021.

Dengan adanya peningkatan sig-

nifikan tersebut, Inarno menyebut bahwa pasar modal syariah semakin menjadi pilihan investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. "Kami yakin pasar modal syariah Indonesia kedepannya akan semakin berkembang dan maju," ungkapnya.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi menambahkan, pertumbuhan investor syariah akan terus tinggi karena saat ini proporsinya masih sangat kecil dibandingkan dengan investor konvensional. Saat ini proporsi investor syariah terhadap total investor keseluruhan baru sekitar 4,5%. Untuk itu, dia menargetkan investor syariah bisa tumbuh setidaknya 30% setiap tahun. "Kami ingin dari waktu ke waktu ini meningkat, mudah-mudahan suatu saat nanti ada di tingkat minimum 10% dibanding total investor," katanya.

Untuk mengejar target tersebut, BEI, kata Hasan melakukan *kick-*

off program edukasi pasar modal syariah tahun 2021 yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Program tersebut terdiri dari kegiatan literasi, inklusi hingga *aktivasi* seperti SPMS, *Obrolan of The Day* (OOTD), Investasi Syariah Virtual (INSYAV), Kelas Aktivasi INSYAV (KASYAV), dan IDX *Islamic-Market Pit Stop* yang merupakan bagian dari program edukasi.

BEI juga kembali menyelenggarakan *IDX Islamic Challenge 2021* (I2C) yang telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2018. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2021 dan dilanjutkan pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2021. Pemenang I2C akan diumumkan pada acara *Sharia Investment Week 2021* yang akan diselenggarakan pada November tahun ini. (Iov)

Zebra Berharap Suspensi Saham Segera Dibuka

JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). Suspensi dilakukan bursa karena harga saham ZBRA melonjak signifikan.

Berdasarkan data RTI, ZBRA melonjak 630,4% sejak awal 2021. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, saham perusahaan taksi asal Surabaya ini melesat 865,52%. Sementara, jika dilihat dalam enam bulan terakhir, ZBRA meroket 1.580%. Saat ini, harga ZBRA berada di posisi Rp 840. Padahal, sebelumnya ZBRA masuk ke dalam kategori saham Rp 50.

Hal itu terjadi setelah Rudy Tanoesoedibjo masuk ke Zebra Nusantara melalui PT Trinity Healthcare (THC) dengan membeli sebanyak 665,18 juta saham Zebra Nusantara atau sebesar 77,7%. Setelah diakuisisi, Zebra Nusantara bakal mengambil alih 99% saham perusahaan distributor alat dan pasokan kesehatan, Dos Ni Roha (DNR Group) yang saat ini masih digegang oleh THC. DNR sendiri merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk-produk kesehatan dan peralatan medis di antaranya vitamin, *hand sanitizer*, *rapid test kit* (alat uji cepat Covid-19), hingga ventilator ke seluruh penjuru Indonesia mulai Sumatera hingga Papua.

Kuasa direksi Zebra Nusantara sekaligus Direktur Trinity Healthcare (THC) Rudy Tanoesoedibjo berharap BEI segera membuka suspensi saham perseroan. "Kami tidak jelaskan kenapa disuspen dan kami tidak tahu sampai kapan. Harapan kami segera dibuka, apalagi kami sudah melakukan *public expose* insidental untuk memberi informasi kepada para pelaku usaha," katanya dalam *public expose* insidental, di Jakarta, Selasa (13/4).

Berdasarkan keterangan BEI, perdagangan saham ZBRA pertama kali dalam bulan ini dihentikan sementara dalam rangka *cooling down* pada 1 April 2021 dan dibuka



Rudy Tanoesoedibjo

kembali pada 5 April 2021. Kemudian, penghentian sementara kembali dilakukan pada 7 April lalu untuk perdagangan tanggal 8 April 2021.

Sementara itu, bila dilihat dari laporan keuangan akhir tahun 2020, Zebra Nusantara mencetak pendapatan bersih sepanjang tahun 2020 lalu sebesar Rp 14,69 miliar. Namun, perusahaan masih membukukan rugi dan defisiensi modal. Jumlah tersebut menyusut 6,41% dari pendapatan bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp 15,70 miliar. Di sisi lain, beban usaha perseroan terpantau membengkak 10,70%, dari semula Rp 3,76 miliar menjadi Rp 4,17 miliar. Alhasil, perseroan membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 1,63 miliar dibandingkan tahun lalu yang terkoreksi Rp 996,48 juta.

Adapun liabilitas perseroan naik 18,05% menjadi sebesar Rp 17,30 miliar, yang terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp 14,88 miliar dan liabilitas jangka panjang Rp 2,42 miliar. Perseroan juga membukukan defisiensi modal dari yang semula Rp 9,08 miliar di akhir 2019 menjadi Rp 10,62 miliar di akhir 2020. Dengan demikian, total liabilitas dan defisiensi modal perseroan di akhir 2020 tercatat sebesar Rp 5,57 miliar. (Iov)

Soechi Lines Tuntaskan Pembayaran Tender Offer Obligasi Global

JAKARTA — PT Soechi Lines Tbk (SOCL) melalui anak usahanya, Soechi Capital Pte Ltd, menuntaskan pembayaran *tender offer* obligasi global atau *senior notes* sebesar US\$ 16,3 juta. Dengan pembayaran ini, jumlah obligasi global yang masih terutang sekitar US\$ 57,1 juta.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina menjelaskan, informasi mengenai pelaksanaan *tender offer* disampaikan pada 30 Maret 2021. Jumlah maksimal pelaksanaan *tender offer* adalah US\$ 20 juta. Proses *tender offer* dilaksanakan hingga 1 April, namun bisa diperpanjang atau diselesaikan lebih awal.

Pada 9 April 2021, perseroan sudah menuntaskan pembayaran *tender offer* sebesar US\$ 16,3 juta kepada pemegang obligasi global atas US\$ 20,3 juta pokok obligasi global yang terutang. "Dengan selesainya pembayaran *tender offer* ini, jumlah obligasi global yang masih terutang adalah US\$ 57,1 juta," ungkap Paula dalam keterangan resmi, Selasa (13/4).

Selanjutnya, perseroan *tender offer* ini selesai, Paula berharap bisa mendukung kegiatan usaha perseroan dan entitas anak usaha dalam jangka panjang. Hal ini baik dari segi kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2020, Soechi Lines juga menuntaskan pembayaran *tender offer* sebesar US\$ 85,8 juta. Dengan pembayaran itu, jumlah pokok obligasi yang masih terutang adalah US\$ 77,5 juta. Adapun total jumlah pokok obligasi yang terutang mencapai US\$ 122,51 juta. Jumlah ini mewakili 61,3% dari total *outstanding* obligasi

global sebesar US\$ 200 juta.

Bersamaan dengan pelaksanaan *tender offer* ini, Soechi juga meraih persetujuan investor untuk mengemendemen syarat dan ketentuan (*consent solicitation*) atas *senior notes* 2023. Persetujuan yang diraih mencapai 66,7% atau mewakili US\$ 133,40 juta surat utang.

Sebagai informasi, tujuan dari *consent solicitation* adalah untuk memudahkan pencairan pinjaman yang digunakan untuk pembelian kembali. Semula, Soechi menargetkan nilai *senior notes* 2023 yang bisa dibeli kembali maksimal US\$ 140 juta. Adapun *senior notes* tersebut memiliki tingkat bunga 8,375% per tahun. Transaksi ini bagian dari strategi perseroan mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Soechi resmi meraih fasilitas sindikasi US\$ 180 juta pada 4 Desember. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) bertindak sebagai pemberi pinjaman awal dan *joint mandated lead arranger* dan *bookrunners*.

Paula mengatakan, fasilitas sindikasi akan digunakan untuk pembiayaan atas pembelian kembali surat utang beserta *fee* kepada investor yang menyatakan persetujuan.

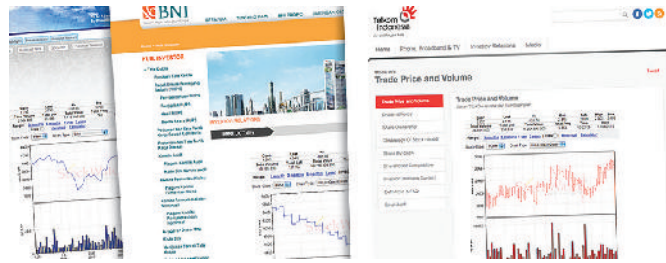
Selain itu, pinjaman juga akan digunakan untuk membayar utang sindikasi bank yang merujuk pada perjanjian US\$ 180 juta *senior secured facilities agreement* tanggal 16 Agustus 2016. Ketika itu, perseroan menandatangani perjanjian dengan Standard Chartered Bank, Bank Mandiri, dan Standard Chartered (Hong Kong) Ltd. (git)



Penguatan Sektor Saham

Karyawan melintas di depan monitor perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Pelemahan indeks dipicu atas penurunan sebagian besar sektor saham, seperti sektor konstruksi anjlok 1,21%, sektor barang konsumsi 0,91%, sektor pertambangan 0,93%, dan sektor keuangan 0,65%. Sedangkan penguatan pada saham sektor infrastruktur 1,06%, sektor pertanian 0,99%, sektor aneka industri 0,23%, dan sektor industri dasar 0,04%.

18 FINANCIAL DATA



Stock Widget Pilihan Tepat Emiten Indonesia.

Gunakan Stock Widget untuk Menampilkan Informasi Harga Saham Perusahaan Anda di Website.

Desain Menarik, Warna Sesuai Identitas Perusahaan dan Bebas Memilih Informasi yang Ingin Ditampilkan.

Informasi lebih lanjut hubungi (021) 5151669 atau email: sales@limas.com



PERDAGANGAN SAHAM BURSA EFEK INDONESIA

13 APRIL 2021

KODE	NAMA SAHAM	HARGA SAHAM (Rp)		▲/▼ (Rp)	VOL	NILAI (Rp)	KAPITALISASI PASAR
		SBL	PNT				
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	30.325	30.000	-325	23.842.300	715.821.185.000	732.253.797.000.000
BKRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4.210	4.160	-50	109.258.700	455.599.575.000	507.987.383.900.000
TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	3.310	3.330	20	51.300.200	170.429.186.000	329.877.181.278.000
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6.300	6.300	0	38.163.500	239.270.882.500	291.059.999.987.400
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	6.325	6.225	-100	12.975.200	80.568.802.500	237.483.750.000.000
ASII	Astra International Tbk.	5.075	5.075	0	53.505.400	272.425.610.000	205.454.032.185.500
TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	10.950	10.825	-125	1.171.900	12.674.912.500	193.047.856.814.500
HMSF	H.M. Sampoerna Tbk.	1.345	1.335	-10	30.753.700	40.971.987.500	155.284.632.661.500
ARTO	Bank Jago Tbk.	10.725	10.550	-175	5.841.800	61.520.305.000	144.721.603.125.000
EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	2.330	2.310	-20	13.855.400	32.229.113.000	141.366.267.695.730
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	7.000	7.000	0	6.945.900	48.635.385.000	114.786.000.000.000
BNNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	5.850	5.800	-50	18.308.500	106.090.697.500	107.800.585.379.400
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	8.650	8.625	-25	2.735.700	23.577.050.000	100.583.956.500.000
BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	2.270	2.270	0	11.720.400	26.574.973.000	92.207.004.956.400
SMMA	SinarMas Multiartha Tbk.	14.300	14.225	-75	500	7.112.500	90.580.030.599.325
BRPT	Barito Pacific Tbk.	960	950	-10	29.123.400	27.822.239.000	88.719.389.012.050
UNTR	United Tractors Tbk.	21.425	22.525	1.100	466.600	99.867.462.500	84.021.293.938.400
GGRM	Gudang Garam Tbk.	36.825	36.375	-450	1.793.900	65.505.782.500	69.988.701.000.000
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.510	1.490	-20	22.230.800	33.220.558.000	69.843.931.943.900
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	9.925	10.500	575	12.297.800	126.531.190.000	62.280.960.000.000
MEGA	Bank Mega Tbk.	8.750	8.975	225	28.900	256.512.500	61.874.890.587.325
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	6.600	6.575	-25	7.908.500	52.024.872.500	57.731.304.237.500
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.	1.090	1.125	35	124.522.900	138.926.637.500	57.391.453.125.000
BNLI	Bank Permata Tbk.	2.070	2.050	-20	107.800	221.270.000	56.912.739.216.650
MYOR	Mayora Indah Tbk.	2.540	2.530	-10	2.280.000	5.651.164.000	56.567.510.304.250
ANTM	Aneka Tambang Tbk.	2.250	2.270	20	111.017.700	251.814.948.000	54.549.835.925.750
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.	2.130	2.360	230	116.057.600	269.070.943.000	53.470.118.690.200
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	9.375	9.675	300	15.030.600	143.356.487.500	52.931.759.954.175
MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	2.180	2.140	-40	39.321.500	84.440.933.000	49.016.380.744.100
DNET	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	3.280	3.250	-30	2.800	9.044.000	46.098.000.000.000
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	12.225	12.225	0	4.676.100	56.997.327.500	45.003.057.520.275
INCO	Vale Indonesia Tbk.	4.460	4.370	-90	12.066.800	52.974.668.000	43.421.800.206.400
BYAN	Bayan Resources Tbk.	12.275	12.275	0	200	2.455.000	40.916.668.712.500
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	970	950	-20	3.909.000	3.747.752.500	39.448.276.615.000
MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	2.600	2.620	20	22.861.800	59.617.007.000	37.325.435.690.000
ADRO	Adaro Energy Tbk.	1.180	1.160	-20	61.790.200	72.021.606.500	37.103.715.920.000
TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	7.425	7.150	-275	7.687.700	54.737.925.000	35.750.000.000.000
ISAT	Indosat Tbk.	6.350	6.525	175	9.280.000	60.799.840.000	35.456.416.087.500
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	9.875	9.900	25	13.735.700	133.812.835.000	30.820.913.343.000
BNLI	Bank Maybank Indonesia Tbk.	418	408	-10	26.594.300	10.885.001.800	30.745.833.035.688
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.170	4.110	-60	1.316.600	5.413.597.000	29.829.850.632.000
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	1.230	1.180	-50	199.391.700	232.558.302.000	28.604.979.671.280
PTBA	Bukti Asam Tbk.	2.460	2.460	0	27.946.200	68.581.687.000	28.340.821.755.000
DCII	DCI Indonesia Tbk.	11.750	11.200	-550	6.000	66.922.500	26.697.954.080.000
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	1.050	1.060	10	4.359.800	4.547.622.000	26.733.108.221.500
BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	2.700	2.670	-30	1.375.800	3.691.536.000	25.834.432.300.470
MKPL	Metropolitan Kentjana Tbk.	27.025	27.025	0	0	25.624.942.850.000	0
MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.	2.250	2.180	-70	284.900	623.987.000	25.536.618.450.980
JFPA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	2.170	2.110	-60	27.063.800	57.294.514.000	24.743.073.674.110
IREN	Smartfren Telecom Tbk.	8.800	8.810	10	335.230.300	27.001.370.800	24.483.266.041.320
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.450	1.405	-45	47.450.800	66.150.276.000	24.095.750.000.000
SCMA	Surya Citra Media Tbk.	1.625	1.620	-5	13.119.600	21.142.069.500	23.942.127.907.620
PWON	Pakuwon Jati Tbk.	4.998	4.940	-58	124.107.800	61.260.876.200	23.790.843.585.600
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	1.140	1.120	-20	19.260.400	21.596.234.000	23.711.929.709.440
POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk.	3.060	2.850	-210	702.900	2.007.091.000	23.708.647.295.000
PNNB	Bank Pan Indonesia Tbk.	1.005	980	-25	9.590.300	9.478.367.000	23.360.893.078.040
SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	770	765	-5	12.790.500	9.752.607.500	22.950.000.000.000
BTPN	Bank BTPN Tbk.	2.870	2.800	-70	50.000	140.325.000	22.584.952.490.800
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	3.110	2.900	-210	31.969.100	94.828.190.000	22.117.322.700.000
EXCL	Capital Financial Indonesia Tbk.	408	404	-4	12.149.500	4.917.765.200	22.008.406.451.572
CASL	XL Axiata Tbk.	2.070	2.040	-30	18.775.300	38.481.368.000	21.878.336.543.040
AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agri Niaga Tbk.	1.010	995	-15	78.254.400	77.763.533.000	21.175.116.173.040
CTRA	Ciputra Development Tbk.	1.070	1.070	0	23.500.000	24.877.715.500	19.859.524.634.790
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	0.880	865	-15	465.000	400.371.000	19.649.146.267.680
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	9.050	9.050	0	7.400	66.997.500	19.068.350.000.000
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	9.975	9.825	-150	1.564.800	15.451.690.000	18.910.062.871.725
UJWJ	Fajar Surya Wisesa Tbk.	7.600	7.600	0	0	18.831.954.781.200	0
FALU	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.	1.510	1.510	0	680.200	1.027.433.500	17.445.827.280.000
BANK	Bank Net Indonesia Syariah Tbk.	3.060	3.370	310	90.445.500	295.876.396.000	16.850.000.000.000
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1.615	1.605	-10	74.760.400	119.233.166.500	16.826.980.500.000
BKBP	Bank KB Bukopin Tbk.	498	490	-8	72.287.800	35.436.456.100	15.929.960.990.790
SRTG	Saratoga Investama Seadaya Tbk.	5.800	5.850	50	2.654.500	15.365.815.000	15.870.856.950.000
BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	1.595	1.600	5	17.802.300	28.458.466.500	15.358.925.206.400
GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2.550	2.550	0	0	15.000.000	15.000.000.000.000
MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	950	950	0	16.886.400	16.056.212.500	14.297.298.324.500
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	575	565	-10	13.731.600	9.855.317.000	14.201.970.657.380
HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.	4.570	4.700	130	1.221.700	5.651.902.000	13.996.600.000.000
LPRK	Lippo Karawaci Tbk.	197	197	0	11.874.200	2.319.869.900	13.966.909.618.693
KAFF	Kimia Farma Tbk.	2.540	2.490	-50	2.116.100	5.267.609.000	13.829.459.997.510
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	985	1.005	20	99.822.600	98.539.881.500	13.641.820.755.000
SMRA	Summarecon Agung Tbk.	940	930	-10	6.590.500	6.117.952.500	13.416.906.962.400
HRUM	Harum Energy Tbk.	4.990	4.900	-90	3.438.500	16.980.092.500	13.247.738.000.000
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	11.900	11.700	-200	2.755.200	32.442.012.500	13.220.122.500.000
SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	1.770	1.725	-45	175.900	305.546.000	13.218.502.500.000
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	790	780	-10	14.769.700	11.279.630.000	12.948.000.000.000
KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.	630	660	30	66.427.700	42.645.555.000	12.768.621.954.000
MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	1.360	1.360	0	0	12.488.807.845.200	0
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	3.130	3.110	-20	4.764.800	14.814.410.000	12.485.701.201.200
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	1.620	1.670	50	1.396.100	2.293.734.000	12.323.899.085.970
WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.370	1.370	0	31.917.200	44.093.301.000	12.288.833.379.640
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	790	800	10	18.579.600	14.775.155.000	11.892.274.480.800
BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	685	720	35	36.133.100	25.378.170.000	11.496.323.246.400
TINS	Timah Tbk.	1.515	1.515	0	43.490.900	65.713.799.500	11.283.346.482.810
DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	236	234	-2	30.280.600	7.098.210.000	11.278.357.997.400
CARE	Metro Healthcare Indonesia Tbk.	340	338	-2	145.957.900	49.156.558.200	11.238.500.000.000
SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	6.900	6.875	-25	749.100	5.208.745.000	11.177.138.671.875
POWR	Cikarang Litrindo Tbk.	700	690	-10	2.364.300	1.639.936.500	11.100.137.640.000
TRIO	Trikomsel Oke Tbk.	426	426	0	0	11.079.192.718.770	0
SMAR	Smart Tbk.	3.870	3.830	-40	10.900	41.821.000	11.000.500.591.780
CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1.980	1.985	5	13.400	26.350.000	10.781.027.113.260
BSIM	Bank SinarMas Tbk.	630	620	-10	682.200	4.152.590.000	10.714.034.529.480
RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk.	298	292	-6	22.300	6.697.200	10.629.131.785.000
CITA	Cita Mineral Investing Tbk.	2.690	2.600	-90	600	1.592.000	10.296.939.250.000
LIFE	Asuransi Jiwa SinarMas MSIG Tbk.	4.200	4.900	700	900	3.926.000	10.290.000.000.000
IPTV	MNC Vision Networks Tbk.	250	246	-4	5.375.500	1.323.095.400	10.212.455.497.794
DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	12.500	12.500	0	0	9.631.904.000.000	0
LINK	Link Net Tbk.	3.290	3.360	70	5.491.800	18.347.930.000	9.620.336.826.240
STP	Siantar Top Tbk.	7.275	7.275	0	100	727.500	9.530.250.000.000
LISIP	PP Londo Sumatra Indonesia Tbk.	1.275	1.330	55	12.957.200	16.664.147.000	9.074.409.073.450
CENT	Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2.280	2.220	-60	161.147.500	45.460.545.800	9.043.204.821.000
BINA	Bank Ina Perdana Tbk.	1.550	1.575	25	781.900	1.221.253.500	8.816.584.218.750
IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	6.450	6.450	0	0	8.713.336.779.150	0
KPIG	MNC Land Tbk.	109	108	-1	18.790.100	2.034.260.100	8.707.578.479.712
PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.	2.450	2.450	0	0	8.697.500.000.000	0
SSMS	Sawit Sumber						

9 FINANCIAL DATA INVESTOR DAILY

REKSA DANA

13 APRIL 2021

Table with columns: NAMA REKSA/DANA, NILAI AKTIVA BERSIH, 30 HARI TERAKHIR, 1 TAHUN TERAKHIR, RIL 1 TAHUN, NAMA REKSA/DANA, NILAI AKTIVA BERSIH, 30 HARI TERAKHIR, 1 TAHUN TERAKHIR, RIL 1 TAHUN, NAMA REKSA/DANA, NILAI AKTIVA BERSIH, 30 HARI TERAKHIR, 1 TAHUN TERAKHIR, RIL 1 TAHUN. The table lists various investment funds and their performance metrics.

21 FINANCIAL DATA

INVESTOR DAILY

INDONESIA GOVERNMENT BOND CURVE

13 APRIL 2021

PRODUK INSURANCE LINKED (Harga per Unit)

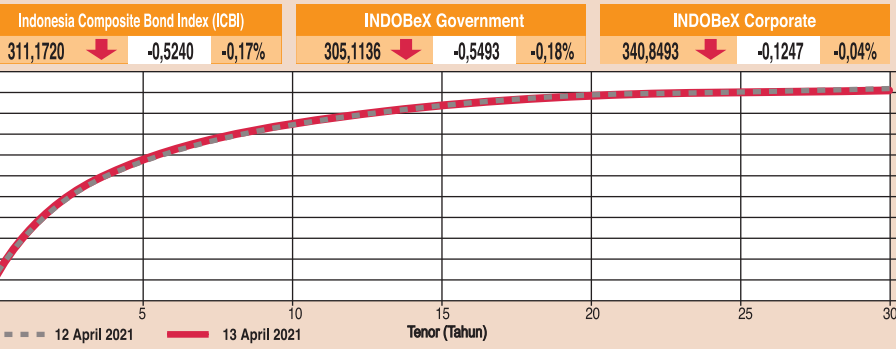
13 APRIL 2021



PENILAI HARGA EFEK INDONESIA (PHEI) INDONESIA GOVERNMENT BOND YIELD CURVE & INDONESIA BOND INDEXES

13 April 2021

(INDOBEx) - Total Return



Obligasi Negara Ritel & Sukuk Negara Ritel

Table with columns: Nama Obligasi, Seri, Kupon, Jatuh Tempo, TTM, Fair Price (%), Change (bps), 13 April 2021, 12 April 2021, Change.

SAHAM PENCETAK GAIN TERBESAR 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

SAHAM PENCETAK LOSS TERBESAR 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

VOLUME SAHAM TERBESAR 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

NILAI TRANSAKSI TERBESAR 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

KURS TRANSAKSI BI 13 APRIL 2021

Table with columns: MATA UANG, NILAI, KURS JUAL, KURS BELI.

SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS 1 OKT 2020-29 JAN 2021

Table with columns: BANK UMUM, RUPIAH, US\$, BPR, RUPIAH, 8,50%.

SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA 13 APRIL 2021

Table with columns: NAMA BANK, 1 Bulan (Rp/US\$), 3 Bulan (Rp/US\$), 6 Bulan (Rp/US\$), 1 Th (Rp/US\$).

DAFTAR SAHAM PEFINDO25 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SEBELUM, PENUTUPAN, VOLUME, NILAI.

JAKARTA-BBI

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 12 April 2021:

Table with columns: KOMODITAS, BULAN, HARGA PENYELEKSIAN, PERUBAHAN, VOLUME.

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 13 April 2021:

Table with columns: Komoditas, Bulan, Harga Penyeleksi, Perubahan, Volume.

VOLUME SAHAM TERBESAR 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

NILAI TRANSAKSI TERBESAR 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

SAHAM TERAKTIF 13 APRIL 2021

Table with columns: KODE, NAMA, SBL, PNT, PRB, PRB%, VOLUME, NILAI, FREK.

LAP. TRANSAKSI OBLIGASI KE BEI 12 APRIL 2021

Transaksi Obligasi Korporasi

Table with columns: NAMA OBLIGASI, TANGGAL PEL, TANGGAL PENIT, TANGGAL TRANS, TIPS, TTM, HARGA BIOP, HARGA BID, VOL, VAL (Ml Rp), YIELD, KUPON, RAT.

Transaksi Obligasi Pemerintah

Table with columns: NAMA OBLIGASI, TANGGAL PEL, TANGGAL PENIT, TANGGAL TRANS, TIPS, TTM, HARGA BIOP, HARGA BID, VOL, VAL (Ml Rp), YIELD, KUPON, RAT.

Resume Laporan Perdagangan

Table with columns: SERI, TIPE, TRANS, JATUH TEMPO, TTM, TERHANGGAI, TERENDAH, PENUTUPAN, FREK, VOLUME, TOTAL.

Large table listing various insurance products with columns for product name, price per unit, and date.

Lippo Karawaci Dukung Percepatan Vaksinasi Tenaga Pendidik

JAKARTA – PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) mendukung percepatan program vaksinasi untuk tenaga pendidik dengan menggelar vaksinasi di beberapa mal di bawah naungannya. Hal ini melibatkan dua lini bisnisnya, yaitu PT Lippo Malls Indonesia (LMI) sebagai penyedia lokasi vaksinasi dan PT Siloam Hospitals International Tbk (Siloam Hospitals Group) dalam dukungan tenaga medis.

Percepatan vaksinasi tenaga pendidik ini tak lepas dari rencana pemerintah yang akan kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru mendatang, yaitu Juli 2021. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah melakukan uji coba belajar tatap muka pada 7-29 April 2021 dengan melibatkan 85 sekolah yang sudah lolos penilaian dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Dalam kunjungannya ke lokasi vaksinasi tenaga pendidik di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, 12 April 2021, CEO PT Lippo Karawaci Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Siloam Hospitals International Tbk, John Riady menegaskan pihaknya mendukung sekaligus membantu rencana pemerintah melakukan percepatan vaksinasi kepada tenaga pendidik dengan tujuan agar PTM bisa berjalan dengan aman.

"Tenaga pendidik yang divaksin di Lippo Mall Kemang merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan mereka terlebih dahulu mendaftar menggunakan aplikasi My Siloam. Kami berharap bisa melakukan vaksinasi sebanyak seribu per hari di Lippo Mall Kemang guna membantu rencana pemerintah," ungkap John dalam keterangan pers yang diterima

Investor Daily, Selasa (13/4).

Vaksinasi tenaga pendidik di pusat perbelanjaan yang dikelola oleh LMI dimulai pada 31 Maret 2021 di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, dengan kuota 5.482 peserta dan di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, dengan kuota 5.400 peserta. Vaksinasi tenaga pendidik di kedua mal tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Sebelumnya, pada 1-8 April lalu, layanan vaksinasi terhadap tenaga pendidik juga telah dilakukan di Lippo Plaza Ekolokasari Bogor dengan kuota 6.000 tenaga pendidik SMP dan SMA Kota Bogor.

"Penyediaan lokasi vaksinasi di pusat perbelanjaan yang dikelola oleh LMI dan dukungan tenaga medis yang berasal dari Siloam Hospitals Group merupakan bentuk kepedulian Lippo Karawaci untuk menyukseskan program vaksinasi yang telah dicanangkan

oleh Pemerintah. Kita bersama-sama secara maksimal berupaya memberikan kontribusi agar rencana pemerintah yang akan kembali menggelar PTM pada tahun ajaran baru mendatang dapat terlaksana," tegas John.

Lippo Karawaci sebelumnya juga telah terlibat dalam menyukseskan program vaksinasi untuk lanjut usia (lansia), pedagang, UMKM, dan saat ini sedang berlangsung vaksinasi untuk tenaga pendidik/guru di 66 layanan vaksinasi, di antaranya di 28 mal dengan dukungan tenaga medis dari Siloam Hospitals Group dan 38 layanan vaksinasi di 38 RS Siloam di beberapa wilayah di Indonesia.

Hingga 11 April 2021, tercatat sebanyak 72.370 Lansia dan berbagai segmen masyarakat telah melaksanakan vaksinasi di mal-mal yang disediakan oleh Lippo Karawaci. (iif)



CEO PT Lippo Karawaci Tbk. John Riady (kanan) bersama Perwakilan Lippo Malls Indonesia Henry Riady (kiri), CEO PT Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin (kedua kiri) berbincang dengan guru yang mengikuti vaksinasi di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Senin, 12 April 2021. Penyediaan lokasi vaksinasi di pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Lippo Malls Indonesia dan dukungan tenaga medis yang berasal dari Siloam Hospitals Group merupakan bentuk kepedulian PT Lippo Karawaci Tbk untuk menyukseskan program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Sergio Ramos Positif Covid-19

Oleh F Rio Winto

► JAKARTA – Pemain Real Madrid, Sergio Ramos yang sedang cedera otot kini positif menderita Covid-19. Real Madrid mengumumkan kabar tersebut Selasa (13/4) pagi waktu setempat. Ramos kini menjalani isolasi mandiri hingga negatif Covid-19.

Musim 2020-2021 menjadi periode sulit bagi Ramos. Peristiwa ini menambah panjang daftar kesulitan Ramos sepanjang musim ini. Mantan bek Sevilla tersebut hanya tampil 20 kali dari 41 pertandingan yang sudah dilakoni timnya dalam seluruh kompetisi.

Ramos terakhir kali merumput menghadapi Atalanta pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, 16 Maret lalu.

Ramos paling cepat baru bisa membe-la Real Madrid pada laga Liga Spanyol kontra Real Betis, 24 April mendatang. Selain masalah fisik, Ramos belum

mengetahui kepastian mengenai masa depan. Kontraknya dengan Real Madrid habis akhir musim ini.

Sosok berusia 35 tahun itu ingin terus memperkuat Los Blancos, tapi manajemen enggan menuruti permintaan gajinya. Menjelang laga leg kedua perempat final melawan Liverpool, Kamis (15/4), Ramos pun terpaksa absen. Dia sedang fokus untuk pemulihan kesehatannya.

Persaingan Tim Elite
Real Madrid yang sebelumnya menang 3-1 atas Liverpool dalam leg

LIGA CHAMPIONS

Hasil Leg I Perempat Final

Rabu (7/4)	
Manchester City vs Borussia Dortmund	2-1
Real Madrid vs Liverpool	3-1

Kamis (8/4)

Bayern Muenchen vs Paris Saint-Germain	2-3
FC Porto vs Chelsea	0-2

Jadwal Leg II

Rabu (14/4)	
02.00 WIB	Chelsea vs Porto
02.00 WIB	PSG vs Bayern Muenchen
Kamis (15/4)	
02.00 WIB	Borussia Dortmund vs Manchester City
02.00 WIB	Liverpool vs Real Madrid

pertama perempat final, Rabu (7/4), bakal kembali bertarung dengan Liverpool dalam leg kedua, Kamis

(15/4).

Hasil pertandingan dalam leg kedua ini bakal menentukan tim yang lolos ke semifinal. Perjuangan berat harus dihadapi Bayern Muenchen dan Liverpool. Sebab, mereka sebelumnya mencatatkan hasil buruk.

Juara bertahan Liga Champions Bayern Muenchen harus menelan kekalahan dalam leg pertama perempat final. Bayern Muenchen harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain (PSG) 2-3 di Allianz Arena.

Hasil tersebut tentu saja membuka peluang PSG lolos ke semifinal. Apalagi, leg kedua bakal dimainkan di kandang mereka di Parc de Princes.

Dalam laga lain, Manchester City juga berhasil memaksimalkan laga di kandang. Manchester City mengalahkan Borussia Dortmund 2-1. Hasil mengembirakan juga diraih Chelsea saat bertandang ke markas Porto. The Blues menang 2-0. Hasil itu tentu menjadi modal bagus saat menjalani leg kedua di Stamford Bridge, 14 April.

Dwayne Johnson Calonkan Diri Jadi Presiden AS

LOS ANGELES - Bintang *Fast & Furious*, Dwayne Johnson akan mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) apabila mendapat cukup dukungan dari masyarakat AS. Aktor berusia 48 tahun ini belakangan disebut-sebut akan mencoba untuk memasuki Gedung Putih.

"Saya memiliki tujuan untuk menyatukan negara. Namun, apabila hal ini yang diinginkan rakyat, saya akan melakukannya," kata salah satu aktor dengan bayaran tertinggi dan paling populer di AS seperti dikutip Reuters.

Mantan pegulat profesional itu tidak mengatakan partai mana yang akan diwakili atau kapan dia akan mengajukan tawaran untuk Gedung Putih.

Pernyataannya tersebut berdasarkan jajak pendapat publik online yang dirilis pekan lalu oleh perusahaan tren konsumen Pipsay. Hasilnya menemukan bahwa sekitar 46% orang Amerika akan mempertimbangkan untuk memilih Johnson.

Johnson yang juga dikenal sebagai *The Rock* mengatakan, dirinya merasa tersanjung oleh jajak pendapat tersebut.

"Saya tidak berpikir Bapak Pendiri kita pernah membayangkan enam-empat, botak, bertato, setengah Hitam, setengah Samoa, minum tequila, mengemudi truk pick-up, pria yang mengenakan tas pinggang bergabung dengan klub mereka. Tetapi jika pernah kebetulan itu akan menjadi kehormatan saya untuk melayani masyarakat," katanya dalam sebuah posting Instagram.

Johnson yang karyanya mencakup franchise film *Jumanji* dibuat ulang dan acara TV *Young Rock*, bergabung dengan daftar panjang selebriti Amerika yang mencalonkan diri untuk jabatan politik di AS, termasuk sebelumnya Donald Trump. Sedangkan, aktor *Magic Mike* Matthew McConaughey dan mantan juara Olimpiade, Caitlyn Jenner dilaporkan masing-masing mempertimbangkan akan menjadi calon gubernur di Texas dan California. (iif)

Godzilla vs Kong Raup US\$ 13,4 Juta di AS

LOS ANGELES - *Godzilla vs Kong* menduduki puncak box office di wilayah Amerika Serikat dan Kanada setelah meraup pendapatan tertinggi sebanyak US\$ 13,4 juta pada akhir pekan kedua peluncurannya.

Angka itu membuat pendapatan total mereka menjadi US\$ 69,5 juta. Angka itu tergolong mengesankan lantaran film ini hadir di tengah-tengah pandemi global.

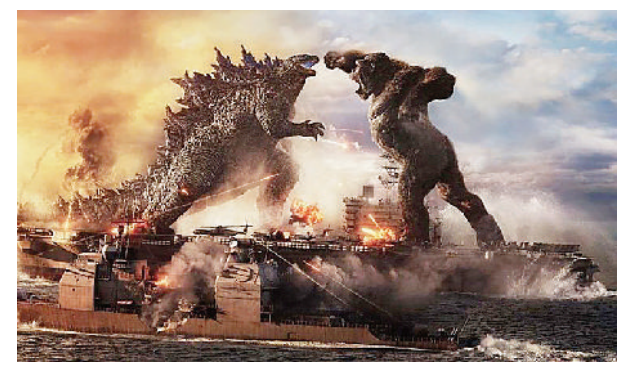
Kinerja komersial yang kuat dari rilis *Legendary* dan Warner Bros menjadi lebih penting karena terjadi pembatasan kapasitas di bioskop diberlakukan, dan juga karena film tersebut tersedia di HBO Max. Film ini turun 58% dibandingkan dengan pendapatan akhir pekan perdana penayangannya sebesar US\$ 32,2 juta.

Warner Bros merilis seluruh daftar 2021 di HBO Max pada saat yang sama mereka debut di bioskop sebagai konsesi untuk virus corona dan cara untuk meningkatkan layanan streaming. *Godzilla vs Kong* sekarang menjadi film berpenghasilan tertinggi di era pandemi, melampaui *Tenet* Christopher Nolan yang menghasilkan US\$ 58,4 juta.

Nobody dari Universal, sebuah thriller aksi yang dibintangi Bob Odenkirk berada di urutan kedua, dengan pendapatan US\$ 2,6 juta. Total pendapatan film ini sekarang mencapai US\$ 15,6 juta setelah tiga pekan dirilis.

The Unholy Sony tampaknya siap untuk merebut tempat ketiga dengan sekitar US\$ 2,4 juta, mendorong totalnya menjadi US\$ 6,7 juta. Film horor ini berkisah tentang seorang gadis muda dengan gangguan pendengaran yang dapat mendengar dan berbicara setelah kunjungan yang seharusnya dari Perawan Maria. Namun, kabar baik tidak berlangsung lama, karena peristiwa mengerikan menyertai keajaiban yang tampak nyata.

Raya and the Last Dragon dari Disney berada di tempat keempat dengan US\$ 2,1 juta, mendorong pendapatan total dari fitur animasi tersebut menjadi US\$ 35,2 juta. *Raya and the Last Dragon* juga tersedia di Disney Plus. Sedangkan film berjudul *Voyagers* meraup US\$ 1,3 juta untuk melengkapi lima besar. (iif)



Godzilla vs Kong

52% Masyarakat Gunakan Dana Darurat untuk Kebutuhan Ramadan

JAKARTA - *Head of Corporate Communication* OVO Harumi Supit mengatakan 52% orang menggunakan dana darurat, baik yang ditarik dari tabungan ataupun investasi. Hal itu dilakukan dengan alasan memenuhi kebutuhan saat Ramadan.

Tidak hanya itu, sebanyak empat dari sepuluh orang melenceng jauh dari rencana awal terkait perencanaan keuangan saat Ramadan. Survei itu juga menemukan bahwa 43% orang menggunakan seluruh Tunjangan Hari Raya (THR) untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Sayangnya, hanya empat dari sepuluh orang yang menyimpan THR untuk tabungan jangka panjang," ungkap Harumi di sela peluncuran OVO *virtual media gathering*, Selasa (13/4).

Berdasarkan survei tersebut, kata Harumi, sebanyak 50% orang akan tetap memberikan THR, walaupun tidak dapat bertemu saudara dan kerabat. THR tersebut akan dibagikan melalui transfer. Sedangkan, tidak mendapat THR menjadi kekhawatiran terbanyak yang dipilih responden terkait Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Terakhir, mayoritas responden memilih untuk menyalurkan THR sebagai hadiah untuk orang lain, kebutuhan sehari-hari, ditabung dan berinvestasi.

Sementara itu, perencanaan keuangan Lolita Setyawati CFP, mengungkapkan, membengkaknya dana yang harus dikeluarkan selama Ramadan karena adanya gaya hidup. Gaya hidup ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang selalu membeli camilan atau takjil untuk berbuka puasa. (iif)

linknet

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LINK NET TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021.

Pemanggilan untuk Rapat Perseroan akan dilakukan pada tanggal 29 April 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat dilakukan dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa") dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 14 April 2021
Direksi Perseroan

FIRST

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT FIRST MEDIA TBK

Direksi PT First Media Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021.

Pemanggilan untuk Rapat Perseroan akan dilakukan pada tanggal 29 April 2021 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2021 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat Perseroan jika memenuhi persyaratan Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 April 2021

Direksi
PT First Media Tbk

MANDALA FINANCE

PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)

Direksi Perseroan memberitahukan, akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut "rapat" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Mei 2021

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk "rapat-rapat" akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021.

Yang berhak hadir dalam "rapat-rapat" tersebut adalah :
1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2021 pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian / Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan harus diterima Direksi Perseroan per tanggal 22 April 2021.

Informasi Tambahan
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eAGY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 28 Mei 2021.

Jakarta, 14 April 2021
PT Mandala Multifinance Tbk
Direksi



Pertumbuhan Kredit BTN Syariah

Pegawai membantu pengurusan rekening kepada nasabah di UUS BTN di Jakarta, baru-baru ini. Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masih mencatatkan pertumbuhan pembiayaan atau kredit di tengah pandemi Covid-19. Realisasi kredit UUS BTN tumbuh hingga 12,6% secara tahunan per Februari 2021.

JAGA UMKM DAN EKONOMI NASIONAL

Bank Mandiri Leverage Dana PEN Jadi Rp 66,6 Triliun

Oleh Thomas E Harefa

► JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat telah menyalurkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke sektor riil padat karya serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian dalam negeri. Sampai akhir tahun 2020, penyaluran kredit PEN dari Bank Mandiri mencapai Rp 66,6 triliun, atau me-leverage empat kali lipat dari penempatan dana pemerintah.

Demi menjaga perekonomian nasional yang terkena imbas pandemi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah program PEN melalui perbankan. Salah satu bank BUMN yang menjadi mitra penyalur program bantuan tersebut adalah Bank Mandiri. Secara total, pemerintah menepatkan dana PEN senilai Rp 15 triliun di Bank Mandiri. Dana tersebut dikelola dan ditempatkan dalam bentuk deposito dengan tenor 110 hari dan suku bunga sebesar 2,84%.

"Bank Mandiri berkomitmen kuat untuk memanfaatkan momentum dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Antara lain melalui, aktivitas penyaluran kredit PEN sebesar Rp 66,6 triliun kepada lebih dari 268.000 debitur," papar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, baru-baru ini.

Angka persis PEN Bank Man-

diri mengalir ke 268.859 debitur. Dari jumlah itu mayoritas untuk sektor UMKM, yakni 265.520 debitur senilai Rp 42 triliun. Sisanya ke non-UMKM sebanyak 3.339 debitur dengan nilai Rp 24,6 triliun.

Dari sisi sektor usaha, dana sebesar itu dibagi-bagi kepada beberapa sektor. Nilai terbesar yakni Rp 23,4 triliun atau 35% ke sektor perdagangan. Lalu Rp 16,5 triliun atau 25% ke sektor pengolahan, Rp 8,5 triliun atau 13% kepada sektor pertanian dan kehutanan, Rp 4,5 triliun (7%) untuk sektor konstruksi, dan Rp 13,7 (20%) triliun untuk sektor lainnya.

Berdasarkan wilayahnya, kredit PEN dari Bank Mandiri paling banyak disalurkan ke wilayah Jawa mencapai Rp 42,9 triliun atau 64% dari total kredit PEN. Kredit itu mengalir kepada 162.948 debitur atau 61% dari total debitur.

Menyusul wilayah Sumatera menca-



Darmawan Junaidi

pai Rp 12,6 triliun (19%) kepada 57.210 debitur (21%). Kalimantan mencapai Rp 4,7 triliun (7%) kepada 15.640 debitur (6%), Sulawesi dan Maluku Rp 3,6 triliun (5%) kepada 18.904 debitur (7%), Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 2,1 triliun (3%) kepada 11.168 debitur (4%), dan Papua Rp 800 miliar (1%) kepada 2.989 debitur (1%).

Dukungan perbankan dalam menyalurkan dana PEN ini sangat krusial. Sebab, imbas dari pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan berbagai kebijakan pembatasan sosial, membuat roda bisnis sebagian besar sektor usaha menjadi terganggu. Tak bisa dihindarkan, dampaknya turut menekan industri perbankan nasional, lantaran cicilan kredit yang disalurkan juga tersendat.

Untuk mendukung pelaku usaha khususnya di segmen UMKM, Bank Mandiri mendukung program relaksasi dan restrukturisasi kredit. Sepanjang 2020, realisasi restrukturisasi kredit bagi terdampak Covid-19 di Bank Man-

diri mencapai Rp 123,4 triliun kepada 543.758 debitur. Dari jumlah 62% di antaranya merupakan debitur UMKM atau setara Rp 33,9 triliun.

Sedangkan restrukturisasi kepada non-UMKM mencapai Rp 89,6 triliun kepada 206.939 debitur. Oleh karena itu, posisi baki debit kredit restrukturisasi Bank Mandiri sampai akhir 2020 sebesar Rp 93,3 triliun.

Lagi-lagi, demi menyangga ekonomi rakyat, Bank Mandiri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mendirikan UKM Center. Penyaluran KUR tahun 2020 menjangkau 276.818 debitur di seluruh Indonesia dengan total kredit Rp 24,76 triliun.

Rinciannya wilayah barat yakni Sumatera dan Jawa dengan limit Rp 19,2 triliun untuk 219.833 nasabah. Lalu wilayah tengah terdiri atas Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara dengan limit Rp 2,8 triliun kepada nasabah 30.374. Dan wilayah timur terdiri atas Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan limit Rp 2,7 triliun untuk 26.611 nasabah.

Dari sisi sektor, terbanyak ke sektor perdagangan sebesar Rp 10,09 triliun. Lalu sektor pertanian dan perikanan Rp 7,39 triliun, jasa produksi termasuk pertambangan Rp 5,16 triliun dan industri pengolahan Rp 2,12 triliun. Total debitur KUR kumulatif sampai Desember 2020 mencapai 1,84 juta debitur. Adapun total limit kumulatif sampai Desember 2020 mencapai Rp 97,5 triliun.

Sedangkan pengembangan UKM Center untuk membantu pemulihan dampak pandemi. Layanan perbankan ini menjangkau para pelaku usaha di wilayah yang memiliki potensi UKM. Saat ini ada lima Mandiri UKM Center, yang berlokasi di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, Bandung, dan Solo.

Asuransi Umum Bayar Klaim Rp 1,6 Miliar Terkait 11 Gempa

JAKARTA – Industri asuransi umum membayarkan klaim sebesar Rp 1,6 miliar berkaitan dengan 11 kejadian gempa bumi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Kontributor terbesar nilai klaim dicatatkan atas gempa bumi di wilayah Sukabumi, Bengkulu, dan Yogyakarta.

Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia (Maipark) Ahmad Fauzie Darwis menjelaskan, terjadi 1.737 kejadian gempa bumi dengan magnitudo di atas 4 di seluruh wilayah Indonesia dari data *United States Geological Survey*. Sebelas kejadian gempa bumi di antaranya menimbulkan klaim bagi industri asuransi.

"Meski demikian, kejadian-kejadian tersebut hanya mengakibatkan nilai klaim yang relatif kecil dan secara magnitudo kerugian dapat dikelompokkan menjadi kejadian *attritional* dengan total kerugian sebesar Rp 1,6 miliar," terang Fauzie dalam sambutannya di Statistik Asuransi Gempabumi Indonesia 2020, dikutip *Investor Daily*, Selasa (13/4).

Statistik memaparkan, terjadi 31 kasus klaim terhadap sebelas kejadian gempa bumi sepanjang 2020. Klaim terbesar dikonstruksikan dari kejadian gempa bumi di Sukabumi pada 30 April 2020 dengan magnitudo sebesar 4,8. Kejadian itu menyumbang empat kasus klaim senilai Rp 910 juta.

Kemudian diikuti delapan kasus klaim senilai Rp 239,61 juta di Bengkulu, atas kejadian gempa bumi 19 Agustus 2020 bermagnitudo 6,8. Selanjutnya, gempa bumi dengan magnitudo 6,6 di Yogyakarta pada 7 Juli 2020 menyumbang satu klaim dengan nilai Rp 200 juta.

Berikutnya, gempa bumi yang juga terjadi di Bengkulu dengan magnitudo 5,7 pada 10 Maret 2020, menyumbang tiga kasus klaim senilai Rp 132,09 juta. Sisanya, nilai klaim masing-masing di bawah Rp 100 juta terjadi akibat gempa bumi atas dua kejadian di Tua Pejat yang menyumbang delapan kasus klaim. Lalu dua kasus klaim di Bali, satu kasus klaim di Saringgi, dua kasus klaim di Pesisir Selatan, satu kasus klaim di Ambon, dan terakhir satu kasus klaim di Lembata.



Ahmad F Darwis

Sedangkan jika ditilik berdasarkan okupasi, frekuensi klaim gempa bumi di 2020 hanya dikonstruksikan sektor komersial dan residensial. Sektor komersial menyumbang tiga kasus dan sektor residensial menyumbang sisanya delapan kasus. Adapun secara nilai klaim sektor komersial berkontribusi 29,86% dan sektor residensial sebesar 70,14%.

Selain menerangkan klaim pada 2020, sederet pembayaran klaim terbesar di masa lalu juga dipaparkan. Misalnya kejadian klaim gempa bumi Pariwisata pada 30 September 2009 dengan magnitudo 7,6. Ketika itu asuransi membayarkan klaim sebesar Rp 1,08 triliun atau 2,46% dari eksposur sebesar Rp 44,07 triliun.

Kemudian kejadian gempa bumi Donggala pada 28 September 2018 bermagnitudo 7,7. Asuransi membayarkan klaim senilai Rp 1,03 triliun atau hanya 0,02% dari eksposur wilayah terdampak mencapai Rp 6.439,57 triliun. Adapun gempabumi dengan magnitudo 9 di Aceh pada 26 Desember 2004 juga dicatatkan. Dari kejadian itu asuransi membayarkan Rp 889,68 miliar atau 3,65% dari eksposur wilayah terdampak mencapai Rp 24,36 triliun.

Selain menyajikan perkembangan portofolio asuransi gempa bumi di Indonesia, statistik olahan Maipark itu juga mengulas sejumlah topik lain. Misalnya Sifat-Sifat Dasar Asuransi Gempa Bumi dan ulasan aktuaria Mengenal Ketidakterdugaan pada Catastrophe Model. (pri)

Rights Issue Rp 500 Miliar, Bank Oke Minta Persetujuan RUPSLB

JAKARTA – PT Bank Oke Indonesia Tbk akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) dan RUPS luar biasa (RUPSLB) pada 5 Mei mendatang. Salah satu agenda RUPSLB adalah meminta persetujuan *rights issue* sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar.

Pada agenda RUPSLB akan membahas mengenai pengeluaran saham dalam simpanan melalui penawaran umum terbatas (PUT) III dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *rights issue*.

"Dalam RUPSLB akan diusulkan untuk menyetujui rencana *rights issue* dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar dengan harga per lembar akan ditetapkan kemudian," terang manajemen Bank Oke dalam keterbukaan informasi, Selasa (13/4).

Agenda kedua RUPSLB adalah mengusulkan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan

dan memberikan kewenangan kepada direksi perseroan untuk menyusun, serta menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan.

Lalu, dalam rapat akan diusulkan untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan susunan pengurus Bank Oke. Dalam hal memerlukan persetujuan OJK maka akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Sementara itu, agenda RUPST di antaranya penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2020. Kemudian, pengurus perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS agar rapat memutuskan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dialokasikan sampai dengan 20% disisihkan sebagai cadangan. Kemudian, sisanya masuk ke saldo laba tahun lalu. (nid)

BSI Gelar Akad Massal 1.500 Nasabah KPR Sejahtera

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melaksanakan akad massal 1.500 nasabah Program BSI KPR Sejahtera di 17 Provinsi serentak secara online. Program BSI KPR Sejahtera merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung dan menjalankan program nasional Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah dan BSI membantu dalam koridor sesuai prinsip syariah.

Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar menjelaskan, akad massal yang dilakukan di 83 kantor cabang ini merupakan salah satu komitmen Bank Syariah Indonesia untuk menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

"Kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah, tentu sesuai prinsip syariah. Kami juga berharap program BSI



Kokok A Akbar

KPR Sejahtera dapat langsung membantu masyarakat untuk memiliki rumah pertamanya, serta tetap dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan," ungkap Kokok dalam acara BSI Ramadhan Fest secara virtual, Selasa (13/4).

Pada tahun ini, untuk mendorong penyaluran program BSI KPR Sejahtera, perseroan

akan mengoptimalkan *market share* dan *database* nasabah eksisting yang ada. Selain itu membangun sinergi dengan *developer* terbaik dari setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan perumahan. "Targetnya, BSI dapat menyalurkan KPR Sejahtera sebesar Rp 2 triliun atau lebih dari 14 ribu nasabah pada 2021," kata Kokok.

Target program BSI KPR Sejahtera adalah masyarakat berpenghasilan hingga Rp 8 juta (termasuk *joint income*), dengan kategori golongan berpenghasilan tetap. Adapun segmen yang menjadi target market berasal dari karyawan (PNS/instansi pemerintah), karyawan BUMN, TNI/Polri, dokter dan tenaga kesehatan, serta pegawai perusahaan swasta.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengemukakan, fasilitas FLPP ini dapat membantu masyarakat

untuk memiliki rumah dengan pembiayaan yang murah.

"Kami berharap menjadi berkah untuk yang telah merimanya terutama pada awal Ramadan tahun ini. Melalui bantuan program FLPP, nasabah BSI diharapkan mampu menjaga rumah yang sudah diterima melalui pembiayaan BSI KPR Sejahtera," jelas Arief. Kegiatan akad massal 1.500 nasabah ini merupakan bagian rangkaian *virtual event* BSI Ramadan Fest yang berlangsung selama Ramadan 1442 H sejak 13 April hingga 13 Mei 2021.

Acara tersebut diselenggarakan untuk memperkenalkan produk-produk yang dimiliki oleh BSI sekaligus sebagai media literasi dan inklusi keuangan syariah pada bulan Ramadan. Dengan konsep virtual, BSI Ramadan Fest diharapkan memudahkan akses masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan BSI tanpa harus pertemuan tatap muka. (mid)



Target Penyaluran Kredit

Petugas mengecek mesin ATM di Jakarta, kemarin. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perbankan untuk memenuhi target penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai 35% dari total kredit perbankan nasional pada 2021.

Korlantas Polri Gandeng BNI Layani Pembayaran SIM Online



Royke Tumilaar

JAKARTA – Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online, melalui virtual account (VA). Kerja sama tersebut merupakan salah satu komitmen BNI untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam penerapan layanan secara digital yang secara konsisten digaungkan BNI.

Kerja sama tersebut terkait peluncuran aplikasi Sinar (SIM Nasional Presisi) atau SIM online oleh Korlantas Polri dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan pembuatan dan perpanjangan SIM. Peluncuran aplikasi ini masih dalam rangkaian Program Prioritas Kapolri yang disebut Presisi yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.

Adapun peluncuran Sinar dilakukan di Kantor Satpas Daan Mogot

dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Royke Tumilaar menjelaskan, BNI menyambut baik peluncuran Sinar ini sebagai upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat, implementasi digitalisasi di lingkungan Polri.

"Di sisi lain inovasi ini turut mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan melalui layanan perpanjangan SIM dari rumah saja," terang Royke dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily*, Selasa (13/4).

Dia menjelaskan, BNI siap dengan solusi layanan digital untuk pembayaran SIM tersebut, di mana pemohon SIM akan mendapatkan VA BNI sebagai sarana melakukan pembayaran PNPB SIM.

"Untuk memudahkan masyarakat, pembayaran PNPB tersebut bisa dilakukan melalui bank manapun termasuk melalui *e-channel* BNI seperti ATM, BNI Mobile Banking serta juga melalui seluruh kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Royke.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, sebelum melakukan registrasi perpanjangan SIM, masyarakat hanya perlu *download* aplikasi Sinar yang tersedia di Play Store maupun App Store.

"Aplikasi Sinar ini berisi layanan perpanjangan SIM A dan SIM C secara *online* tanpa kehadiran pemohon, layanan uji teori SIM secara *online*, layanan pemeriksaan psikologi melalui aplikasi *e-psi*, dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi *e-rikkes*," jelas Listyo. (ris)



Peluncuran Aplikasi Sinar

Dari kiri ke kanan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat peluncuran simbolis aplikasi Sinar (SIM Nasional Presisi) di Jakarta, Selasa (13/4/2021). Dengan aplikasi Sinar, masyarakat dapat melakukan pembuatan dan perpanjangan SIM A dan SIM C dari mana saja secara online serta melakukan pembayaran melalui Virtual Account BNI.

Beli Produk Tugu Insurance Bisa Lewat Aplikasi MyPertamina

JAKARTA – Pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina sekarang tidak hanya dapat menikmati harga hemat untuk setiap pembelian bahan bakar mesin (BBM) maupun berbagai produk untuk kebutuhan berkendaraan, namun juga dapat melakukan pembelian berbagai produk-produk asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance).

Dengan hadirnya produk-produk asuransi Tugu Insurance pada aplikasi MyPertamina, maka diharapkan pengguna MyPertamina bisa memperoleh kemudahan dalam mendapatkan produk-produk perlindungan terhadap aset dan juga dirinya. Saat ini produk *t-drive* (asuransi mobil), *t-ride* (asuransi motor), dan *t-fracture* (asuransi patah tulang) sudah bisa dibeli melalui aplikasi MyPertamina dengan melakukan klik pada *icon* Asuransi.

"Di tengah kondisi pandemi seperti ini, platform digital menjadi opsi dan solusi bagi pelanggan yang merasa khawatir untuk melakukan kontak fisik. Oleh karena itu, Tugu Insurance bekerja sama dengan MyPertamina untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan yang membutuhkan produk asuransi tanpa perlu terjadi kontak fisik. Lebih mudah, cepat, dan aman," terang Presiden Direktur Tugu Insurance Indra Baruna dalam

keterangan tertulis, Selasa (13/4). *T-ride* merupakan produk asuransi kendaraan bermotor yang dapat memberikan perlindungan untuk motor dengan jaminan *total loss* serta dapat ditambah dengan perluasan untuk kebutuhan berkendaraan, namun juga dapat melakukan pembelian berbagai produk-produk asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance).

Dengan hadirnya produk-produk asuransi Tugu Insurance pada aplikasi MyPertamina, maka diharapkan pengguna MyPertamina bisa memperoleh kemudahan dalam mendapatkan produk-produk perlindungan terhadap aset dan juga dirinya. Saat ini produk *t-drive* (asuransi mobil), *t-ride* (asuransi motor), dan *t-fracture* (asuransi patah tulang) sudah bisa dibeli melalui aplikasi MyPertamina dengan melakukan klik pada *icon* Asuransi.

"Di tengah kondisi pandemi seperti ini, platform digital menjadi opsi dan solusi bagi pelanggan yang merasa khawatir untuk melakukan kontak fisik. Oleh karena itu, Tugu Insurance bekerja sama dengan MyPertamina untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan yang membutuhkan produk asuransi tanpa perlu terjadi kontak fisik. Lebih mudah, cepat, dan aman," terang Presiden Direktur Tugu Insurance Indra Baruna dalam

keterangan tertulis, Selasa (13/4). *T-ride* merupakan produk asuransi kendaraan bermotor yang dapat memberikan perlindungan untuk motor dengan jaminan *total loss* serta dapat ditambah dengan perluasan untuk kebutuhan berkendaraan, namun juga dapat melakukan pembelian berbagai produk-produk asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance).

2011-2020, Investasi Ilegal Rugikan Masyarakat Rp 114,9 T

Oleh Prisma Ardianto

▶ JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011-2020 mencapai Rp 114,9 triliun. Upaya penindakan harus seiring dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan hingga risiko investasi ilegal.

Data OJK mengutip Satgas Waspada Investasi (SWI) menunjukkan, nilai kerugian tertinggi masyarakat terjadi pada 2011 yang mencapai Rp 68,62 triliun. Ketika itu, Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) menjadi kontributor utama merugikan sekitar 1.000 korban senilai Rp 45 triliun.

Selanjutnya kerugian investasi pada 2016 mencapai Rp 5,4 triliun terhadap 50 ribu lebih korban. Adapun Pandawa Grup menjadi kontributor kerugian terbesar pada tahun itu. Berlanjut tahun 2017, kerugian atas investasi ilegal sebesar Rp 4,4 triliun, termasuk didalamnya adalah kasus First Travel.

Pada 2018 dan 2019, masing-masing mencatatkan kerugian atas investasi ilegal sebesar Rp 1,4 triliun dan Rp 4 triliun. Nilai itu melonjak sepanjang tahun 2020 atau ketika pandemi

Covid-19, nilai kerugian masyarakat mencapai Rp 5,9 triliun. Salah satu emiten milik terdakwa kasus Jiwara sekaligus tersangka Asabri menjadi salah satu kontributor terbesar pada tahun lalu.

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengakui, satu tahun pandemi telah mengakibatkan dampak signifikan bagi pengusaha dan masyarakat umum di Indonesia. Ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang teknologi dan keuangan, maka masyarakat pun beradaptasi dalam transaksi jual beli, pembayaran, transfer, investasi, atau meminjam uang.

"Tapi situasi pandemi banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk melakukan penipuan atau kejahatan keuangan. Di antaranya melakukan penawaran produk investasi atau usaha *fintech* ilegal," ujar Tirta pada webinar bertajuk Melindungi Masyarakat dari Jeratan *Fintech* dan Investasi Ilegal, Selasa (13/4).

Tirta mengungkapkan, sepanjang 2020 sampai Februari 2021 SWI telah



Tirta Segara

menutup sekitar 390 kegiatan investasi ilegal. Satgas juga telah menutup lebih dari 1.200 *fintech* ilegal dalam satu tahun. Berikut 92 gadai ilegal yang sudah ditutup kegiatan usahanya.

Dia menjelaskan, OJK bersama SWI selalu memberikan peringatan dan kontak bertanya namun masih banyak anggota masyarakat yang tertarik pada investasi ilegal. Berdasarkan observasi otoritas, setidaknya ada tiga alasan *fintech* dan investasi ilegal masih marak dan terus memakan korban.

Pertama, dari sisi masyarakat perlu diakui bahwa tingkat literasi keuangannya relatif rendah yaitu baru 38%. Sementara tingkat inklusinya mencapai 76%. Hal tersebut merujuk pada survei akhir 2019, yang tentu sekarang tingkat literasi sudah lebih tinggi namun masih tetap rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Bahkan, literasi untuk pasar modal baru menyentuh level 5% atau dengan kata lain mayoritas orang

tidak mengerti terkait pasar modal.

Kedua, menurut Tirta, kemajuan teknologi turut mendorong pihak tertentu melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Penutupan dan penindakan sejumlah entitas ilegal terus dilakukan, tapi berkat teknologi juga entitas ilegal kembali masif bermunculan.

"Dengan perkembangan dunia digital, penawaran investasi digital dapat dilakukan lintas batas atau *cross border*. Banyak juga *server* yang berlokasi di luar wilayah NKRI. Ini juga yang sulit untuk Satgas Waspada Investasi mengambil tindakan hukum," terang dia.

Ketiga, Tirta menjelaskan, OJK dan SWI juga melihat adanya kecenderungan sekelompok masyarakat yang kurang bijak. Mereka menginginkan keuntungan besar agar cepat kaya tapi tanpa kerja keras. Lebih parah lagi, tingkat pendidikan bukan jaminan. Ada kasus yang menyebutkan bahwa seorang sarjana maupun tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih bisa tertipu.

"Sementara itu, bagi kelompok yang mencari pembiayaan atau peminjam, ini kurang berhati-hati, kurang berfikir panjang, banyak di antara mereka yang tidak bijak untuk meminjam dengan nilai di luar kemampuan mereka. Memang pencairan mudah, tanpa syarat, padahal sebenarnya menjerak," kata Tirta.

Dia menegaskan, OJK bersama SWI akan terus berupaya membasmi *fintech* ilegal secara preventif maupun proaktif. Program edukasi untuk mendorong literasi keuangan juga terus dilakukan melalui webinar, media sosial, dan kanal lainnya. Masyarakat diminta menerapkan 2L dalam berinvestasi yakni logis dan legal.



Hapus Kredit Macet

Nasabah melakukan transaksi tunai melalui mesin ATM di sebuah pusat perbelanjaan, Bogor, kemarin. Perbankan BUMN atau Hibrida (Himpunan Bank-bank milik Negara) tengah mempertimbangkan untuk melakukan pemutihan kredit macet bagi nasabah perbankan yang punya saldo kredit tak mampu bayar. Saat ini perbankan tengah menghitung restrukturisasi kredit sekitar Rp 1.200 triliun dari total portofolio industri sekitar Rp 6.000 triliun.

BFI Finance Luncurkan BFI Connect

JAKARTA – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) meluncurkan BFI Connect yang merupakan platform *open application performing interface* (API) yang dapat mengintegrasikan layanan dan produk BFI Finance ke platform digital milik para mitra. Dengan demikian diharapkan, kerja sama melalui platform digital mitra, baik itu perusahaan rintisan (*start-up*), *e-commerce*, korporasi, maupun individu akan semakin efisien.

Digital and Business Development Head BFI Finance Yeftha Bramana menjelaskan, saat ini merupakan era di mana kita akan bekerja dengan mekanisme perpaduan data dan teknologi, interkoneksi dan transparansi. Artinya, dunia baru akan segera hadir dengan mekanisme-mekanisme kerja baru dan tidak bisa lagi bertahan dengan logika-logika analog.

"Kita bisa lihat bagaimana ide-ide inovasi hari ini sedang tumbuh dan dipertemukan oleh teknologi yang menawarkan prinsip kecepatan, praktis dan efisien. Di era kerja sekarang, kolaborasi menjadi utama," kata Yeftha saat peluncuran BFI Connect yang dilakukan secara virtual, Selasa (13/4).

Menurut dia, dalam kerja-kerja sebelumnya, batasan-batasan geografis seringkali menjadi beban anggaran bagi sebuah industri. Namun dengan adanya percepatan teknologi maka jarak dan waktu sedang dipraktikkan dalam satu langkah.

Hal tersebut yang sedang ditawarkan oleh BFI Connect, di mana BFI Connect berupaya mengintegrasikan layanan dan produk BFI Finance ke dalam platform digital milik para mitra. Cukup dengan klik <https://connect.bfi.co.id/>, para partner

dapat langsung mempelajari *service package* yang disediakan BFI Finance sekaligus melakukan testing dalam *environment sandbox* yang aman.

Saat ini, BFI Connect menyediakan empat layanan utama yakni pengiriman data pengajuan pembiayaan, kalkulator simulasi perhitungan pembiayaan, status terkini atas pengajuan pinjaman, dan jumlah insentif atas pengajuan pembiayaan yang disetujui.

"Dengan adanya BFI Connect, maka semakin meneguhkan kehadirannya mampu menjadi bagian pelayanan yang cepat bagi seluruh mitra dan aliansi BFI Finance. Serta menjadi perusahaan yang akan terus berinovasi agar adaptif dan tetap relevan bagi perkembangan zaman," pungkaskan dia.

Digital Business Head BFI Finance Netta Prismawiyati menambahkan, BFI Connect

merupakan upaya perusahaan untuk menyiapkan digitalisasi yang terjadi pada industri *multifinance*. Pasalnya, BFI Finance ingin mendorong adanya kolaborasi untuk membangun ekosistem digital dan memberikan pelayanan ke masyarakat yang lebih luas.

"Dampak langsungnya ada BFI Connect secara industri ini adalah membuka peluang untuk terbukanya kolaborasi yang lebih luas lagi bersama partner digital," ujar Netta.

Netta menjelaskan, saat ini BFI Finance telah memiliki pasar dan jaringan *offline* yang luas. Namun dia melihat partner-partner *startup* memiliki inovasi dan teknologi yang mumpuni. "Kalau misalnya ini dikolaborasi bersama melalui BFI Connect, kami melihat hal tersebut bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnis ke depan," pungkaskan Netta. (ris)